

**ANALISIS MAQASHID SYARI'AH TERHADAP SISTEM
DEMOKRASI DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas- tugas dan Memenuhi Syarat- syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan
Hukum

Oleh :

RAESITHA ZILDJIANDA

NPM : 1621020026

Program Studi : Siyasah Syar'iiyah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
2019**

Abstrak

Pancasila sebagai sebuah ideologi dan acuan sistem demokrasi di Indonesia telah melampaui waktu yang panjang. Memang, sebuah negara apabila hendak menjadi sesuatu yang ideal, maka dalam penyelenggaraannya haruslah berlandaskan demokrasi. Bukankah pemerintahan yang demokrasi akan mencurahkan kebaikan pada rakyat secara keseluruhan. Pada dasarnya demokrasi melekat pada kebebasan dan partisipasi individu. Menggunakan kebebasan, hak-hak sipil, dan politik, merupakan bagian dari kehidupan yang melekat pada individu sebagai makhluk sosial. Partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik mengandung nilai intrinsik bagi kehidupan manusia. Semua itu sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila. Untuk itu, artikel ini mencoba menyuguhkan praktik demokrasi di Indonesia dalam sejarahnya. Diketahui bahwa Pancasila adalah landasan demokrasi dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Pancasila memang menawarkan demokrasi yang ideal dan sebenarnya. Hanya saja, Pancasila sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 70 tahun, dan juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki rupa yang berbeda seiring dengan perubahan wajah perpolitikan di negeri ini. Apakah ini merupakan pertanda bahwa bangsa ini memang sedang belajar untuk mencari format yang tepat dalam berdemokrasi, yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Terlepas dari itu, upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang ideal harus terus dilakukan dengan melakukan dekonstruksi secara berkelanjutan. Dekonstruksi yang dimaksud adalah upaya untuk melakukan pembacaan ulang seluruh realitas yang seakan jauh dari tujuan cita-cita Pancasila.

Indonesia dengan keberagaman suku bangsa dan agama menjadikannya negara dengan pluralitas. Keberagaman dari Indonesia tersebut haruslah diatur oleh sebuah sistem yang kita sebut sebagai demokrasi, selain dapat menampung aspirasi rakyat, demokrasi merupakan wadah untuk memfasilitasi hak dan kewajiban daripada negara dan rakyat yang mendiaminya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman gesek- gesekan yang terjadi di Indonesia semakin memunculkan eksistensinya. Banyak dari warga beragama khususnya agama islam mulai meragukan bahkan menciderai nilai- nilai demokrasi yang ada. Di dalam Maqashid al- Syari'ah akan dibahas secara mendalam bagaimana Islam sebagai rahmatan lil 'alamin tentunya tidak bersebrangan dengan sistem demokrasi yang ada saat ini.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap
Sistem Demokrasi Di Indonesia**

Nama : Raesitha Zildjianda

NPM : 1621020026

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Dr. Agus Hermanto, M.H.I

NIP.-

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah,

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Analisis Maqashid Syari'ah Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia"**, disusun oleh **Raesitha Zildjianda**, NPM 1621020026, Jurusan Siyasah Syar'iiyyah, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2019, Pukul 08.00-10.00 WIB, Ruang Dekanat Lantai I.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua

: Dr. H. Khairuddin, M.H.

Sekretaris

: Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji Utama

: Drs. Henry Iwansyah, M.A.

Penguji Pendamping I : Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

Penguji Pendamping II : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 19621021993031002**

MOTTO

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “Dan kami tidak mengutus kamu muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” (Q.S. al- Anbiya: 107)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah Edy Sonapel dan Ibu Elysa Nurdin yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku, yang tidak mungkin dapat kubalas. Semoga ini menjadi langkah awal membuat ayah dan ibu bangga.
2. Adikku tersayang Dhea Alizka yang selalu memberi dukungan dan kasih sayang.
3. Sahabat sekaligus saudaraku yang selalu mengingatkanku akan sang pencipta dan mendakwahkan Agama Rahmatan Lil 'Alamin ini.
4. Pembimbing Akademik 3 ku Tya Andika Rizalianti, terimakasih telah membimbing dan mengajariku dengan penuh kesabaran dan ketelatenan.
5. Seluruh teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu Jurusan Siyash Syar'iyah khususnya kelas Internasional, yang saling memberikan motivasi dan seluruh dosen yang selalu ikhlas memberikan ilmunya, semoga bermanfaat baik dunia maupun akhirat.
6. Seluruh teman-teman Asrama Ma'had Al- Jami'ah UIN Raden Intan Lampung, yang selalu memberikan semangat.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah menewasakanku dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Raesitha Zildjianda. Dilahirkan pada tanggal 03 Juli 1998 di Tanjung Karang Bandar Lampung. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Edy Sonapel dan Ibu Elysa Nurdin.

Pendidika yang pernah di tempuh :

1. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak- Kanak Departemen Agama, tamat pada tahun 2005.
2. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 01 Tanjung Aman Kotabumi, tamat pada tahun 2011.
3. Melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada MTs N 02 Kotabumi, tamat pada tahun 2013.
4. Melanjutkan Pendidikan pada jenjang Sekolah Menegah Atas pada SMAN 01 Kotabumi, Jurusan IPA tamat pada tahun 2013.
5. Pada Tahun 2016 Melanjutkan Pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung mengambil Program studi Siyasah Syar'iyah di Fakultas Syari'ah.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis hatutkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia- NYA yang senantiasa memberikan petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat Serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut- NYA yang taat pada ajaran agama- Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan IPTEK Serta di ridhai Allah SWT yaitu dengan agama islam.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Bimbingan motivasi semua pihak memberi arti yang sangat tinggi bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi- tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr.H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Nurnazli, S.H, S.Ag.M.H. Selaku ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. Selaku Pembimbing I, dan bapak Dr. Agus Hermanto, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing mengarahkan dan memotivasi hingga proposal ini selesai.
5. Bapak dan ibu dosen, para staff karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Pemimpin dan karyawan perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain- lain.

Semoga amal baik Bapak dan Ibu serta semua pihak akan diterima dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis telah berupaya dengan semaksimal

mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin.*

Bandar Lampung, Oktober 2019

Raesitha Zildjianda

NPM: 1621020026



DAFTAR ISI

JUDUL	
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian	11

BAB II MAQASHID ASY- SYARI'AH DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

A. Maqashid Asy- Syari'ah sebagai landasan Politik dan Ketatanegaraan	
1. Pengertian dan Sejarah	16
2. Maqashid Asy- Syari'ah beserta dalil- dalilnya (Al- Qur'an dan Hadist)	20
3. Kaidah- kaidah Maqashid Asy- Syari'ah di dalam Fiqh Siyasah	28
B. Demokrasi	
1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi	47
2. Latar Belakang Demokrasi	55
3. Prinsip- prinsip Demokrasi	56
4. Macam- macam Demokrasi	61

BAB III PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Sejarah Proses Demokrasi di Indonesia	65
--	----

B. Demokrasi dalam Negara dan konstitusi di Indonesi.....	70
C. Bentuk Penerapan Demokrasi di Indonesia	82

**BAB IV AJARAN DAN PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM
PANDANGAN MAQASHID ASY- SYARI'AH87**

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	105
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami judul skripsi ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa isitilah yang terkandung dalam judul skripsi ini adapun judul skripsi ini adalah :

“ Analisis Maqashid al- Syari’ah terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia” .
Adapun hal- hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut :

1. Maqashid adalah maksud dan tujuan- tujuan syariat dari hukum- hukum partikular.¹
2. al-Syari’ah adalah tujuan Allah dan Rasul- Nya dalam memberikan hukum- hukum Islam. Tujuan itu dapat di lihat dalam ayat- ayat al- Quran dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang tujuan utamanya kepada kemashlahatan umat manusia.²
3. Sistem adalah perangkat atau unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.³
4. Demokrasi adalah suatu sistem bermasyarakat dan bernegara dimana pemerintahan menitik beratkan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat yang mana penneyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu : Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*) , Pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*).⁴

¹ Yusuf Al – Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2007), h.9.

² Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2233

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1362.

⁴ Dwi Sulisworo, et. al., *Demokrasi* (Malang : Universitas Ahmad Dahlan, 2012), h. 5.

Jadi yang dimaksud dengan maqashid al- syariah terhadap sistem demokrasi ialah mencari jalan tengah dan membuka tabir kesalahan pemahaman umat Islam dengan menjabarkannya secara spesifik mengenai sistem demokrasi yang sebenarnya sesuai dengan syariat Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan- alasan yang mendorong dipilihnya judul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Menganalisis bagaimana peranan sistem demokrasi di dalam sebuah Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Hal ini yang mendasari munculnya apakah di dalam sistem demokrasi tersebut terdapat hukum- hukum maqashid syariah yang nantinya dapat memberikan dampak baik terhadap masyarakat maupun Negara itu sendiri.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam masih merasa belum terpenuhi kebutuhan atau hajatnya hidupnya di dalam sebuah negara, dikarenakan sistem tidaklah mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menyebabkan banyaknya gesekan- gesekan dari berbagai pihak dan golongan. Penulis ingin menjabarkan secara lebih mendalam dan terperinci mengenai bagaimana sebenarnya sistem demokrasi dapat diterapkan dan dijadikan sebagai salah satu sistem dengan negara mayoritas Islam.

2. Alasan Subyektif

Masyarakat Indonesia yang beragama Islam khususnya banyak menyalahkan pemerintah dengan sistem yang saat ini kita gunakan yakni sistem demokrasi yang mereka anggap adalah sebuah kesalahan. Dengan cara menggali lebih dalam lagi bagaimana analisis dari maqashid al- syariah mengenai hal ini dapat membuka tabir mengenai sistem seperti apa yang umat beragama khususnya agama Islam

inginkan. Banyak dikalangan masyarakat menyalahkan pemerintah atau subjek- subjek dari pemerintah yang mereka persalahkan demi mencari pembenaran dari rasa ketidak sukaan mereka terhadap sistem yang ada.

Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Syar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Melihat relasi antara agama dan demokrasi, dilihat dari basis empiriknya, keduanya memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pemikiran manusia, sehingga agama dan demokrasi memiliki dialognya sendiri. Meski demikian, tidak ada hal yang memungkinkan antara agama dan demokrasi dapat pisahkan, agama dan demokrasi dapat saling berdampingan.

Perbedaan basis empirik itu tidak akan menghalangi bertemunya dua konsep dalam satu titik, Meskipun demokrasi berdasarkan penalaran manusia dan agama berasal dari tuhan. Terlebih karena wahyu mengandung nilai atau konsep yang mendorong demokrasi, seperti nilai persamaan hak manusia dan adanya prinsip syura (musyawarah), meski tidak ada penjelasan secara gamblang tentang bentuk demokrasi yang harus diterapkan dan digunakan oleh tiap- tiap negara. Bentuk demokrasi yang tepat tergantung pada penalaran, bersifat situasional, dan di pengaruhi oleh faktor kebudayaan.

Oleh sebab itu sampai kini tidak ada kesamaan bentuk demokrasi di dunia ini. Dari perbedaan bentuk demokrasi itu dapat ditarik kesimpulan mengenai asas- asas demokrasi, yang terpenting di antaranya adalah bahwa demokrasi

harus berdasar pada asas kedaulatan rakyat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁵

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara yang satu di antaranya adalah Indonesia. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara isi dan konsep telah memberikan arah bagi peranan masyarakat, dengan kata lain demokrasi tidaklah sekedar sistem yang belum siap tetapi sistem yang sudah sangat baik untuk diterapkan untuk warga negara di Indonesia.

Negara yang menerapkan sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas hasil mufakat rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Konsep negara demokrasi dalam kepustakaan di kenal sebagai sebuah mekanisme bagaimana sistem pemerintahan dalam suatu negara di jalankan atau di selenggarakan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Pendapat dari Burkens, memperjelas konsep demokrasi dengan mengemukakan syarat minimum demokrasi, sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam pemilihan yang bebas dan rahasia.
2. Setiap orang mempunyai hak untuk di pilih.
3. Setiap orang mempunyai hak politik berupa hak kebebasan berpendapat dan berkumpul.

⁵ Imam Annas Muslih, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah pemikiran Khaleed Abu el Fadl). (*Al- Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VI No. 1, Januari 2012), h. 43- 44.

4. Badan perwakilan memiliki pengaruh di dalam pengambilan keputusan melalui sarana hak untuk ikut memutuskan (*mede beslissing recht*) dan/ atau melalui wewenang pengawas.
5. Asas keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan sifat putusan yang terbuka.
6. Di hormatinya hak- hak kaum minoritas.

Adanya suatu prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan arahan bahwa pemerintahan dijalankan atau diselenggarakan berdasar atas paham kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali melalui pemilihan pemimpin pemerintahan dan sekaligus menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan guna mengawasi jalannya dan terselenggaranya pemerintahan negara. Sebagaimana dilakukan oleh Jimly Assidique bahwa rakyatlah penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara.

Namun, arti dan makna demokrasi ini telah berubah sejalan dengan perubahan zaman dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke- 18 bersamaan dengan perkembangan dan praktik sistem demokrasi di banyak negara.

Dalam pengembangan konsep demokrasi modern di sebutkan minimal ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, yaitu :

1. Harus diadakannya sikap yang beretika dan berintegritas serta memiliki moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
3. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang- orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat terjaminnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap peraturan perundang- undangan yang berlaku tidak boleh di tetapkan sekaligus diterapkan dengan cara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan berat sebelah yang mana hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua rakyat di dalam negara tersebut. Dengan demikian, negara hukum yang dikembangkan bukan *absolute rechtsstaat*⁶, melainkan *demokratische rechtsstaat*.⁷

Demokrasi merupakan suatu sistem di dalam sebuah Negara dimana kekuasaan sepenuhnya berada di tangan rakyat, didalam demokrasi pun terdapat macam- macamnya yakni :

1. Demokrasi Ekonomi, persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi semua warga negara dalam ekonomi.
2. Demokrasi Formal, bentuk pemerintahan yang secara garis besar hanya di lihat dari aspek ada atau tidaknya lembaga politik demokratis seperti perwakilan rakyat.
3. Demokrasi langsung, bentuk pemerintahan demokrasi yang dilakukan secara langsung oleh semua warga negara, misalnya dalam membuat keputusan politik (pemilihan kepala negara).
4. Demokrasi Liberal, sistem politik dengan banyak partai, kekuasaan politik berada di tangan politisi yang berpusat di parlemen.
5. Demokrasi material, bentuk pemerintahan yang menjamin kemerdekaan dan persamaan, sebagai contoh kemerdekaan berfikir dan mengeluarkan

⁶ (Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 232.). Menurut Scheltama, Unsur- unsur Rechstaat adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani kepentingan rakyat. Karena konsep rechstaat di Eropa Kontinental sejak awal berlandaskan pada filsafat liberal dan sekuler yang individualistik, maka ciri ini pun sangat mendarah daging dalam pemikiran dan praktik negara hukum Eropa Kontinental. Konsep negara hukum mereka sama sekali tidak di dasarkan pada agama, karena mereka telah memisahkan agama dari kehidupan politik.

⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012). h. 201.

pendapat, kemerdekaan mengadakan rapat dan berkumpul, kemerdekaan mengatur diri sendiri yang dilandasi corak pemerintahan.

6. Demokrasi Pancasila, demokrasi yang berdasarkan sila- sila Pancasila yaang diterapkan sebagai landasan dari suatu negara dalam berdemokrasi.
7. Demokrasi Plutokrat, sistem demokrasi yang dikuasai oleh orang yang memiliki kelebihan harta.
8. Demokrasi Politik, sistem politik yang dilandasi dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom.
9. Demokrasi Terpimpin, bentuk pemerintahan yang untuk pertama kali di umumkan secara resmi di dalam pidato Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 , yakni sebuah corak demokrasi yang mengenal satu pemimpin menuju tujuan suatu masyarakat keadilan sosial.
10. Demokrasi Tidak Lansung, corak pemerintahan demokrasi yang dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih oleh rakyat serta bertanggung jawab kepada rakyat ; maksudnya warga negara diberi hak turut serta menentukan keputusan politik badan perwakilan rakyat.⁸

Di Indonesia sendiri penerapan Demokrasi telah dimulai sejak awal kemerdekaan yakni ketika presiden Soekarno menjabat menjadi seorang presiden. Yang mana demokrasi ini telah di umumkan pada saat “ Dekrit Presiden” tanggal 5 juli 1959. Di dalam dekrit tersebut presiden Soekarno melakukan sebuah langkah besar yakni sebagai langkah dalam penerapan demokrasi di Indonesia. Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya lagi UUDS 1950, kemudian akan di bentuk MPRS dan DPAS. Adanya dekrit tersebut memiliki sebuah akibat yang cukup baik bagi penerapan demokrasi di Indonesia dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Dari perubahan penerapan demokrasi tersebut menjadi titik acuan dan tolak ukur penerapan demokrasi pancasila di Indonesia.

Saat ini di Indonesia sendiri kita menggunakan demokrasi pancasila, yang secara substansi negara Indonesia memiliki semua jenis unsur demokrasi yang sudah disebutkan. Konsep negara pancasila, menjamin kebebasan bagi rakyatnya

⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007), h. 93- 94.

untuk menjalankan agamanya meski di lain sisi tidak menjadikan salah satu agama menjadi agama resmi negara. Negara tidak memisahkan kehidupan politik dengan agama. Karenanya, Negara tidak memberikan ruang kepada komunisme untuk hidup di dalam keberagaman dan kebersatuan masyarakat Indonesia di bumi Pancasila ini. Sebagai realisasi tidak adanya pemisahan ini, negara mengatur masalah keagamaan rakyatnya di bawah koordinasi Departemen Agama (Kementrian Agama).⁹

Dalam penerapan sebuah sistem tidak mungkin sekali tidak terjadi gesekan dan ketidaksepahaman, itulah yang terjadi ketika penerapan demokrasi di Indonesia. Masyarakat adalah rakyat yang berada dalam sistem demokrasi saat ini, ketika terjadi sebuah kesalahan paham dan ketidakpuasan dari masyarakat maka akan muncul yang namanya sebuah penolakan. Di Indonesia penolakan terhadap penerapan sistem demokrasi sudah sering kali kita mendengarnya. Mulai dari demo massal, membuat sebuah organisasi penolakan terhadap demokrasi dengan mengganti negara demokrasi menjadi negara Teokrasi. Hal ini yang cukup untuk menggelitik penulis untuk mengungkap bahwasanya penerapan demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam, penulis menggunakan titik acuan dari pada demokrasi dalam syariat Islam menggunakan Maqashid al-Syari'ah.

Maqashid al-Syari'ah dalam ilmu ushul fikih adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan salah satu faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.¹⁰

Ulama ushul fikih sepakat bahwa kemashlahatan bagi hamba Allah swt., wajib terkandung pada setiap hukum Allah swt., baik kemashlahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, setiap mujtahid dalam mengistinbatkan (menyimpulkan) hukum dari suatu kasus yang sedang di hadapi, harus berprinsip

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016). h. 234- 235.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 1108.

kepada tujuan- tujuan syarah dalam mensyariatkan hukum, sehingga hukum yang akan ditetapkannya sesuai dengan kemashlahatan umat manusia.¹¹

Ada beberapa alasan yang di kemukakan ulama ushul fikih dalam menetapkan bahwa di setiap hukum Islam itu terdapat tujuan yang hendak dicapai oleh syara', yaitu kemashlahatan umat manusia, diantaranya adalah firman Allah swt., dalam surah al – Nisa ayat 165.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “ *(Mereka Kami Utus) selaku rasul- rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul- rasul...*” . (Q.S. al- Nisa: 165)

Kandungan ayat ini, menurut ulama ushul fikih, menunjukkan bahwa dalam menentukan hukum- hukum Nya Allah swt., senantiasa menghendaki sesuatu yang bermanfaat bagi manusia sehingga apabila hal tersebut tidak di usahakan manusia ia akan merugi. Inilah makna yang terkandung dari di utusnya para rasul ” Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” Kata Rahmat dalam ayat di atas, menurut para ahli ushul fikih, mengandung pengertian bahwa pengutusan rasul membawa kemashlahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat.bagi umat manusia. Dalam Surah al- Anbiya’ (21) ayat 107 Allah berfirman :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : “*Dan kami tidak mengutus kamu muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam*” (Q.S. al- Anbiya: 107)¹²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia menjadi “kampung dunia” (*the global village*) yang kemudian membawa dampak pada terjadinya heterogenitas (tidak sama) dan pluralitas (keberagaman) di setiap sudut kampung dunia itu, baik dari segi ekonomi, budaya, etnik, ras, dan agama. Kenyataan ini di satu sisi mendorong interaksi, kooperasi, akomodasi, dan

¹¹ *Ibid.*, h. 1109

¹² *Ibid.*, h. 1109.

akulturasi antara berbagai kelompok masyarakat yang pluralistik tentu saja memiliki dampak yang baik bagi sebagian besar masyarakat kampung dunuia, tetapi dari sisi lain dapat menimbulkan ketegangan- ketegangan bahkan konflik serta perpecahan antara satu sama lain, karena masing- masing kelompok pada waktu yang sama juga akan berusaha mempertahankan identitasnya, termasuk pandangan ideologisnya tentang agama.¹³

Periode transisi pasca reformasi yang terjadi di Indonesia di sinyalir munculnya kekuatan- kekuatan politik yang didasarkan pada politik identitas dan alasan- alasan primordial. Di tengah kondisi tersebut, Islam muncul ke panggung politik dan kekuasaan sebagai sebuah kekuatan hegemonik yang memainkan peranan penting dalam formasi sosial- kultural masyarakat Indonesia. Di saat yang bersamaan, kebijakan desentralisasi membuka ruang bagi kelompok- kelompok Islam Indonesia untuk memasukkan nilai- nilai dominan melalui perda- perda syariah yang cenderung diskriminatif dan bertubrukan dengan hak- hak minoritas.¹⁴

Padahal, sistem demokrasi tidaklah menyalahi aturan Allah swt., Karena sistem tersebut sama- sama membawa kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia. Oleh Karennya penulis, ingin mengangkat maqashid al- syariah sebagai bahan acuan dari pada kemaslahatan atau kebaikan dari pada sistem yang demokrasi yang sedang berlaku sekarang di Indonesia, yakni demokrasi pancasila. Di dalam buku fiqh maqashid al- syari'ah karangan Yusuf al- Qaradhawi Maqashid Syariah adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum- hukum particular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk Individu, keluarga, jamaah dan ummat. “maksud- maksud” juga bisa disebut dengan hikmah- hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya suatu hukum.¹⁵

¹³ Hasbi Hasan, “Negara dan Hak- hak Minoritas Di Indonesia”. *Analisis Jurnal Studi Keislaman* Volume XII, Nomor 1 (Juni 2012 : Islam), h.3- 4.

¹⁴ *Ibid.*, h. 4

¹⁵ Yusuf Al- Qardhawi, *Op Cit.*, h. 17.

D. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian proposal ini adalah :

1. Bagaimana teori dan implementasi Demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Sistem Demokrasi di Indonesia dalam pandangan Maqashid al-Syari'ah ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia .
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis maqashid al-syari'ah terhadap sistem demokrasi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui sistem demokrasi dapat di terapkan di Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslimnya.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode *Deskriptif*¹⁶ dengan pendekatan

¹⁶ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka setia, 2008). h.90. Metode Penelitian deskriptif di pergunakan untuk menjelaskan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara lebih terperinci. Metode ini bertujuan menggambarkan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara apa adanya (realita) dalam konteks satu kesatuan yang saling berhubungan. Dengan cara menetapkan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep yang telah di kembangkan oleh peneliti dari segi aspek sosial dan budaya.

*Kualitatif*¹⁷ yang bersifat *Analitik*¹⁸. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun Syarat- syarat tersebut terdapat di dalam metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat

a. Jenis Penelitian

Ditelisik dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yakni suatu penelitian yang menekankan sumber informasi dari buku- buku, sistem dari sebuah negara, jurnal, makalah, surat kabar, dan menelaah dari berbagai literatur- literatur dan pendapat yang mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti,¹⁹ yaitu sumber- sumber yang memiliki keterkaitan dengan maqashid al- syari'ah dan demokrasi di Indonesia.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *analitik*. Adapun bentuk penelitian hukum ialah studi Komperatif (perbandingan)²⁰ yang terutama di fokuskan pada perbedaan- perbedaan yang terdapat di dalam aneka macam sistem (tata) hukum,²¹ yakni yang dilakukan dengan cara meneliti perbandingan antara hukum Islam (Maqashid al- Syari'ah) dengan sistem hukum Positif (Demokrasi) Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode *Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif yang bersifat Analitik* Dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data

Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi mengelompokkan terhadap fenomena sosial yang di sedang di hadapi (bermasalah).

¹⁷ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka Setia, 2008). h.90. Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagaimana mestinya), (sebagai lawannya adalah eksperimen), yaitu peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna (arti).

¹⁸ Beni Ahmad, *Metode Penelitian*, (Bandung : Pustaka setia, 2008). h.41. Dalam cara berfikir analitik , seseorang dapat meneliti berdasarkan dasar- dasar pengetahuan yang umum, dari proposisi yang berlaku secara umum, dan meneliti permasalahan- permasalahan khusus dari segi dasar pengetahuan yang umum itu.

¹⁹ Ranny Kautum, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

²⁰ Beni Ahmad, *Op Cit.*, h. 119.

²¹ *Ibid.*, h. 49.

dilaksanakan dengan melakukan seleksitas (pemilihan) data dan penentuan data yang dianggap representatif (dapat di jelaskan) dengan baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala- gejala yang ditemukan, yang tidak memungkinkan untuk diukur oleh angka- angka melainkan melalui penafsiran logis teoretis yang berlaku atas terbentuk begitu saja karena realitas yang baru, yang menjadi indikasi(tanda) signifikan terciptanya konsep baru.²²

2. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan proposal ini, maka bahan- bahan hukum tersebut diperoleh melalui dua cara yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih jelasnya berikut ini akan di uraikan tentang sumber dan tersebut, yaitu :

a. Sumber data Primer

Sumber data primer ialah tidak ada sumber data yang digunakan dengan primer secara khusus, dikarenakan semua referensi yang digunakan untuk mengumpulkan data ialah sumber primer

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh = dan dicatat oleh pihak lain).²³Yaitu buku- buku, makalah- makalah, majalah, jurnal, artikel- artikel, internet dan sumber – sumber yang berkenaan dengan penelitian ini, rancangan peraturan perundang- undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil- hasil penelitian,²⁴khususnya berkenaan dengan maqashid al- syari'ah dan demokrasi di Indonesia.

²² Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit*, h.90.

²³ Etta Mamang Sangaji et. al., *Op. Cit.*, h. 44.

²⁴ Nico Ngani, *Op. Cit.*, h. 15.

3. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif ini menggunakan metode dengan teknik wawancara yakni dilakukan dengan teknik pengamatan dengan cara mengkaji tingkah laku, teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.²⁵

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data- data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah. Adapun metode pengolahan data yakni sebagai berikut :

1) Editing

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau data terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Dengan tujuan untuk menghilangkan kesalahan- kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Pada bagian ini, kekurangan data atau kesalahan data dapat di lengkapi atau diperbaiki baik dengan pengumpulan data ulang ataupun dengan interpolasi (penyisipan).²⁶

2) Penyusunan Sistematis data

Penyusunan sistematis data yaitu menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

²⁵ Etta Mamang Sangaji dkk, *Op Cit.*, h. 48.

²⁶ M. Iqbal Hasan, *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h.89.

3) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara induktif, analisis data induktif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama, proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan- kenyataan ganda sebagai yang terdapat dalam data sehingga persamaan dan perbedaan di dalam data dapat menjadi acuan perbandingan masing- masing permasalahan. Kedua, analisis demikian lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan- keputusan tentang dapat- tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya ini dimaksudkan adalah apakah di dalam perbandingan tersebut memiliki masalah- masalah lain yang muncul bersamaan dengan adanya teori tersebut. Ketiga, analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan- hubungan, dan terakhir analisis demikian dapat memperhitungkan nilai- nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.²⁷

Di dalam proses induktif ini penulis mencari data- data yang berkenaan dengan Maqashid al- Syari'ah, selanjutnya penulis mencari data- data yang berkenaan dengan demokrasi, selanjutnya penulis membandingkan antara kedua data yang sudah di dapat serta di analisis secara mendalam oleh penulis. Hingganya diperoleh kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

4) Penyajian data

Menyajikan data penyajian data primer dapat dilakukan dalam bentuk menjelaskan dan memaparkan masalah yang akan di teliti dalam kajian ini masalah yang akan dijabarkan adalah apakah demokrasi di Indonesia sesuai dengan maqashid al- syari'ah . Sedangkan penyajian data sekunder dapat dilakukan dengan bentuk teks yang bersifat naratif di dalam kajian ini pula akan di jelaskan secara terperinci secara runut mulai dari penjelasan mengenai maqashid al- syari'ah sampai hubungannya dengan sistem demokrasi di Indonesia.

²⁷ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.5.

BAB II

MAQASHID AL- SYARI'AH DAN DEMOKRASI

A. Maqashid al- Syari'ah sebagai Landasan Politik dan Ketatanegaraan

1. Pengertian dan Sejarahnya

a. Pengertian Maqashid al- Syari'ah

Secara bahasa, maqâshid al- syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: al-maqâshid dan al-syari'ah. Maqâshid adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushûd* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁸ Ulama lain berpendapat maqashid berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dengan kata lain bermakna menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (*qashada ilaihi*).²⁹

Secara bahasa syari'ah bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.³⁰ Pendapat lain mengatakan syari'ah menunjukkan kepada tiga pengertian, yaitu sumber dimana air minum (menunjuk ke tempat), jalan yang lurus dan terang serta awal dari pada pelaksanaan suatu pekerjaan.³¹

Dari makna maqashid dan al- syariah secara bahasa, kita dapat mengambil pengertian bahwa maqashid al- syariah adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia (maksud secara tersirat) yang diletakkan Allah dan terkandung dalam setiap hukum

²⁸ Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al- Syatibi, (Syariah dan Hukum, Vol. VI No. 1, Juni 2014), h. 33. (Online). Tersedia di <http://ejournal.uin malang.ac.id /index.php/ syariah/article/view/3190/5031>, (diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

²⁹ Arif Wibowo, Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah, (Islamic Finance 04, 2012), h. 1. (Online). Tersedia di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files /pendidikan /Arif %20Wibowo.%20MEI/ISLAMIC%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy %20Syariah.pdf>, (diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21. 15 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁰ Moh. Toriquddin, *Op. Cit.*, h. 33

³¹ Arif Wibowo, *Loc. Cit.*

untuk kebermanfaatan bagi umat. Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *maqasid al syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran *syariat* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia *syari'ah*, yang ditetapkan oleh *al-syari'* dalam setiap ketentuan hukum. al- Syatibi menjelaskan bahwa tujuan ditetapkannya hukum Allah adalah untuk kemaslahatan manusia. Sedangkan Yusuf al-Qardhawi mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan yang di buat secara teks yang mana hukum-hukum partikular tersebut untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, dan mubah.

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan *maqashid al-syari'ah* dengan makna tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqashid al-syari'ah* di kalangan ulama ushul fiqih disebut juga *asrar al-syari'ah*, yaitu rahasia-rahasia (maksud yang tersirat) yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *syara'*, berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³²

Al- Syatibi mendefinisikan *maqashid al- syari'ah* adalah kemaslahatan yang berasal dari tuhan, yang jika kemaslahatan itu tidak tercapai maka hal itu bukan dikatakan sebagai maksud atau tujuan dari tuhan. Karena, semua yang ia ciptakan pastilah memiliki nilai manfaat dan keuntungan untuk umatnya. Jika, kemaslahatan yang di capai hanya sebatas kemaslahatan dunia tanpa kemaslahatan akhirat maka hal ini bukanlah *maqashid al- syari'ah* yang di inginkan.³³

b. Sejarah Maqashid al- Syari'ah

Maqashid al-syari'ah dicetuskan pertama kali oleh al-Syatibi (wafat 790 H), yang ditulis dalam sebuah kitab berjudul al-Muwafaqat³⁴, sejak kitab itu terbit

³² *Ibid.*, h. 2

³³ Muhammad Mawardi Jalaludin, *Pemikiran Abu Ishaq al- syatibi dalam kitab al-muwafaqat*, (Ad- daulah Vol. 4, No. 2, Desember 2015), h, 296. (Online). Tersedia di https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=maqashid&btnG=, (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 38 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁴ Muwafaqat adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Imam al- syatibi di dalam kitab tersebut terdapat berbagai pendapat yang berdasarkan ijtihad, kitab tersebut biasanya dipergunakan untuk orang- orang yang baru saja mempelajari hukum islam.

maqashid al-syari'ah menjadi sebuah konsep baku dalam Ilmu Ushul Fikih yang berorientasi kepada tujuan hukum di dalam islam.³⁵

Ulama ushul mengatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sudah ada petunjuk (perintah) yang mengacu kepada peranan penting dari pada *maqashid al-syari'ah* dalam pembentukan hukum Islam. Seperti contoh didalam sebuah hadits , Rasulullah melarang orang-orang Islam di Madinah menyimpan daging qurban, kecuali sekedar bekal untuk selama tiga hari. Beberapa tahun kemudian, ada beberapa orang sahabat yang menyalahi ketentuan Rasulullah itu dengan menyimpan daging qurban lebih dari sekedar pembekalan selama tiga hari. Peristiwa tersebut disampaikan kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah membenarkan serta menjelaskan bahwa : “dahulu aku melarang kalian menyimpannya (daging qurban) karena kepentingan *al-daffah* (para pendatang dari perkampungan Badui yang datang ke Madinah yang membutuhkan daging qurban). Sekarang simpanlah daging-daging qurban itu (karena tidak ada lagi para tamu yang membutuhkannya).

Kemudian dalam hadits lain Rasulullah melarang ziarah kubur karena dikhawatirkan akan menjadi pemujaan yang berlebih-lebihan terhadap arwah orang yang di kuburan (mengkramatkan)³⁶ sehingga menimbulkan kesyirikan. Tapi kemudian, Rasulullah membenarkan atau membolehkan umat Islam untuk menziarahi kuburan. Dari peristiwa itu ada petunjuk dan arti penting *maqashid al-syari'ah* dalam penetapan hukum. Seperti kasus daging qurban di atas, larangan menyimpan daging qurban adalah memberi kelapangan kepada Badui yang datang dari perkampungan. Ini adalah *maqashid al-syari'ah* dari larangan menyimpan daging qurban.

Tetapi setelah orang badui tersebut tidak lagi membutuhkan, maka larangan menyimpan daging pun tidak diberlakukan lagi. Begitu juga dengan hadits yang kedua tentang perempuan yang menziarahi kuburan dikarenakan takut jatuh

³⁵ A. Intan Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid Asy- Syari'ah, (Al- Qadau Vol. I No. 2, 2014), h. 20. (Online). Tersedia di <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637>, (diakses 02 Juni 2019 pukul 21. 00 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

³⁶ Kebiasaan ini sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia para peziarah mengkramatkan beberapa kuburan orang- orang shaleh sampai memuja dengan maksud untuk meminta sesuatu di kuburan seperti contoh meminta kesuksesan , jodoh, dan dimudahkan dalam hal pekerjaan.

kedalam kesyirikan, akan tetapi ketika beberapa tahun kemudian di mana keimanan mereka sudah bagus (sudah dapat membedakan mana yang haq dan bathil), maka Rasulullah tidak melarangnya lagi. Ini membuktikan bahwa *maqashid al-syari'ah* telah ada pada zaman Rasulullah akan tetapi hal tersebut belumlah diistilahkan dalam kategori ilmu-ilmu (ushul fiqh). Begitu juga sebagai contoh kasus Utsman ibn Affan yang menikahi Nailah, anak Farfisah Kalbiyah (bani Kalb) yang beragama Nashrani, lalu perempuan tersebut masuk Islam sesudah menikah dengannya. Maka di sini jelas tujuan al-Syari'ah dibolehkan untuk menikahi wanita Nashrani adalah untuk ekspansi dakwah Islam, sebagaimana Utsman dapat mengislamkan istrinya Nailah setelah menikah dengannya, yang mana istrinya memeluk agama nashrani.

Peranan *maqashid al-syari'ah* telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam berijtihad (bermusyawarah untuk menentukan suatu hukum islam), karena perubahan kondisi zaman, tempat dan keadaan yang jauh berbeda dari zaman Rasulullah. Karena itu, dalam berbagai praktek ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, terutama di bidang muamalah selama diketahui tujuan hukumnya, maka dengan itu dapat dilakukan pengembangan hukum melalui metode qiyas dalam rangka menjawab persoalan baru yang belum ada pada masa Rasulullah.³⁷

Teori *al-syar'iah* baru pertama dikenal pada abad keempat Hijriyah. Menurut Ahmad Raisuni, istilah tersebut pertama kali digulakan oleh al- Turmuzi al- Hakim dalam buku yang ditulisnya, yaitu: *al-Shalah waqasiduhu*, *al-Haj Wa Asraruh*, *al-'illah*, *'Illah al-Syar'iah* dan juga bukunya al- Faruq yang kemudian diadopsi oleh Imam Qarafi menjadi buku karangannya.

Setelah al- hakim kemudian muncul Abu Manzur al- Maturudi dengan karyanya *Ma'had al-Syara'* kemudian disusul oleh Abu Bakar al- Qaffal al-Syasyi dengan bukunya *Ushul Fiqh* dan *Mahasin al-Syariah*, setelah al-Qaffal kemudian muncul Abu Bakar al-Abhari dan al-Baqilany dengan masing-masing karyanya yaitu : *Mas'alah al- jawab wa al- dalil Wa al- 'Illah dan al-Taqrif Wa al- Irsyad fi tartib turuq al-Ijtihad*.

³⁷ *Ibid.*, h. 18- 19.

Sepeninggalan al- Baqilany muncullah al- Juwainy, dalam beberapa karangannya beliau adalah orang yang pertama mengelompokkan maqasid al-syar'iah menjadi tiga kategori besar, yaitu: *daruriyah, hajiyah dan tahsiniyah*. Kemudian pemikiran beliau dikembangkan oleh Abu Hamid al-Ghazali, al-Razy, al Amidy, Ibnu Hajib, al-Baidawi, al- Asnawi, Ibnu Subuki, Ibnu Abdissalam, al-Tufi, Ibnu Taimiyyah Dan Ibnu Qayyim.

Adapun Menurut Hamidi al-Ubaidy, orang yang pertama membahas maqashid al-syar'iah adalah Ibrahi al-Nakh'i seorang tabi'in sekaligus guru Abu Hanifah. Setelah itu kemudian muncul al- Ghazali, izzuddin Abdissalam, Najamuddin al-Tufi dan terakhir Imam al-Syatibi.³⁸

2. Maqashid al- Syari'ah beserta dalil- dalilnya (al- Qur'an dan Hadist)

a. Perlindungan terhadap Agama

Atas semua peristiwa yang telah terjadi ini, al- Qur'an akan tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa³⁹ sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir.

Bagi orang non muslim, Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi penghormatan dan toleransi antar ummat beragama hal ini tercermin dari bagaimana ummat islam menjaga tempat beribadah mereka, membolehkan mereka untuk menyiarkan da'wah mereka untuk kaumnya , bahkan al- Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadah, dan hal ini tersirat dalam firman- Nya

³⁸ Asafir jaya, Basri, *Konsep Maqasid Asy-Syar'iyah menurut Akitab.al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 123.

⁴¹ Sesuai dari penjelasan diatas bagi siapa saja yang telah ditutup baik hati, penglihatan dan pendengaran oleh Allah swt., maka akan Allah swt., sesatkan semua jalan kehidupannya hal ini telah Allah swt., jelaskan di dalam QS. Ash- Shaff: 5.

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ وَيَعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “ Telah di izinkan (berperang) bagi orang- orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar- benar Maha Kuasa menolog mereka itu, (yaitu) orang- orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, “Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain tentulah telah dirobohkan biara- biara Nasranai, gereja- gereja, rumah- rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS. al- Hajj: 39- 40)

Berbuat baik dan berlaku adil merupakan dua hal yang harus dilaksanakan seorang muslim kepada sesama manusia termasuk dengan orang- orang yang tidak memiliki kesepahaman agama dengan mereka termasuk diantaranya para ahli kitab. Orang- orang non muslim memiliki kedudukan khusus dalam mu’amalah dan undang- undang atau peraturan. Adapun yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang yang melaksanakan agama mereka berdasarkan kitab samawi.

Islam memberikan persetujuan kepada kaum muslimin yang memberi makan ahli kitab, juga memakan dari hasil sembelihan mereka atas binatang yang tidak diharamkan bagi kaum muslimin, sebagaimana islam juga meperbolehkan pernikahan dan menikahi para wanita mereka yang terjaga, dengan dikuatkan oleh hukum yang ditetapkan al- Qur’an, yakni terbinanya kehidupan keluarga (perkawinan) yang penuh mawaddah dan rahmah; al- Qur’an memperbolehkan seorang laki- laki muslim untuk memiliki pengatur rumah tangga, pasangan hidup, atau ibu dari anak- anaknya yang berasal dari kalangan non muslim (ahli kitab). Allah berfirman,

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا بِتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ

Artinya : “ Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang- orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang- orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang- orang yang zalim.” (QS. al- Mumtahanah: 8-9)

b. Perlindungan terhadap Nyawa

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ لَدِّي خَلَقْنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ يُجِبِّنِ

Artinya : “ Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan Semesta Alam, (yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku, dan Tuhanku, Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku, dan Yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku (kembali), dan Yang amat ku inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.” (QS. al- Syu'ara: 77- 82)

Imam Syaikh Muhammad Mutawalli al- Sya'rawi mengatakan, Dalam ayat ini kita dapat menelaah bagaimana Allah menguatkan beberapa hal yang diyakini beberapa orang, bahwa dalam hal- hal tersebut ada campur tangan selain Allah. Adapun hal- hal yang tidak mungkin di dalam takdir manusia, bahwa di dalamnya terdapat campur tangannya, maka Allah menurunkan ayat- Nya dalam keadaan Mursalah.

Tindakan penganiayaan terhadap jiwa yang dilakukan dengan cara membunuhnya merupakan perbuatan keji dan keluar dari ajaran serta hukum

islam, menodai sesuatu yang dimuliakan dan dilindungi oleh Allah, tidak menerima dan cenderung menyalahi fitrah yang diciptakan Allah untuk jiwa tersebut, serta mencabut ikatan ketaatan (berpegang teguh pada tali agama Allah) dan penghambaan kepada Tuhan semesta alam, dan hal ini juga merupakan tindakan yang menyalahi aturan terhadap hak- hak seluruh masyarakat. Allah berfirman,

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Artinya : “ Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan- akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah- olah dia telah memelihara manusia semuanya.” (QS. al- Ma'idah: 32)

C. Perlindungan terhadap Akal

Islam seringkali mengingatkan tentang nilai dan bagaimana perwujudan daripada kemuliaan orang- orang yang menggunakan akalnyanya, menyanjung orang- orang yang memiliki kemampuan dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan indah, makhluk yang mulia, dan keserasiannya yang mana akan merujuk kepada pemikirannya tentang bagaimana Allah swt., memberikan segala nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman,

لَأُولَى الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
قِيَمًا وَفُجُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda- tanda bagi orang- orag yang berakal, (yaitu) orang- orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan

mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “ Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia- sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.” (QS. ali – Imran: 190- 191)

Sesuai dengan ayat di atas yakni qur'an surah ali- Imran ayat 190- 191 Alla mengisyaratkan kepada hamba- hambanya yang mau berfikir yang mana hasil pemikirannya ia gunakan untuk mengingat Allah dan mentadaburi alam semesta yang telah Allah jadikan ladang pahala dan bukan sebagai ladang kemaksiatan.

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Dan perumpaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang memahaminya kecuali orang- orang yang berilmu.” (QS. al- Ankabut: 43)

Al- Qur'an mencela orang- orang yang menyia- nyiakan akal mereka, dengan tidak menggunakan akal mereka untuk berfikir, memperhatikan, dan merenung; mereka yang tidak memanfaatkan kemampuan (akal) yang dikaruniakan Allah (yang melalui akal tersebut Allah memuliakan mereka)⁴⁰ untuk menyikapi kekuasaan Sang Pencipta, keagungan-Nya, dan kekuatan “Sang Pemberi Rezeki” mereka tidak menuntunnya menuju dermaga iman dan kesempurnaan Islam, serta ketundukan kepada hal yang haq dan yang yaqin, bahkan mereka tidak menundukkan akal mereka ke dalam bidang kehidupan yang karenanya mereka diciptakan, juga untuk melakukan eksploitasi kekayaan, sumber daya alam, dan kekuatan Sang Pemberi rezeki. Mereka tidak menuntunnya menuju dermaga iman dan kesempurnaan Islam, serta ketundukkan kepada hal yang haq dan yang yaqin, bahkan mereka tidak menundukkan akal mereka ke dalam bidang kehidupan yang karenanya mereka diciptakan, juga untuk melakukan eksploitasi kekayaan, sumber daya alam, dan kekuatan yang sudah tersedia untuk kebahagiaan individu serta kemajuan umat dan bangsa- bangsa. Allah berfirman,

⁴² Termaktub di dalam QS. Al Baqarah: 31 di mana Allah mengajarkan nama- nama kepada nabi Adam yang kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat bagaimana Adam dapat menyebutkan nama benda- benda yang Allah ajarkan. Dimana Allah tidak mengajarkan hal tersebut kepada para malaikat. Dimana ini merupakan suatu bukti Allah memuliakan manusia lewat akal yang ia gunakan.

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ
 ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Artinya : “ Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat- ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak di pergunakannya untuk melihat (tanda- tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang- orang yang lalai.” (QS. al-A’raf: 179)

d. Perlindungan terhadap Kehormatan

Pada awal masa Islam, sanksi bagi wanita yang berzina adalah dengan dikurung di rumah keluarganya sampai mati. Sedangkan sanksi bagi laki- laki berzina adalah dengan disiksa (ta’zir atau dipukul). Apabila setelah itu dia bertaubat dan memperbaiki amalnya, maka dia dilepaskan dari hukuman tersebut.

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَائِكُمْ فَاستَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي
 الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَاهُمَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا فَإِنْ تَابَا
 وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita- wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. al- Nisa : 15-16)

Setelah itu turun ayat dalam Surah al- Nur yang menghapus hukum dari dua ayat diatas. Ayat inilah yang menjadi hukum sanksi bagi orang yang berzina, yakni dengan pencambukan dan pengasingan *ghairu muhsan* (bagi pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum rajam bagi yang muhsan,

yakni laki- laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui qubul (dubur) seorang wanita sedang dia memiliki pernikahan yang sah, meskipun perbuatan ini dilakukan hanya sekali.

زَانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina, maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat , dan hendaklah (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman.” (QS. al-Nur: 2)

Islam sangat mengharamkan perbuatan menggunjing, mengadu domba, memata- matai, mengumpat, mencaci, memanggil dengan julukan tidak baik, dan perbuatan- perbuatan sejenis yang berkenaan dengan pelecehan kehormatan atau kemuliaan manusia. Islam pun menghinakan orang yang melakukan dosa- dosa ini, juga mengancam mereka termasuk ke dalam golongan orang- orang yang fasik. Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ Hai orang- orang yang beriman, janganlah sekumpula orang laki- laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi lebih baik. Dan janganlah mencari- cari keburukan orang dan

janganlah mengunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al- Hujurat: 11- 13)

e. Perlindungan terhadap Harta Benda

Didalam Islam harta dan benda termasuk kedalam kepemilikan seorang mukmin yang apabila mukmin tersebut hartanya di rampas maka berhak bagi dia untuk merebut harta tersebut, bahkan dalam salah satu riwayat ketika kita membela diri ketika harta kita di rampas maka kita mati dalam keadaan berjihad. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memakan atau merampas harta orang lain tersebut ? Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. al- Baqarah: 188)*

Allah melarang kita merampas harta kepunyaan orang lain bukan tanpa sebab mengapa Allah melarang kita untuk mengambil harta orang lain, hal ini termasuk kedalam perbuatan yang dzolim dan dosa karena dapat merugikan orang lain. Termasuk di dalamnya ialah merampok, mencuri dan Riba Allah sangat menganjurkan untuk menjauhinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ .

Artinya : “ Hai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum di pungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pemngabilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 278- 280)

3. Kaidah- kaidah Maqashid al- Syari’ah di dalam Fiqh Siyasa

Undang- undang atau syariat Islam dibuat bukan dengan tanpa pertimbangan yang matang atupun dengan main- main dan senda guru, tidak pula menciptakannya dengan sembarangan (sungguh Mahasuci Allah dari semua hal seperti ini). Namun, Allah mensyari’atkan perundang- undangan Islam⁴¹ untuk tujuan- tujuan besar yang mana hal tersebut berkonotasi kepada kemaslahatan dunia dan akhirat yang kembali kepada para hamba, sehingga kesejahteraan akan merata, dan rasa aman sentosa akan mendominasi.

Kemashlahatan dunia di kategorikan menjadi dua, baik yang pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara menolak kemudharatan.

- a. *Kemashlahatan dharuriyyah* (inti/ pokok); kemashlahatan *maqashid al-syar’iyyah* yang berada dalam urutan paling atas.
- b. *Kemashlahatan ghairu dharuriyyah* (bukan kemashlahatan pokok); namun kemashlahatan ini tergolong penting dan tidak bisa dipisahkan.

⁴¹ Banyak sekali segolongan dari ummat islam mengartika perundang- undangan di dalam islam harus diterapkan di Indonesia dengan cara merubah tatanan sistem yang ada, karena danya opini dan adanya tindakan- tindakan yang mereka lakukan hingganya muncul pergesekan- pergesekan yang terjadi akibat tidak secara mendalamnya mereka memahami kalimat ini. Padahal Di Indonesia sendiri di dalam menetapkan undang- undang yang ada harus memiliki musyawarah dengan mempertimbangkan banyak aspek yang tentunya bertujuan untuk kemashlahatan Ummat.

Kemaslahatan inti atau pokok yang telah disepakati dalam semua syari'at tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al- kulliyyat al- khams* (lima hal inti atau pokok) yang mereka anggap sebagai dasar- dasar dan tujuan umum syari'at yang harus di jaga. Sebagaimana dikatakan Imam al- Ghazali dan Imam al- Syatibi

- (1) Menjaga Agama (*Hifdz al- Din*); *Illat* (alasan) diwajibkannya berperang dan berjihad, jika ditujukan untuk para musuh atau tujuan senada.⁴²

Islam sangat menjaga hak dan kebebasan, kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing- masing serta beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk menuju agama dan mazhab lain, juga tidak boleh di intimidasi untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah swt.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat ” (QS. al- Baqarah: 256)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang- orang yang beriman semuanya?” (QS. Yunus: 99)

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama islam.”

Asbabun Nuzul ayat ini (sebagaimana dikatakan para ulama ahli tafsir) menjelaskan kepada kita salah satu sisi dimana mengagumkannya agama ini

⁴² Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2018), h. xiv- xv.

(islam). Mereka meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan, ada seseorang perempuan yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila dia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal seperti ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada masa jahiliah), lalu ketika muncul Bani Nadhir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar. Maka bapak- bapak mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak- anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan surah QS. al- Baqarah: 256, Allah berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. al- Baqarah: 256)

Meski ada paksaan dari pihak orang tua yang ingin menjaga anak- anak mereka agar tidak mengikuti musuh mereka, yang berbeda agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak- anak atau keturunan mereka, agama Yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda mazhab mendominasi dunia saat itu, terlebih lagi yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam mazhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya antara masuk ke dalam agama Kristen atau dibunuh), akan tetapi ketika mazhab al- Malkani memiliki peranan yang kuat di dalam pemerintahan Roma, penyembelihan dilakukan atas orang- orang Nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.

Dengan semua peristiwa yang terjadi ini, al- Qur'an tetap menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah akan

dibukakan dan diterangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan hujjah. Sedangkan yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatan ditutup oleh Allah maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir. Karena mereka masuk kedalam agama islam atas dasar paksaan bukan dikarenakan ikhlas hati, maka setiap amal dan pahala yang mereka kerjakan sia- sia. Di dalam sebuah firmanNya Allah mengatakan akan melindungi orang- orang nonmuslim meskipun ia berbeda agama. Bahkan hingga akan di perangi apabila ia di usir dan tindas dari kampung halamannya dan mengusik agama mereka.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ هَادَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya : “ *Telah di izinkan (berperang) bagi orang- orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar- benar Maha kuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang- orang yang telah di usir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, “ Tuhan kami hanyalah Allah.” Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara- biara Nasrani, gereja- gereja, rumah- rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah” (QS. al- Hajj: 39-40)*

Janji Nabi kepada penduduk Najran Menyatakan bahwa mereka berada dalam perlindungan Allah dan jaminan Rasul- Nya untuk urusan harta, agama, dan baiat mereka.

Dalam surat perjanjian Umar bin Khatab kepada penduduk Eliya (al- Quds) tercantum teks yang menyatakan kebebasan beragama mereka, juga kebebasan tempat peribadatan dan syiar mereka.

“Inilah keamanan yang diberikan oleh hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin kepada penduduk Eliya; dia memberikan jaminan keamanan untuk jiwa, harta gereja, biarawan dan agama mereka. Gereja mereka tidak didiami,

dirobohkan, dan di kurangi atau dipersempit ruang gerakanya. Demikian juga untuk biara atau apa pun harta mereka. Mereka juga tidak dipaksa dalam masalah agama, tidak ada seorang pun di antara mereka yang mendapat bahaya, dan tidak ada satu pun orang Yahudi yang boleh tinggal bersama mereka.”

Perhatikanlah bagaimana cara Rasulullah kepada ahlul kitab (Yahudi atau Nasrani). Beliau mengunjungi, menghormati, berlaku baik, dan menjenguk orang sakit mereka. Beliau mengambil dan memberi kepada mereka.

Dalam al- Sirah, Ibnu Ishaq mengatakan, “Saat para utusan penduduk Najran (yang beragama Nasrani) menghadap kepada Rasulullah di Madinah, mereka masuk masjid beliau setelah waktu ashar yang merupakan waktu shalat mereka. Lantas mereka berdiri dan melaksanakan shalat di masjid beliau. Lalu orang- orang (Para Sahabat Nabi) ingin mencegah mereka, namun Rasulullah saw. Berkata, ‘Biarkan mereka,’ kemudian para utusan itu menghadap ke arah timur dan melaksanakan shalat ala mereka.

al- Mujaahid Ibnul Qayyim menyambung kisah ini dalam al- Huda al- Nabawiy, dia menuturkan segi fiqh di dalamnya (Diperbolehkannya ahlul kitab memasuki masjid kaum muslimin), juga tentang adanya pengukuhan ahlul kitab akan shalat mereka di masjid kaum muslimin), juga tentang adanya pengukuhan ahlul kitab akan shalat mereka di masjid dan di hadapan kaum muslimin, jika memang ada sebab baru yang menuntut mereka untuk melaksanakan hal tersebut.

Mengenai harta benda, Abu Ubaid menceritakan dari Said bin al- Musayyab, Rasulullah bersedekah kepada ahlul bait yang beragama Yahudi, maka sedekah berlaku untuk mereka.”

Imam al- Bukhari juga mengatakan, “Nabi wafat, dan baju perangnya dalam keadaan digadaikan kepada seseorang Yahudi untuk nafkah keluarganya. Padahal sangat mungkin sekali Rasulullah meminjam dari para sahabat, dan para sahabat di sini bukan berlaku kikir kepada beliau, namun hal ini dilakukan beliau semata agar ummatnya dapat mengetahui.”

Nabi Mendapat hadiah dari orang- orang non muslim, juga membantu mereka dalam masalah perdamaian dan perang, beliau menjamin loyalitas mereka terhadap beliau, tanpa ada rasa khawatir akan perlakuan buruk atau tipu daya mereka.

Jabir bin Abdullah menceritakan, “ Pada suatu hari, ada ususngan jenazah melewati kami, lalu Nabi saw. Bangkit. Kami pun berkata kepada beliau, ‘ Wahai Rasulullah, jenazah itu adalah seorang Yahudi.’ Lantas beliau menjawab, ‘ Bukankah ia adalah jiwa (Manusia) ? Bila kalian melihat (iringan) jenazah, maka berdirilah!”

Pada suatu hari Umar bin Khatab melihat seorang kakek tua yang buta meminta- minta di sebuah pintu. Umar pun bertanya, dan dari situ dia tahu bahwa kakek tua itu adalah seorang Yahudi, Lantas dia bertanya,

“Apa yang membuatmu seperti ini ?” si Kakek menjawab, “Jizyah, kebutuhan, dan usia.” Mendengar jawaban itu, Umar menuntun kakek tersebut dan pergi ke rumahnya, lalu dia memberi uang ynag mencukupi kebutuhannya saat itu. Setelah itu beliau mengirim surat kepada bendahara baitul mal, “Lihatlah! Demi Allah, tidak adil bila kita memakan dari (jerih payah) masa mudanya, lalu kita menelantarkannya saat dia tua.”

“Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir dan orang- orang miskin.” Dan kakek ini termasuk salah satu orang miskin dari golongan ahli kitab.

Suatu hari Umar bin Khatab melewati sebuah kaum yang dibebani Jizyah, lalu dia pun berkata,”Mereka mengatakan jika mereka tidak mendapat (harta untuk membayar jizyah) maka biarkanlah mereka, jangan kalian bebani mereka sesuatu yang tidak mereka sanggupi.” Setelah itu beliau memerintahkan dan membiarkan mereka.

Umar dipukul seorang lelaki dari golongan kafir dzimni (Abu Lu’luah al-Majusi), namun hal ini tidak membuat dirinya menjadi demdam melainkan malah berwasiat kepada khalifah setelah beliau agar tetap berbuat baik kepada orang- orang kafir dzimni, dan saat menghadapi sakaratul maut, dia berkata, “ Aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar berbuat baik kepada ahli dzimni. Hendaklah ia menepati janji mereka, dari belakang mereka. Dan hendaklah ia tidak membebani mereka di atas kemampuan.”

Demikian juga dengan Ibnu Umar, dia berwasiat kepada pelayannya untuk memberikan binatang kurban kepada tetangga Yahudinya. Dia mengulang-ulang wasiat ini, hingga si pelayan kagum serta terheran-heran hingga membuatnya menanyakan rahasia di balik perhatian Ibnu Umar terhadap tetangga Yahudi tersebut. Ibnu Umar pun menjawab bahwasanya Nabi yang telah memberikan tuntunan dan pengajaran harus bagaimana dengan orang-orang kafir (non muslim).

Maka jelaslah toleransi Islam dalam hubungannya yang baik, lembutnya muamalah, mengenai hubungan dengan tetangga yang juga perhatian dan dalam masalah perasan kemanusiaan yang besar juga sangat toleran, yakni dengan kebaikan, rahmat, dan kemurahan hati. Hal-hal diatas adalah yang sangat berkenaan dengan kehidupan sehari-hari kita, yang kalau kita telaah banyak hal yang dapat kita petik pembelajarannya.

Islam telah menetapkan bahwa orang-orang kafir dzimmi di negara Islam atau di negara yang patuh kepada aturan kaum muslim memiliki hak dan kewajiban seperti kaum muslim di negara tersebut. Pemerintah wajib menjaga seluruh rakyat dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang juga diterapkan kepada kaum muslim, maka batasan-batasan islami tidak boleh dijatuhkan terhadap masalah yang tidak diharamkan untuk mereka.⁴³

- 1) Menjaga jiwa (Hifdz al- Nafs); Illat (alasan) diwajibkannya hukum qishash, diantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Pembahasan ini terdapat dalam kitab-kitab shahih.

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi menuju ke padang Arafah, di sana beliau berkhotbah, yang diantaranya adalah :

Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa, wahai para hamba Allah. Dan aku mendorong kalian untuk taat kepada-Nya. Aku buka dengan sesuatu yang baik. Amma ba'du, Wahai manusia, dengarkanlah, aku jelaskan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku tidak mengetahui, mungkin setelah tahunku ini, aku

⁴³ Ibid., h.1- 6.

tidak akan menyampaikan apa pun kepada kalian, ditempatku berdiri sekarang ini.

Wahai manusia... sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram (mulia) bagi kalian bertemu Tuhan kalian; Ia mulai seperti mulianya hari kalian ini, di bulan ini, dan di negeri kalian ini. Ingatlah, adakah kalian telah menyampaikannya? Wahai Tuhan kami, maka saksikanlah.

Jelaslah sudah dari petikan khutbah diatas, bahwa Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak- hak asasi manusia (HAM) secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak- hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas dasar yang menguatkan dari pada hak- hak asasi manusia (HAM) ini.

Hak yang paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang di sucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya. Karena manusia adalah ciptaan Allah,

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “(Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. al- Naml: 88)

Sangat jelas hikmah Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan- Nya untuk manusia, lalu Dia menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhnya kedalam bentuk yang sempurna dan seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya dalam sebaik- baik bentuk.

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Artinya : “ Maka Mahasuci Allah, Pencipta Yang Paling Baik” (Q.S. al- Mu'minin: 14)

Kemudian Allah mengaruniakan nikmat- nikmat-Nya, lalu memuliakan dan memilih manusia,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “ *Dan sesungguhnya Kami muliakan anak- anak Adam*” (Q.S. al-Isra: 70) ⁴⁴

- 2) Menjaga akal (Hifdz al-‘Aql); Illat (alasan) diharamkannya semua benda yang memabukkan atau narkoba dan sejenisnya.

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sumber hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan bagi manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah Allah swt., disampaikan dan dijalankan oleh manusia sesuai dengan perintah dan larangannya, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lain yang Ia ciptakan. Allah swt., berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : “ *Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak- anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik- baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan* (Q.S. al- Isra: 70)

Seandainya manusia tidak diberikan akal, manusia tidak berhak mendapatkan kemuliaan yang bisa mengangkatnya menuju derajat para malaikat. Dengan akalnya, manusia dapat naik derajatnya dari alam manusia menjadi alam malaikat. Karena itulah, akal menjadi sumber penting di dalam diri manusia. Dengannya, manusia akan mendapatkan pahala dan berhak mendapat siksa. Balasan di dunia dan di akhirat berdasarkan akal dan kekuatan

⁴⁴Ibid., h.21- 22.

pengetahuan. Dengan akalunya manusia dapat membuka cakrawala kehidupan, dia bisa menapaki penjuru bumi dan menyelam di bawah kedalamannya, serta menunggang udara. Dia berjalan dengan segala tantangan di dalam hidupnya; memperbaiki stratanya; berjalan di belakang segala sesuatu yang baru; menjalin kehidupan materi dan spritualitasnya; menemukan dan memberi inovasi di berbagai aspek kehidupannya seperti medan politik, militer, dan sosial; mengalahkan semua hambatan yang merintanginya, dan menghalangi dirinya untuk mencapai targetnya.

Benarlah yang dikatakan Shalih bin Abdul Quddus, Kala akal seseorang sempurna, sempurnalah banggunya.

Umar bin Khatab berkata,

“Asal (dasar/ fondasi) seseorang adalah amalnya, dan kebaikan agamanya adalah kehormatan akalunya.”

Manusia dan akalunya dapat menuntunnya mendapatkan petunjuk untuk mendekat kepada Tuhan dan Pencipta-Nya. Akalnya pula yang membuat dia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, mensucikan-Nya dari segala kekurangan, mengikuti para rasul dan Nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan membawa manusia kerah jalan yang di perintahkan Allah kepada mereka, membawa kabar gembira untuk mereka bagi siapa saja yang mengikuti aturan dari tuhanNya, dan membawa peringatan dan ancaman bagi siapa saja yang keluar dari jalan dan petunjuk yang sudah di berikan-Nya. Maka manusia seharusnya memanfaatkan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan berguna untuk dirinya, serta yang baik dan buruk.⁴⁵

Setiap kali manusia menggunakan akalunya, mengunakan setiap indra yang dia miliki untuk mengkaji seluruh pengetahuan, maka dia akan memperoleh

⁴⁵ Di dalam surah al- Rahman Allah telah mengisyaratkan sebuah ayat yakni ayat ke 19 yang mana Allah berfirman, “ *manusia dan jin tidak dapat melintasi langit melainkan dengan kekuatan*”. Ayat ini menurut sebagian ulama menafsirkan kata “kekuatan” disini ialah ilmu. Dengan ilmu Allah sudah menjanjikan kita dapat melintasi penjuru langit dalam arti mengenal alam semesta dengan ilmu pengetahuan dan akal. Akal yang mampu menembus penjuru langit dengan akal manusia dapat mendekatkan diri kepada tuhanNya atau malah membuat ia semakin menjauh dari tuhanNya.

rasa aman karena dengan semua indra dan akal nya dia dapat mentadaburi kekuasaan dan keagungan tuhan nya , merasakan kedamaian dan ketenangan, dan masyarakat tempat dia hidup pun akan di penuh oleh suasana yang penuh dengan rasa sayang, cinta, dan ketenangan. Manusia pun akan merasakan aman atas harta, jiwa, kehormatan mereka

Akal di ibaratkan seperti ikatan dengannya dapat mengikat dan mencegah pemiliknya untuk melakukan hal- hal yang dilarang dan mengerjakan kemungkaran. Mengapa di ibaratkan seperti ikatan? karena akal pun jika tidak di jaga dapat menyerang balik pemiliknya yang seharusnya ia dapat mengontrol hawa nafsu justru malah tidak membiarkannya, sebagaimana ikatan akan mencegah unta agar tidak melarikan diri saat berlari tetapi lain halnya apabila ikatan tali untuk unta tersebut malah tidak kuat maka unta tersebut dapat melarikan diri. Karena itulah Amir bin Abdul Qais berkata:

Apabila Sang Maha Pengasih menyempurnakan akal seseorang maka sempurnalah akal dan kebutuhannya.

Oleh karenanya islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk yang dapat merusak yang ditujukan kepada akal, dari segala sesuatu yang menyebabkan lemah dan berkurangnya akal tersebut dengan tujuan untuk menghormati dan memuliakan akal yang telah diberikan oleh sang pencipta, serta untuk mewujudkan semua manfaat yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta benda.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang bisa melemahkan dan merusakkannya, atau menjadikan pemiliknya menjadi jahat dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi perantara pengrusakan di dalamnya.

Melawan dosa dan mencegah kejahatan, maka di antara hak syara' atas akal adalah untuk memberikan sanksi atas pelanggaran. Karenanya, syari'at islam memberikan sanksi kepada peminum khamr dan pengguna obat- obatan terlarang, dari berbagai jenis yang tersedia.

Pasar- pasar minuman keras dan obat- obatan terlarang beredar dengan sangat cepat, pengedar racun dan obat- obatan menyebar, perdagangan pil- pil terlarang semakin banyak ditemukan, khususnya di kalangan para pemuda dan pelajar. Dengan pesat pula korban berjatuhan, racun tersebut yang merusak akal, menghancurkan jiwa, dan menghilangkan nyawa, lalu bahaya dan akibatnya menjalar dalam masyarakat. Itulah yang menyebabkan kemerosotan moral dan nilai- nilai agama pada masing- masing masyarakat.

Tidakkah manusia malu yang seharusnya akal dan fikirannya ia dedikasikan untuk kemajuan dan peradaban ummat justru malah manusia tidak mempergunakannya untuk membangun ummat, setelah Allah memuliakan dan mengunggulkannya ? Dia menghancurkan kehidupannya sendiri, Menyia- nyiakan akalnya, padahal akal bagian yang paling mulia dari diri seorang manusia.

Keadaan mabuk menyebabkan tumpulnya akal pikiran, meredupkan kecemerlangan akal, membunuh keinginan, memadamkan cita- cita, mematikan karakter, menghapus akhlak mulia. Keadaan tersebut juga dapat menyebabkan kehinaan, kemerosotan, hancurnya kekuatan, keroposnya dan lemahnya anggota badan.

Seringkali Islam mengajarkan tentang nilai dan eksistensinya dalam penggunaan akal, memuji orang- orang yang menggunakan akal dan kemampuan mereka dalam memperhatikan alam dengan segala ciptaan yang indah dan segala keserasiannya. Allah berfirman,

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Artinya : “ *Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda- tanda bagi orang yang berakal, (yaitu) orang- orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata),*

“Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”
(QS. ali- Imran: 190- 191)

Orang yang mentadaburi dengan mata hati dan imannya, serta memikirkan dunia saat ini, serta peristiwa dan perubahan yang terjadi, maka dia akan melihat mayoritas manusia yang maju dan memiliki peradaban adalah mereka yang membuka akal dan mempergunakannya, kemudian mengekspresikan semua yang akalnya inginkan, membuka tutup dan pengahalangnya, membereskan semua halangan dan rintangan, mematahkan dan melerai tali dan batas- batas kekuatan yang besar, yakni dengan memperhatikan, memikirkannya, membahasnya, dan dengan ilmu tentunya.

Jepang adalah negara yang memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam hal teknologi dan ekonomi hingga ia diberikan julukan sebagai macan asia, kalau kita menengok kebelakang bagaimana Jepang dapat bangkit dari keterpurukan setelah bom atom Hiroshima. Hal ini dapat kita jadikan contoh betapa dahsyatnya kekuatan akal pada diri manusia.

Banyak sekali negara- negara maju dan berkembang berada dalam ketatnya sebuah kompetisi dalam bidang memperluas aspek kemajuan ilmu (melalui akal), begitu juga dengan negara- negara Arab dan negara Islam yang berhasil berada di atas puncak kejayaan, pada saat (dahulu) mereka membawa ilmu pengetahuan dalam setiap segi kehidupannya.

Sangat disayangkan apabila manusia tidak mensyukuri nikmat yang besar ini, dengan nikmat ini Allah memuliakan dan menaikkan derajatnya menjadi khalifah di muka bumi, tidak disangnya mereka malah sewenang- wenang dengan kekuatan akal, pikiran, pengetahuan, dan kesadarannya. Dia merusaknya dengan racun dan obat- obatan terlarang, memadamkan iman dan keyakinan, kemudian menutupnya dengan polesan kotoran dan dosa.⁴⁶

⁴⁶ Keruntuhan Turki Utsmani pada 13 April 1924 disebabkan banyaknya rakyat dari negara tersebut sudah terperangkap di dalam harta dan takhta. Hingga mulai saat itu Islam mengalami kemunduran yang sangat pesat ummat muslim semenjak saat itu menjadi terbelakang dikarenakan akal tidaklah menjadi pondasi dari segala sumber kehidupan, ummat muslim lebih mengedepankan hawa nafsu. Awal titik kebangkitan bangsa barat disebut dengan masa renaissance dan ini adalah masa kegelapan bagi ummat muslim hingga sekarang pun ummat muslim masih

Suatu hal yang tidak terpuji jika seseorang turun dari puncak kemuliaan dan puncak peradaban menuju titik kebodohan, menuju jurang hawa nafsu, kefasikan, dan kemaksiatan ?

Hal yang gila dan membingungkan, apabila manusia mengasingkan dirinya dari barisan para malaikat dan makhluk- makhluk yang didekatkan kepada Allah, menuju kumpulan binatang dan setan ? Maha benar Allah dengan firman- Nya,

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

Artinya: “ Karena sesungguhnya bukankah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada.” (QS. al- Hajj : 46)⁴⁷

- 3) Menjaga keturunan (Hifdz al- Nasl); Illat (alasan) diharamkannya zina dan qadzaf (menuduh orang lain berzina).

Kehormatan manusia telah dijamin oleh islam bahkan islam sangat memiliki perhatian yang luar biasa terhadap kehormatan manusia. Islam memberikan hak- hak manusia kepada manusia itu sendiri. Masih ingatkah kita dengan awal masa sebelum islam datang di Mekkah bagaimana perempuan diperlakukan mereka diperlakukan hanya sebatas kasur, dapur dan tempat tidur bahkan derajatnya sangat rendah tidak berhak untuk menentang dan menyuarakan pendapat, bahkan jika seorang ayah mengetahui bahwa dirinya mendapat anak perempuan dia pasti akan merasa sangat malu dan merasa marah bahkan hingga tega membunuh anak perempuannya yang baru saja dilahirkan itu jelas sekali menurut mereka inilah suatu aib yang sangat memalukan. Tak hanya itu perzinahan, pelacuran, khamr dan segala bentuk pelecehan dan menyalahi kodrat manusia pun banyak terjadi pada masa itu. Namun, setelah islam datang semua hak- hak dan derajat kemanusiaan pun kembali di angkat

berada dalam bayang- bayang harta dan takhta. Itu sebabnya banyak ummat muslim saat ini yang sangat gampang sekali di provokasi dan diarahkan karena kurangnya ilmu pengetahuan.

⁴⁷Ibid., h. 92- 98.

tidak ada lagi penindasan, dilarangnya untuk berzina, di haramkannya khamr dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gerbarakan moral pada saat itu.

Lalu cobalah berkaca pada keadaan akhir zaman ini hal- hal yang pernah terjadi pada masa sebelum kedatangan islam, terulang kembali. Zina bertebaran dimana- mana, perempuan benar- benar telah dieksploitasi dan di lecehkan dengan berbagai macam media yang mempertontonkan perempuan sebagai objek, acara gosipp untuk memfitnah dan mengghibahi orang lain ada di setiap tayangan di sosial media. Lalu apakah kita masih mau kembali di zaman sebelum adanya islam ?? padahal Allah telah menyediakan dan memfasilitasi manusia dengan segala hak- haknya yang sudah dipenuhi ??

Oleh karenanya islam sangat melarang segala bentuk pelecehan baik berupa fisik, visual, kata- kata, penghinaan, perzinahan, qadzaf.⁴⁸ dan lain sebagainya yang menjatuhkan harkat dan martabat seorang manusia tersebut. Selain dapat menghancurkan kehormatan seseorang hal- hal yang penulis sebutkan diatas tadi tentunya mendapat ancaman dari Allah karena perbuatan tersebut termasuk kedalam perbuatan mendzalimi diri sendiri dan orang lain.

Pembahasan berikut ini penulis akan memaparkan beberapa materi, diantaranya masalah had dan sanksi yang diterapkan Islam untuk perbuatan zina dan perbuatan menghilangkan kehormatan, tindak kejahatan qadzaf dalam masalah had dan sanksi Islam, masalah pengharaman yang dilakukan Islam untuk setiap perbuatan atau ucapan yang merendahkan kehormatan manusia, dan hal- hal yang mengarah kepada zina dan kelainan seksual lainnya.

Para ulama mendefinisikan, bahwa ‘zina’ adalah hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa akad pernikahan sah.

⁴⁸ Qazaf menurut sebagian Ulama fiqh menyatakan bahwa yang dimaksud dengan qazf adalah, “ Menasabkan (memberikan mahram) seorang anak Adam kepada lelaki lain disebabkan zina,” atau “ memutuskan keturunan seorang muslim.” Jika seseorang mengatakan orang lain , “Engkau pezina.” “Engkau anak zina,” atau “Engkau bukan anak ibumu,” maka seluruh ungkapan ini disebut sebagai qazf. Qazf dapat berlaku dalam tindak pidana takzir, yaitu terhadap segala tuduhan yang di haramkan bagi setiap muslim, seperti menuduh orang lain minum minuman khamr. Di dalam pembahasan hukum pidana islam istilah qazf lebih ditekankan kepada menuduh orang lain berbuat zina, baik tuduhan itu melalui pernyataan yang jelas, maupun menyatakan anak seseorang bukan anak dari kedua orang tuanya.

Mazhab Hanafiyah mengatakan : Zina membuat, hukum mahram musaharah (menantu atau besan) menjadi ada, Mazhab Hanbali mengeluarkan pendapat: Menurut mazhab yang shahih, dengan zina hukum mahram menjadi ada, Orang yang berzina dengan seorang wanita, maka si ibu dan putri si wanita haram baginya. Ayah dan anak lelakinya pun haram bagi si wanita.

Mazhab Syafi'iyah memiliki pendapat: Zina tidak dapat menjadikan dua orang tersebut memiliki mahram musaharah, mau bagaimanapun kondisinya, Karena hubungan mahram ini adalah nikmat Allah, tidak seharusnya dapat di tetapkan dengan zina, Oleh sebab air mani dari zina adalah sia- sia, tidak ada kebaikan padanya. Jadi, orang yang berzina dengan seorang wanita diperbolehkan baginya untuk menikah dengan anak atau orangtuanya (ibu atau nenek. Tetapi, Hukumnya menjadi makruh menikahi anak wanita tersebut.

Mazhab Malikiyyah memiliki pandangan: Pendapat mereka yang dijadikan pedoman, zina tidaklah menjadikan hukum kemahraman, orang yang berzina dengan seorang wanita, maka dia dapat menikahi saudara atau orang tua si wanita.

Hukuman dari perbuatan zina sudah ditegaskan dalam syariat Islam dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

- a) Islam pada masa awal memberikan hukuman bagi wanita para pezina adalah dengan mengurung mereka di rumah keluarganya sampai mati atau sampai Allah memberikan suatu keringanan hingga ia diperbolehkan untuk keluar dari rumahnya. Sedangkan, hukuman bagi laki-laki yang berzina adalah dengan di ta'zir atau di pukul. Jikalau setelah itu dia meminta pertaubatan kepada Allah dan memperbaiki dosanya, maka biarkan ia untuk melakukannya.

وَاللَّائِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُّوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya : “ Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita- wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang (QS. al-Nisa: 15- 16)

- b) Pada tahapan kedua kemudia turun ayat dalam surah al- Nur yang menghapus hukum dari ayat- ayat pertama tersebut. Inilah ayat yang menjadi pedoman untuk menghukumi para pezina, Dengan cara mencambuk dan mengasingkannya bagi ghairu muhsan (pelaku yang belum menikah), dan dengan hukum rajam bagi yang muhsan dengan cara laki- laki yang baligh dan berakal, yang berhubungan seksual melalui dubur seorang wanita, padahal dia memiliki pernikahan yang sah, walaupun ini hanya dilakukan sekali.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ Perempuan yang berzina dan laki- laki yang berzina, maka deralah tiap- tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan jangan lah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka di saksikan oleh sekumpulan orang- orang yang beriman (QS. al- Nur: 2)

- 4) Menjaga harta (Hifdz al- Mal), disini akan membahas mengenai Illat (alasan) pemotongan tangan untuk para pencuri, Illat diharamkannya riba dan suap- menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil lainnya.

Harta adalah satu dari kebutuhan inti dalam kehidupan yang mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمَلًا

Artinya : “ *Harta dan anak- anak adalah perhiasan kehidupan dunia (QS. al-Kahfi: 46)*

Termotivasinya manusia dalam mengumpulkan harta demi mempertahankan kebradaannya serta untuk menambah nikmatnya materi dan religi. Tetapi, keinginan terdapat tiga syarat yang membatasinya, yakni harta yang dikumpulkan dengan cara halal, di gunakan untuk sesuatu yang halal, serta darinya ini harus dikeluarkan hak orang- orang/ masyarakat yang tidak mampu di lingkungan sekitarnya.

Barulah setelah itu dia dapat menikmati harta tersebut sesuka hatinya, Tetapi tidak bolehlah kita menjadi seseorang yang boros karena dengan memboroskan harta yang kita punya akan memiliki dampak yang sangat buruk bagi kehidupan kita tidak hanya secara jasmani, rohani pun dapat terserang. Kalau secara fisik kita bisa melihat bagaimana orang- orang yang terkena penyakit serius dikarenakan terlalu berfoya- foya dengan hartanya hingga lupa dengan kesehatannya. Secara Rohani orang- orang yang terbiasa boros akan menjadi orang- orang yang tamak dan rakus seperti contoh seorang koruptor bisa mengambil duit rakyat begitu banyaknya padahal gaji mereka sangat cukup bahkan berlebih karena sifat boros yang berujung kepada ketamakan. Allah pun melarang kita untuk berlebih- lebihan. Allah berfirman,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : “ *Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan.*” (QS. al- A’raf: 31)

Allah pun mengharamkan kita mencari pendapatan dari hasil riba, sebagaimana disebutkan dalam firman- Nya,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “ *Hai orang- orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang- orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan*

sisanya riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mu. Dan jika kamu berta'at (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. al-Baqarah: 278- 280)

Jika seseorang memberikan pinjaman hartanya kepada orang lain dalam bentuk utang, Dia dapat memilih satu di antara tiga kemungkinan berikut ini.

- a) Meminta kembali harta yang dipinjamkan tanpa adanya tambahan.
- b) Jika yang berhutang belum dapat mengembalikannya kita haruslah bersabar dan tidak membebani orang tersebut dengan melakukan tagihan.
- c) Jika orang yang meminjamkan hartanya adalah orang kaya dan yang diberi pinjaman adalah orang miskin serta tidak mampu, maka ada baiknya hartanya dia sedekahkan dengan tidak meminta pengembaliannya. Ini sebagai bentuk dari bentuk simpati dan rasa kasih sayang terhadap sesama.

Perlindungan terhadap yang telah dijelaskan di awal ini dilakukan manusia jikalau dalam keadaan darurat, suatu keadaan yang bisa mempertahankan hidup dan kehidupan jiwa manusia supaya tetap hidup. Perlindungan ini juga dilakukan disaat-saat darurat harus memakan daging bangkai, atau dikarenakan hilangnya udzur yang membolehkan untuk melakukan suatu hal tersebut. Bagaimanapun perantara atau berbagai sarana yang tidak persis sama dengan lima hal tersebut. Perantara atau berbagai sarana yang tidak sama dengan lima hal inti atau unsur-unsurnya ini dianggap sebagai pelengkap saja, sedang implementasinya adalah wajib.

Kategori selanjutnya ialah maslahat yang bukan intinya, dan kemashlahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

- a) Hajji (bersifat kebutuhan), suatu bentuk kemashlahatan yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan segala aktivitasnya, contohnya jual-beli, sewa-menyewa, transaksi bagi hasil, dan lain sebagainya. Ada diantaranya sarana untuk memenuhinya adalah adanya tingkat kufu dan mahar mitsli.

- b) Tahsini (bersifat perbaikan), suatu bentuk kemaslahatan yang ditujukan kepada moral dan etika, serta semua hal yang bisa membawa seseorang menuju muru'ah (adab dan tata krama).⁴⁹

Itulah tadi mengenai beberapa penjabaran terkait kemashlahatan di dalam maqashid al- syari'ah. Namun, ada beberapa aspek dan konsep penting yang tidaklah di lupakan di dalam kemashlahatan, menurut Imam Al- Ghazali aspek dan konsep tersebut ialah :

- a) menghadirkan manfaat dan menghilangkan kemudharatan. Maksudnya disini ialah masalah baik dunia maupun akhirat, bukan hanya kebermanfaatan di dunia saja.
- b) Tidak hanya terbatas pada bahasa dan 'urf (budaya).
- c) Kemashlahan yang dimaksud harus sesuai dengan maksud dan tujuan Allah memberikan mashlahah kepada ummatnya. Allah memberikan nya untuk kebermanfaatan baik dunia maupun akhirat. Jikalau, hanya memberikan kebermanfaatan pada salah satunya maka hal tersebut bukanlah yang Allah maksud.
- d) Imam al- Ghazali menyebutnya sebagai *al- ma'na al munasid* atau sering disebut sebagai qiyas.⁵⁰

B. Konsep Demokrasi

1. Pengertian dan Sejarah Demokrasi

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa dan istilah Secara bahasa “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* yang biasa kita sebut sebagai demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya

⁴⁹ *Ibid.*, h. xiv- xv.

⁵⁰ Agus Hermanto, Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), (Al- Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017), h. 445. (Online). Tersedia di [http:// dx .doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414](http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414), (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 13 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

kedaulatan, kekuasaan tertinggi, kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat, rakyatlah yang berkuasa menentukan arah masa depan sebuah negara dan pemerinthan tersebut.⁵¹

Menurut istilah, demokrasi dimaknai sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara dengan pengertian bahwa rakyatlah yang memutuskan dalam masalah- masalah mengenai seluruh aspek yang menyangkut hidup dan penghidupannya, mencakup hal seperti menilai kebijakan negara, oleh karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib rakyat. Oleh karenanya negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang menyelenggarakan sistem pemerintahannya dengan didasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Di lihat dari kaca pandnag organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.

Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat diatas bahwa hakikat demokrasi adalah sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat memiliki pengertian sebagai berikut : *pertama*, pemerintah dari rakyat (*government of the people*) ; *kedua*, pemerintahan oleh rakyat (*government by people*); *ketiga*, pemerintahan untuk rakyat (*government for people*). Suatu pemerintahan dapat dikatakan demokratis bila ketiga hal tersebut dapat di implementsikan dan ditegakkan dalam tata pemerintahan.⁵²

Dulu demokrasi diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang berlawanan dengan bentuk pemerintahan monarki dan aristokrasi. Hingganya, menjadi *contradictio interminus* jikalau dahulu disebut adanya negara kerajaan demokrasi, Bentuk ini baru dikenal pada perkembangan demokrasi sekarang ini. Republik adalah satu- satunya dari pemerintahan demokrasi.

⁸⁴ Azyumardi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003), h. 110.

⁵² *Ibid.*, h. 111.

Masyarakat Yunani mempercayai Athena-lah yang mengembangkan benih demokrasi modern dengan susunannya (polis). Lekatnya karakteristik polis ini dengan demokrasi sehingga polis ini tidak saja menjadi dasar tumbuhnya demokrasi modern, tetapi juga masyarakat negara. Hal inilah yang menjadi dasar bagi David Held untuk menyebut Polis dengan *city- state* atau *city- republic*.⁵³

b. Sejarah Demokrasi

“ Konstitusi kita disebut demokrasi karena kekuasaan tidak di tangan minoritas, tetapi semua rakyat. Apabila ada problema untuk menyelesaikan perselisihan privat, semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Apabila problemanya adalah menempatkan seseorang di depan orang lain dalam kedudukan tanggung jawab publik, yang diperhitungkan bukanlah keanggotaannya dalam kelas tertentu, tetapi kemampuan nyata yang dimiliki oleh orang tersebut. “

“Kita adalah bebas dan toleran dalam kehidupan privat kita. Tetapi dalam urusan publik, kita tunduk pada hukum. Hal tersebut disebabkan oleh perintah untuk melakukan penghormatan yang dalam.”

“ Kita memberikan kepatuhan kepada mereka yang kita tempatkan untuk berkewenangan, dan kita tunduk kepada hukum itu. Khususnya, hukum yang melindungi mereka yang di tinds dan hukum tertulis yang diakui dan dapat menimbulkan rasa malu jika melanggarnya”

(Konsep Demokrasi oleh Pericles : Athena, Yunani)

Demokrasi dalam hukum internasional telah melalui banyak perubahan secara normatif dan adat. Perubahan tersebut memiliki perkembangan yang baik sebagai sistem aturan dan dalam praktik kebangsa dan bernegara. Perubahan ini

⁵³ Harjono, *Transformasi Demokrasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 20- 21.

terjadi dalam dua fase. Pertama, hak normatif untuk menentukan nasib sendiri. Kedua, hak normatif untuk kebebasan berekspresi sebagai hak asasi manusia.⁵⁴

Demokrasi dengan konsepnya lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan di jalankan dalam hidup bernegara antara abad ke-6 SM sampai abad ke-4 M. Bentuk demokrasi yang di jalankan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan peraturan mayoritas. Demokrasi secara langsung itu berjalan secara efektif karena Negara kota (*City State*) Yunani Kuno berlansung dalam kondisi yang baik dan tidak berlebih-lebihan dengan wilayah negara terbatas pada sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 300.000 orang. Ketentuan-ketentuan menikmati hak demokrasi tidak dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat Yunani saat itu yang memiliki status budak belian, pedagang asing, perempuan dan anak-anak.

Demokrasi pertama di gagaskan Yunani kuno berakhir pada abad pertengahan. Masyarakat abad pertengahan memiliki ciri struktur masyarakat yang feodal, sistem politiknya ditandai oleh Paus dan pejabat agama, dan kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan diantara para bangsawan. Begitulah kehidupan sosial politik dan agama pada masa ini hanya ditentukan oleh elit-elit masyarakat yang kaum bangsawan dan kaum agamawan. Oleh karena itu demokrasi tidak muncul pada abad pertengahan (abad kegelapan).

Namun, menjelang akhir abad pertengahan, tumbuh kembali benih-benih untuk menghidupkan demokrasi. Lahirnya, *Magna Charta* (Piagam Besar) ialah suatu piagam yang memuat perjanjian antara kaum bangsawan dan Raja John di Inggris merupakan pondasi baru kemunculan demokrasi empirik. Dalam *Magna Charta* ditegaskan bahwa Raja mengakui dan menjamin beberapa hak

⁵⁴ Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, (*The American Journal of International Law*, Vol. 86, No. 1 Januari 1992), h. 90- 91. (Online). Tersedia di <http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28199201%2986%3A1%3C%2046%3ATERT%20CO%3B2-5>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 16 WIB), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

dan hak khusus (*preveleges*) bawahannya. *Magna Charta* memuat dua prinsip yang sangat mendasar: *Pertama*, adanya pembatasan kekuasaan raja. *Kedua*, hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja.

Momentum yang juga menandai kemunculan kembali demokrasi di dunia Barat adalah gerakan *renaissance* dan reformasi. Renaissance merupakan gerakan yang membangkitkan kembali sastra dan budaya Yunani Kuno. Gerakan ini berasal dari Barat karena adanya kontak dengan dunia islam yang ketika itu sedang berada pada puncak jayanya peradaban ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Islam pada masa itu seperti Ibnu Khaldun, al- Razi, Oemar Khayam, al- Khawarizmi dan sebagainya bukan hanya berhasil mengasimilasikan pengetahuan Parsi Kuno dan warisan klasik (Yunani Kuno), mereka juga berhasil menghasilkan hal- hal yang berguna berdasarkan kebutuhan- kebutuhan yang sesuai dengan hidup dan kelangsungan hidupnya . Karena itu seorang orientalis Philip K. Hitti menyatakan bahwa dunia Islam telah memberikan sumbangsih yang sanat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia lewat terjemahan- terjemahan warisan Parsi dan Yunani Kuno yang mana negara tersebut merupakan salah satu jembatan penyebrangan ilmu pengetahuan dunia islam ke Barat.

Dapat disimpulkan *renaissance* di Eropa yang berasal dari sumber tradisi keilmuan Islam dan berpedoman pada pemuliaan akal pikiran untuk selalu mencipta dan mengembangkan ilmu pengetahuan telah menginspirasi munculnya kembali gerakan demokrasi. Di masa *renaissance* manusia pada saat itu menghapus ikatan- ikatan yang ada dan menggantikannya dengan kebebasan bertindak sebeb- bebasnya selama sesuai dengan yang mereka pikirkan.

Selain hal diatas adapula yang melatar belakangi munculnya kembali gerakan demokrasi di Eropa yang hilang pada abad pertengahan ialah gerakan reformasi yakni merupakan gerakan revolusi agama yang berlansung di Eropa pada abad ke- 16 dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan dan situasi gereja Katolik. Dari gerakan reformasi ini menghasilkan adanya peninjauan kepada doktrin gereja katolik yang kemudian berkembang menjadi proestanisme.

Gerakan reformasi ini muncul sebelum kekuasaan gereja yang begitu dominan untuk menetapkan tindakan warga negara dimasa itu. Oleh sebab itu segala hal ditetapkan oleh gereja. Revolusi agama yang dipelopori oleh Martin Luther King membuat aksi pemberontakan kepada dominasi gereja yang telah memenjarakan kebebasan dalam berpikir dan bertindak.

Dobrakkan terhadap *absolutisme monarki* dan gereja dimasa itu didasarkan pada teori "*Social- contract*" dimana salah satu dasarnya dapat menentukan bahwa di dunia yang menguasainya ialah hukum yang berasal dari alam (*natural law*) yang memiliki kandungan prinsip- prinsip keadilan yang menyeluruh, dapat diberlakukan untuk semua waktu dan semua orang, dari raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Unsur menyeluruh yang meyakini berlakunya hukum alam (*natural- law*) untuk semua orang dalam bidang politik dapat melahirkan pendapat umum dimana hubungan antara raja dan rakyat berdasarkan pada suatu perjanjian yang dapat mengikat kedua belah pihak.

Oleh karena itu teori hukum alam merupakan salah satu usaha untuk melepas keabsolutan dan menentukan hak- hak politik rakyat dalam sebuah sistem yang disebut dengan demokrasi. Filsuf- filsuf besar seperti John Locke dan Montesquieu yang berasal dari Inggris dan Perancis telah memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk gagasan pemerintahan dengan sistem demokrasi. John Locke (1632- 1704) menyatakan bahwa hak- hak politik rakyat meliputi hak atas hidup, hak untuk memperoleh kebebasan dan hak memiliki (*live, liberal, property*), kemudian Montesquieu (1689- 1744) menyatakan sistem yang penting menurutnya adalah yang dapat menjamin hak- hak politik tersebut melalui "*trias politica*" –nya, yaitu suatu sistem pemisahan kekuasaan yaitu *legislatif, eksekutif dan yudikatif* yang masing- masing bersifat independen.

Ciri yang sangat menonjol pada negara yang menganut *Konstitusionalisme* ialah gagasan yang mengatakan bahwa pemerintah adalah sebuah kumpulan aktivitas yang dilaksanakan dengan nama rakyat, tetapi patuh pada beberapa batasan yang dimaksudkan dapat memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperuntukkan bertujuan untuk memerintah tidak dapat disalah gunakan oleh

mereka yang diberi tugas untuk dapat memerintah mengatakan bahwa pemerintah ialah sebuah kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberikan kepastian bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk memerintah itu tidak digunakan untuk hal yang menyalahi aturan daripada mereka yang mendapat tugas untuk berkuasa.

Membandingkan dengan Trias Politika Montesquieu, tugas pemerintah dalam *Konstitusionalisme* ini hanyalah terbatas pada tugas eksekutif, yakni menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen dengan nama masyarakat. Oleh karenanya, bentuk pemerintahan dalam demokrasi dengan demikian rupa memiliki peranan yang terbatas pada tugas eksekutif. Didalam konsep *Konstitusionalisme* atau demokrasi konstitusional abad ke- 19 ini disebut Negara Hukum Formal atau biasa kita kenal dengan bentuk negara hukum Klasik. Klasifikasi oleh Arief Budiman di dalamnya didasarkan atas 2 kriteria yakni kenetralan dan kemandirian negara, konsep demokrasi konstitusional abad ke- 19 atau negara hukum formal ini bisa disebut sebagai negara Pluralisme, yakni negara yang tidak mandiri yang mana hanya bertindak sebagai pemfilter dalam berbagai keinginan dari *Interest- group* di dalam masyarakat itu sendiri. Di negara pluralis yang menganut asas kebebasan ini setiap kebijakan yang dikeluarkan tidaklah atas inisiatif yang muncul dari segelintir penguasa atau rakyat saja, melainkan lahir dari proses penyerapan aspirasi masyarakat secara penuh melalui parlemen.

Negara Hukum Formal yang telah dikonsep mulai digugat di masa menjelang pertengahan abad ke- 20 yakni pada akhir perang dunia. Faktor yang membuat munculnya kecemasan atas Negara Hukum Formal yang berbentuk pluralis liberal, Dikemukakan oleh Mariam Budiarjo antara lain adalah sarana dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, penyebaran paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekuasaan secara merata serta kemenangan beberapa partai sosialis di Eropa. Munculnya gagasan bahwa pemerintah dilarang ikut campur didalam urusan warga negara baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi. Namun, di dalam gagasan yang baru pemerintah haruslah

bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh karenanya, pemerintah tidak boleh bersifat pasif melainkan harus aktif melaksanakan cara untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Didalam gagasan Demokrasi baru ini, harus dapat meluas mencakup dimensi ekonomi dengan sistem yang dapat menguasai berbagai kekuatan ekonomi dan berusaha memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi yang diutamakan haruslah mampu mengatasi ketidakmerataan distribusi kekayaan dikalangan masyarakat. Adanya gagasan yang baru ini biasanya disebut sebagai gagasan *Welfare State* yang diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai situasi (*Bestuzorg*) dan dengan konskuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam melaksanakannya. Pemerintah dalam rangka *Bestuzorg* ini diberikan kebebasan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, bukan hanya bertindak atas inisiatif pemerintah. Oleh sebab itu kepada pemerintah diberikan *Fries Ermessen* atau "*Pouvoir discretionnaire*", yakni kemerdekaan yang dimiliki oleh pemerintah untuk dapat ikut serta didalam kehidupan sosial dan keleluasaan agar selalu sesuai dengan produk wakil rakyat.

Di dalam gagasan *Welfare State* ini peranan negara dalam jarak sedemikian luas jauh melewati batasan yang diatur dalam demokrasi konstitusional negara hukum formal. Dibiidang legislasi, bahkan *Fries Ermessen* dalam *Welfare State* ini memiliki tiga macam ciri yakni adanya hak inisiatif (merancang peraturan yang memiliki derajat yang sama dengan undang- undang tanpa di batasi dengan waktu tertentu). Hak- hak legislasi (membuat peraturan yang memiliki derajat di bawah Undang- undang) dan *droit function* . Didalam perkembangan terakhir, demokrasi ala *Welfare State* mulai ditinjau ulang. Tentu konsep demokrasi di Baratpun masih terus berjalan serta mengalami perubahan yang signifikan.

Dari beberapa pernyataan sebelumnya, sejarah dan perkembangan demokrasi di Barat membentuk demokrasi langsung yang berakhir pada abad pertengahan. Pada masa menjelang pada abad pertengahan lahir *Magna Charta*

dan dilanjutkan dengan munculnya gerakan demokrasi konstitusional. Maka dapat disimpulkan demokrasi konstitusional melahirkan demokrasi *Welfare State*.⁵⁵

2. Latar Belakang Demokrasi

Adanya tuntutan untuk memiliki sistem demokrasi di latar belakang oleh beberapa sebab seperti kemunduran makro ekonomi dan SAP, yang mendorong kelompok aksi dan masyarakat sipil di dunia ketiga. Hingga sampai saat ini sejumlah besar pemerintah dunia ketiga tidak demokratis. merubah ke arah sistem demokrasi secara formal di Amerika Latin dan sebagian Asia dan Afrika sub- Sahara adalah salah satu penyebab dari tekanan internasional maupun dalam negeri.

Dalam peranan internasional, yang berlangsung selama perang dingin layaklah baginya pemerintahan otoriter agar menyebut dirinya 'antikomunis' dan mendapat bantuan dari barat yang dengannya dapat menambah peluang untuk tetap hidup. Tetapi, pada tahun 1980-an dunia internasional mengalami sedikit perubahan. Pada saat itu presiden Amerika Serikat pada tahun 1982 berpidato dihadapan perangkat pemerintahan di Inggris ia mengatakan bahwa ia bersungguh- sungguh mau memulai gerakan 'kampanye untuk Demokrasi'. Di masa ini, demokrasi maupun hak asasi manusia memperoleh dukungan di Barat seperti dikatakan oleh Michael Moore (1995: 422), 'maju dengan yakin' demi dunia ketiga. Dapat disimpulkan bahwa telah diterima secara luas pengaruh dan keinginan dunia internasional membantu meyakinkan dari pemerintah dunia ketiga yang non demokratis untuk mengadakan pemilihan umum yang baik (Huntington 1991; Bratton 1994a; Pridham 1994; Moore; 1995).

Selanjutnya faktor yang mengarah kepada perubahan yang demokratis adalah keinginan dari masyarakat didalam negeri tersebut. Yaitu dengan mendapat petunjuk dari transformasi dari Eropa Timur yang demokratis pada akhir tahun 1980-an, golongan demokrat pada dunia ketiga di pacu agar memberi tekanan kepada pemerintah mereka ke arah reformasi politik. Selang beberapa tahun,

⁵⁵ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, h. 125.

banyaknya sistem non demokrasi yang menyerah kepada demokrasi formal, yaitu sebagian besar orang mempunyai kesempatan untuk memilih pemerintahnya dengan jarak yang teratur. Tetapi, diresmikannya demokrasi secara peraturan tidak dapat membawa ke arah demokrasi secara isi, yaitu dimana rakyat jelata-pribumi, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan etnik benar-benar mendapatkan kepentingannya dalam agenda politik. Dapat dikatakan, diadakannya sistem demokrasi formal untuk sementara diterima, hal tersebut belum cukup untuk dapat merusak keseimbangan kekuatan yang memihak kepentingan kaum atau masyarakat yang berada di bawah. Oleh karenanya, tak dapat dipungiri banyak yang menjauhkan diri dari partai politik, lain halnya mereka dominan lebih mengejar aspirasinya melalui kelompok aksi.⁵⁶

Dari demikian banyaknya pergolakan yang terjadi maka demokrasi dapat tercipta dan dapat dilaksanakan di seluruh dunia dengan berbagai pertimbangan matang. Seperti kita lihat pada penjelasan diatas bahwasanya latar belakan adanya demokrasi terjadi akibat banyaknya tekanan dari dunia internasional untuk menggunakan sistem demokrasi. Mengapa demikian ? demokrasi di rasa cukup untuk memenuhi isi hati dari rakyat dan masyarakat yang dipimpin dalam suatu negara. Dengan memperhatikan hak-hak kerakyatan tanpa meninggalkan hak dan kewajiban dari penguasa dari negara tersebut.

3. Prinsip- Prinsip Demokrasi

a. Prinsip- prinsip Umum Demokrasi

Laski mengomentari hal-hal mengenai demokrasi yang menyatakan bahwa demokrasi tidaklah dapat diberi batasan secara definisi dikarenakan demokarsi memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang terjadi dengan sejarah dari masing-masing negara tempat diberlakukannya demokrasi berikut mengenai komentar Laski tersebut:

⁵⁶ Jeff Haynes, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia ketiga (gerakan politik baru kaum terpinggir)*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 128- 130.

“ No definition of democracy, can adequately comprise the vast history which the concept connotes. To some, it is a form of Government, to others, a way of social life. Men have found its essence in the character of electrote, the relations between the government and people, the absence of wide economics differences between citizens, the refusal to recognize privileges built on birth or wealth, race or creed. Inevitably it has changed its substances in terms of time and place. “

William Ebenstein menyatakan delapan ciri utama dari konsep demokrasi yang ada di Barat, yaitu :

- 1) Empirisme rasional
- 2) Menekankan pada individu
- 3) Negara sebagai sarana
- 4) *Voluntarism* (kesukarelaan)
- 5) Hukum berada diatas hukum lainnya
- 6) Prosedural
- 7) Didasarkan pada persetujuan
- 8) Semua manusia adalah sama

Jack Lively menyatakan tiga kriteria sebuah negara dapat dikatakan demokratis:

- 1) Golongan yang dominan dapat sejauh mana terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Kontrol masyarakat dapat sejauh mana memperngaruhi keputusan pemerintah.
- 3) Dalam administrasi umum sejauh mana warga negara dapat terlibat dan terbiasa terlibat didalamnya.

Menurut Henry B. Mayo setidaknya ada sembilan nilai yang paling mendasari demokrasi, yakni :

- 1) Dapat menyelesaikan perselisihan dan pertentangan dengan damai dan sukarela.

- 2) Terjaminnya penyelenggaraan perubahan dengan damai didalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
- 3) terselenggaranya pergantian kepemimpinan secara teratur.
- 4) Dibatasinya penggunaan kekerasan secara minimum.
- 5) *Plurality* (keberagaman).
- 6) Keadilan dapat tercapai.
- 7) Yang paling baik dalam memanjukkan ilmu pengetahuan
- 8) Kebebasan
- 9) Kelemahan dari sistem- sistem yang lain dapat ditunjukkan secara gamblang dari nilai- nilai yang tercermin di dalam demokrasi.

Didalam pendapat lain Franz- Magnis Suseno memasang demokrasi dalam bentuk negara yakni sebuah negara demokratis. Magnis menyebutkan ada lima ciri yang sebenarnya dari sebuah negara demokrasi, yaitu :

- 1) Negara Hukum.
- 2) Masyarakat mengontrol keputusan dan kebijakan dari pemerintahannya.
- 3) Bebasnya pemilihan umum.
- 4) Menekankan pada prinsip mayoritas.
- 5) Hak- hak demokratis dapat terjamin.

Mengenai nilai- nilai yang terkandung dari masing- masing teori demokrasi dari pakar tersebut disimpulkan beberapa hal :

- 1) Terkandungnya nilai- nilai yang bersifat substansial.
- 2) Terkandungnya nilai- nilai yang bersifat prosedural yang dapat menjadi mekanisme arah penentu agar persetujuan menjadi benar.

Semua kategori nilai- nilai tersebut baik substansial maupun prosedural memiliki peranan yang penting dalam eksistensi suatu tatanan sebuah negara yang disebut sebagai 'demokrasi'. Jika tanpa adanya nilai atau prinsip tersebut demokrasi tidak mungkin ada oleh sebab itu penulis menyebutnya sebagai nilai atau prinsip eksistensial dari demokrasi itu sendiri.

b. Prinsip- Prinsip Eksistensial

Dalam ruang waktu dan sejarah demokrasi telah mengalami banyak perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik serta mengalami banyaknya halangan dan rintangan dari awal perjalanannya hingga dapat diberlakukan hampir diseluruh dunia. Demokrasi mempunyai prinsip- prinsip dasar yang berkaitan dengan keberadaanya sebagai teori politik. Dengan adanya demokrasi sebagai teori ia telah berkembang menjadi bentuk sistem yang memiliki syarat agar bekerjanya mesin politik penataan masyarakat yang beradab.

Suatu sistem pemerintahan yang prinsipil dan berkarakter demokrasi didasarkan pada nilai- nilai yang pada dasarnya bersifat umum atau menyeluruh. Selalu adanya nilai- nilai ini dianggap sebagai pedoman etis walau hampir seluruh rezim tiran atau otoriter serta korup sejak ratusan tahun yang lalu berusaha menutupinya dengan kekuatan militer.

Dari seluruh prinsip umum yang tercermin didalam beberapa pandangan mengenai teori demokrasi, secara substantif dapat diberikan kepada tiga nilai utama yang menjadi prinsip yang mendasari timbulnya teori demokrasi, yakni:

- 1) Kebebasan.
- 2) Kesamaan.
- 3) Kedaulatan suara mayoritas (rakyat).

Ketiga nilai inilah yang menyebabkan demokrasi dapat didukung dan disanjung sebagai konsep yang mengadakan adanya teori politik modern yang paling mendekati sempurnan dalam sejarah kemanusiaan. didalam tiga nilai inilah semua unsur didalam demokrasi secara umum telah dinyatakan oleh para pakar politik yang mempelajari demokrasi.⁵⁷

Dari beberapa penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwasanya prinsip-prinsip demokrasi yaitu :

- 1) Terkadungnya nilai- nilai yang bersifat substansial.
- 2) Terkadungnya nilai- nilai yang bersifat prosedural yang dapat menjadi mekanisme arah penentu agar persetujuan menjadi benar.

⁵⁷ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006), h. 71- 80

- 3) Kebebasan.
- 4) Kesamaan.
- 5) Kedaulatan.

Didasarkan terhadap berbagai prinsip negara hukum yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat dari kecendrungan perkembangan negara hukum modern yang dapat menumbuhkan prinsip- prinsip penting yang baru agar menciptakan negara hukum, terdapat dua belas prinsip pokok sebagai pondasi utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Kedua belas prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Supremacy of Law* (Supremasi Hukum).
- 2) *Due Process of Law* (Asas Legalitas).
- 3) Pembatasan Kekuasaan.
- 4) Organisasi penunjang yang independen.
- 5) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- 6) *Equality Before the Law* (Persamaan dalam Hukum).
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara.
- 8) *Constitutional Court* (Mahkamah Konstitusi).
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia.
- 10) *Democratische Rechstaat* (Bersifat Demokratis).
- 11) *Welfare Rechstaat* (Sebagai Sarana untuk Mewujudkan Tujuan Bernegara).
- 12) Transparansi (keterbukaan) dan Kontrol Sosial.

Prinsip- prinsip negara hukum berkembang dengan dipengaruhi oleh kuatnya diterimanya paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan berbagai model negara tradisional. Beberapa prinsip negara *nomocratie* dan beberapa prinsip kedaulatan *democratie* dilaksanakan dengan cara beriringan dengan dua sisi dari satu mata pisau. Negara hukum dengan paham yang demikian dikenal atau disebut sebagai negara hukum *democratische rechstaat* atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Dibangun dan ditegakkan

hukum berdasarkan berbagai prinsip demokrasi. Hukum tidaklah boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi atau berdasarkan dengan kekuasaan semata (*Machstaat*). Demokrasi haruslah diatur atas dasar hukum. Pengaplikasian gagasan demokrasi memerlukan prosedural hukum agar mencegah timbulnya mobokrasi yang mengancam terlaksananya demokrasi.⁵⁸

4. Macam- Macam Demokrasi

a. Demokrasi Klasik

Beberapa ciri penting dari demokrasi klasik adalah sebagai berikut.

- 1) Keiktsertaan langsung warga negara dalam berbagai fungsi legislatif dan yudikatif.
- 2) Kekuasaan tertinggi dimiliki oleh majelis rakyat.
- 3) Mempunyai beragam metode pemilihan kandidat pejabat publik.
- 4) Tiada perbedaan yang istimewa untuk membedakan rakyat biasa dengan para pejabat publik.
- 5) Posisi yang berhubungan dengan jabatan yang sama tidak boleh di pegang lebih dari dua kali dengan orang yang sama.
- 6) Semua pegawai publik yang digaji memiliki masa jabatan yang pendek.

b. Demokrasi Protektif

Ciri penting dari demokrasi protektif sebagai berikut.

- 1) Ditangan rakyatlah yang memegang kekuasaan, tetapi tetap para wakil rakyat yang secara sah dapat menjalankan berbagai fungsi negara.
- 2) Pemilihan umum (pemilu), surat suara rahasia, persaingan antar golongan, berbagai pemimpin atau berbagai partai yang berpotensi serta aturan mayoritas merupakan dasar dari institusional agar membentuk pertanggung jawaban mereka yang memimpin.

⁵⁸ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 132- 133

- 3) Kekuasaan negara haruslah menyeluruh tidak memihak golongan atau orang tertentu, yakni secara hukum dibatasi dan dipisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- 4) Konstitusionalisme memusatkan untuk menjamin kebebasan dari tindakan semena-mena dan tindakan tidak adil di depan hukum didalam bentuk hak atau kebebasan politik dan sipil dari semua yang terkait dengan kebebasan berbicara, berekspresi berkerja sama, memilih dan beragama.
- 5) Memisahkannya negara dari masyarakat biasa, yakni dengan cara yang umum wilayah perlakuan negara dibatasi secara jelas sampai terbentuknya kerangka kerja yang memperbolehkan penduduk untuk menjalankan kehidupan pribadi mereka yang bebas dari risiko kekerasan serta tingkah laku sosial yang tidak dapat di terima dan berada dalam campur tangan politik yang tidak di kehendaki.
- 6) Persaingan berbagai pusat kekuasaan dan berbagai kelompok kepentingan.

c. Demokrasi Developmental

Beberapa ciri penting Demokrasi Developmental sebagai berikut.

- 1) Hak suara universal didalam kepemimpinannya.
- 2) Pemerintahan perwakilan yang dimaksud disini ialah memerintah dan berkuasa atas dasar pemilihan yang dilakukan oleh rakyat.
- 3) Konstitusional yang diawasi untuk menjamin batasan- batasan didalam, pembagian kekuasaan negara dan untuk memastikan promosi atas hak-hak individu selain semua yang terkait dengan gabungan secara individu 'rencana kehidupan' yang akan dipilih.
- 4) Memiliki batas yang jelas dengan dewan parlementer dari birokrasi publik, yakni pemisahan berbagai fungsi orang- orang yang dipilih berasal dari orang- orang yang ahli administrasi.
- 5) Keterlibatan rakyat dalam cabang- cabang pemerintahan berbeda melalui suara, partisipasi yang luas dalam pemerintahan lokal, perdebatan publik, dan pelayanan umum.

d. Demokrasi Pluralisme

Beberapa ciri utama demokrasi pluralisme adalah sebagai berikut.

- 1) Warga negara memiliki hak- hak seperti didalamnya satu orang satu suara, kebebasan berekspresi, kebebasan berorganisasi.
- 2) Sistem Check and balance di kalangan birokrasi legislatur, eksekutif, judisial, dan administratif.
- 3) Kompetitifnya sistem pemilihan dengan setidaknya dua partai.

e. Demokrasi Partisipatif

Berbagai ciri utama demokrasi partisipatif ialah sebagai berikut.

- 1) Warga negara berpartisipasi langsung dalam aturan institusi inti didalam masyarakat termasuk tempat kerja dan komunitas lokal.
- 2) Pengorganisasian kembali sistem partai dengan menjadikan para pejabat partai langsung bertanggung jawab pada masalah didalam keanggotaan.
- 3) Pelaksanaan ‘partai- partai partisipatif’ dalam sebuah struktur parlementer atau kongres.
- 4) Sebuah sistem institusional yang dipelihara dan terbuka untuk meyakinkan kemungkinan dalam berbagai bentuk politik.

f. Demokrasi Deliberatif

Beberapa ciri utama demokrasi deliberatif adalah sebagai berikut.

- 1) Berbagai pendapat deliberatif.
- 2) Adanya program *e- government* bersumber dari laporan online hingga akses kepada wakil rakyat.
- 3) Adanya program e- demokrasi termasuk forum publik online.
- 4) Dianalisisnya kelompok dan penyusunan proposal kebijakan.
- 5) Kehidupan publik yang deliberasi dan forum mikro hingga lingkup transnasional.

- 6) Referendum dengan fungsi baru yang dikaitkan dengan berbagai pendapat deliberatif.⁵⁹

g. Demokrasi Sosial

Demokrasi sosial merupakan sebuah jenis liberalisme yang memandang tersedianya keamanan ekonomi sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penghormatan terhadap individu. Sedikit berbeda dari definisi biasanya tentang demokrasi sosial yakni sebagai “suatu etos dan cara hidup yang dicirikan oleh penghapusan berbagai perbedaan status secara umum.” Demokrasi sosial tidak memiliki syarat untuk menghapus perbedaan ekonomi secara ekstrem dikarenakan penghapusan itu dapat menghalangi inisiatif yang diperuntukkan sebagai sarana kemajuan ekonomi pada tingkat golongan dan individu. Penghapusan itu dapat menyebabkan batas kehidupan masyarakat dapat merosot secara tajam.

Tidak bermaksud menghilangkan kapitalisme Demokrasi Sosial justru memperbaiki kapitalisme yang radikal. Dengan tujuan perkonomian campuran yang menciptakan tersedianya keamanan ekonomi yang digunakan sebagai salah satu tujuan masyarakat dan negara. Selain itu untuk mempertahankan berbagai prinsip dasar masyarakat liberal. Yang secara substansial sistem ekonomi terpisah dari sistem politik yang akan membantu menjamin tersebarnya kekuasaan.⁶⁰

⁵⁹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2012), h. 207. 1.

⁶⁰ Rhoda E. Howard, *HAM (Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya)*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), h. 315.

BAB III

TEORI DAN IMPLEMENTASI DEMOKRASI DI INDONESIA

A. Sejarah Proses Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia terbagi didalam empat periode yakni : periode 1945- 1959, periode 1959- 1965, periode 1965- 1998, dan periode 1998- sekarang. Berikut penjelasannya :

1. Periode 1945- 1959

Dimasa ini demokrasi dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini sudah ada dan berlaku sebulan se usai kemerdekaan diproklamasikan. Tetapi, dengan bentuk demokrasi ini disinyalir kurang tepat untuk Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai demokrasi menyebabkan lemahnya budaya demokrasi untuk dipraktikkan dengan model barat ini dianggap kurang cocok selain dari masyarakat sendiri yang tidak mengapresiasi dengan adanya model barat ini telah memberikan peluang yang besar terhadap partai- partai politik agar mendominasi kehidupan sosial politik.

Tidak adanya budaya demokrasi yang bersesuaian dengan demokrasi parlementer ini pada akhirnya melahirkan fragmentasi politik didasarkan pada afiliasi kesukuan dan agama. Berakibat terhadap pemerintahan yang didasarkan pada koalisi politik di masa ini sedikit sekali yang dapat bertahan. Pada akhirnya berdampak pada destabilisasi politik nasional hingga mengancam integrasi nasional didalam pembangunan. Kompetisi yang tidak sehat diantara faksi politik dan pemberontakan daerah kepada pemerintah pusat telah mengakibatkan terancamnya demokrasi.

Beberapa faktor disintegratif yang telah dijelaskan, disertainya dengan kegagalan partai didalam majelis konstituante agar mencapai konsesus mengenai dasar negara untuk undang- undang dasar yang baru, hal ini membuat terdorongnya Presiden Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, didalamnya menegaskan berlakunya kembali Undang- Undang Dasar 1945. Oleh karenanya masa demokrasi didasarkan terhadap sistem parlementer

berkahir dan tergantikan oleh Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) dimana Presiden Soekarno diposisikan menjadi pusat kekuasaan negara.

2. Periode 1959- 1965

Didalam masa ini demokrasi disebut sebagai demokrasi terpimpin. Dengan ciri demokrasi ini adalah didominasi oleh politik presiden dan pengaruh komunis yang berkembang serta peranan tentara didalam kancah perpolitikan nasional. Inilah yang disebabkan oleh munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diperuntukkan sebagai ikhtiar mencari titik terang dari kestagnanan politik dengan cara membentuk kekuasaan yang kuat. Walaupun UUD 45 telah memberikan peluang terhadap Presiden untuk memimpin pemerintahan selama lima tahun, namun ketetapan MPRS No. III/ 1963 yang telah menangakat Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup. Dalam artian penetapan ini dapat membatalkan batasan waktu lima tahun sebagaimana ketetapan di dalam UUD 1945.

Presiden dengan kepemimpinannya yang tanpa batas ini terbukti telah melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyalahi aturan dari aturan dan ketentuan Undang- Undang Dasar negara. Sebagai contoh pada tahun 1960 Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dari hasil pemilihan umum, tetapi kalau kita telaah kembali di dalam penjelasan Undang- Undang Dasar 1945 secara tegas dan gamblang bahwasanya presiden tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat disimpulkan bahwa sejak diberlakukan Dekrit Presiden telah terjadi hal- hal yang berkaitan dengan penyimpangan oleh Presiden didalam konstitusi.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif seorang sejarawan mengatakan bahwasanya Demokrasi Terpimpin ingin menempatkan Soekarno sebagai seorang yang menjadi panutan dan pedoman dalam sebuah Konstitusi di Indonesia lewat kekuasaan yang berada pada tangannya. Kekeliruan yang besar didalam demokrasi terpimpin Soekarno yakni adanya pertentangan kepada nilai- nilai demokrasi yaitu absolutisme dan hanya pada diri pemimpin terpusatnya kekuasaan, oleh karenanya tidak ada ruang kontrol sosial serta *check and balance* dari legislatif kepada eksekutif.

Peran politik Partai Komunis Indonesia (PKI) Dalam kehidupan politik benar- benar menunjukkan eksistensinya. Berdalih dengan Dekrit Presiden 5 Juli yang dijadikan sumber hukum, banyaknya badan ekstra konstitusional seperti Fron Nasional yang didirikan digunakan oleh PKI sebagai sarana kegiatan yang mana kegiatan politik Fron Nasional telah diubah oleh PKI agar menjadi bagian daripada strategi serta taktik Komunisme Internasional yang menuntun pembentukan Fron Nasional sebagai upaya persiapan terbentuknya demokrasi rakyat dengan berdasar pada strategi politik PKI agar mendapatkan keuntungan dari kehancuran secara perlahan partai politik saingannya dan media surat kabar yang dinilai tidak sejalan dengan revolusi yang telah dipimpin oleh Presiden Soekarno.

Politik PKI yang berpedoman pada marxis tentu saja tidak akan dibiarkan begitu saja oleh kalangan militer, dimana mereka ialah komponen politik Presiden Soekarno yang penting. Didalam akhir daripada sistem Demokrasi Terpimpin Soekarno telah mengakibatkan perseteruan politik- ideologis antara PKI dan TNI yang merupakan peristiwa pemberontakan dan berdarah seperti yang kita kenal dengan Gerakan 30 September 1965. Dalam peristiwa ini banyak pimpinan teras TNI dibunuh secara brutal oleh kader PKI.

3. Periode 1965- 1998

Didalam periode ini yang memimpin ialah presiden Soeharto. Orde Baru merupakan sebuah sebutan yang dipergunakan sebagai kritik terhadap periode yang sebelumnya yakni Orde Lama. Seperti apa yang dinyatakan oleh pendukungnya Orde Baru ialah sebuah usaha untuk membenarkan kembali penyimpangan yang terjadi pada masa orde lama terhadap Undang- Undang Dasar 1945 yang terjadi didalam masa Demokrasi Terpimpin. Sejalan dengan bergantinya kepemimpinan nasional, Demokrasi Terpimpin telah diganti oleh pemerintahan Orde Baru dengan Demokrasi Pancasila.

Kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti Ketetapan MPRS No. III/ 1963 yang telah menetapkan presiden memiliki masa jabatan seumur hidup untuk Ir.

Soekarno telah ditiadakan dan diganti dengan pembatasan jabatan presiden lima tahun serta dapat dipilih kembali melalui proses Pemilu.

Dalam urusan hukum, Ketetapan MPRS No. XIXI/ 1966 telah menetapkan peninjauan kembali untuk semua produk legislatif dalam masa Demokrasi Terpimpin. Dengan berdasarkan hal tersebut Undang- Undang No. 19/1964 telah digantikan oleh suatu undang- undang baru yakni Undang- undang No. 14/ 1970 yang memberi ketetapan kembali terhadap dasar dari kebebasan badan pengadilan.

Secara garis besar Demokrasi Pancasila memberikan penawaran dengan tiga komponen daripada demokrasi. Pertama, demokrasi didalam bidang politik yang mana pada hakikatnya adalah membangkitkan kembali azas negara hukum dan kepastian hukum. Kedua, demokrasi dalam bidang politik yang pada hakikatnya adalah kehidupan yang baik bagi semua masyarakat didalam negara tersebut. Ketiga, demokrasi didalam bidang hukum pada hakikatnya pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang netral tidak memihak manapun.

Alih- alih pelaksanaan ajaran Pancasila secara murni dan konsekuen Sungguh sangat disayangkan Demokrasi Pancasila yang dikampanyekan dan promosikan oleh Orde Baru hanya sebatas retorika politik. Didalam praktik kenegaraan dan pemerintahan pemimpin Orde Baru bertindak jauh dari prinsip- prinsip yang ada di dalam demokrasi itu sendiri. M. Rusli Karim mengatakan ketidak demokratisan pemimpin Orde Baru ditandai oleh :

- a. Militer berperan dominan.
- b. Pengambilan keputusan politik dilakukan dengan Birokratisasi dan sentralisasi.
- c. Peran dan fungsi partai politik yang dikebiri.
- d. Pemerintah dalam berbagai urusan partai politik dan publik ikut serta dan campur tangan didalamnya.
- e. Masa mengambang pada politik.
- f. Ideologi negara yang di monolitisasi.
- g. Lembaga non pemerintah yang Inkorporasi

4. Periode 1998- sekarang

Sering sekali periode ini di sebut dengan istilah periode paska- Orde Baru atau biasa disebut reformasi. Pada periode reformasi ini erat hubungannya dengan gerakan reformasi yang menuntut pelaksanaan demokrasi dan HAM secara berkelanjutan atau konskuen. Sewaktu lengsernya Presiden Soeharto maka berakhirilah tuntutan ini dari kekuasaan pada tahun 1998. Pada akhirnya setelah lebih dari tiga puluh tahun berkuasa presiden Soehartopun lengser bersamaan itu pula demokrasi pancasila ala presiden Soeharto pun lengser berbarengan dengan jatuhnya diri presiden Soeharto. Penyimpangan dan penyelewengan atas dasar negara Pancasila oleh penguasa Orde Baru memiliki dampak pada sikap tidak antipati sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Pancasila.

Reformasi ialah awal mula masa pemberlakuan dan penerapan *syari'at* Islam. Pada masa refromasi penerapan *syari'at* di Indonesia menemukan peluang yang sangat bagus dimana pada saat itu berbarengan dengan krisis yang dialami oleh Indonesia dimana berawal dari krisis moneter setelah itu berlanjut menjadi krisis ekonomi, politik, sosial dan krisis terhadap kepercayaan. Krisis ini juga bisa dikatakan sebagai keuntungan terselubung (*blessing indisguise*). Dengan adanya krisis ini mulai terlihat lemahnya sistem sosial, ekonomi, politik, dan hukum sekuler yang selama ini digunakan oleh bangsa Indonesia.⁶¹

Pancasila yang memiliki pengalaman yang pahit pada dasarnya sangat terbuka, inklusif dan penuh dengan nuansa HAM, memiliki dampak pada enggannya kalangan tokoh reformasi untuk memberikan beberapa atribut tertentu pada kata demokrasi. Melihat pengalaman yang telah lalu manipulasi dari Pancasila yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru demokrasi yang akan dikembangkan setelah jatuhnya rezim Orde Baru adalah Demokrasi tanpa nama serta tanpa embel- embel. Gerakan Reformasi dengan mengusung demokrasiialah demokrasi yang sebenarnya yang mana hak rakyat merupakan komponen utama didalam tata cara dan pelaksanaan pemerintahan yang demokratis. Wacana demokrasi pada Orde Baru erat hubunugannya dengan diberdayakannya

⁶¹ Saifudin, Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Al- 'Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017), h. 476. (Online). Tersedia di <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2516>, (diakses pada tanggal 22 Juli, Pukul 15: 34), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Masyarakat Madani dan penegakkan HAM secara konsekuen (berlanjut) serta dengan sungguh- sungguh.⁶²

B. Demokrasi dalam Dasar Negara dan Konstitusi di Indonesia

Dasar dari sebuah negara hukum adalah *Rule by law not Rule by man*, tentu saja itu berarti negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan(individu), kelompok maupun golongan manapun tertentu. Negara hukum juga menitik beratkan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia dalam suatu negara tersebut, yang meliputi perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan ke sewenang- wenangannya penguasa. serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban, kenyamanan dan keamanan.⁶³

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang di kenal dengan Undang- Undang Dasar (UUD) 1945. UUD 1945 memang merupakan UUD yang kilat, Soekarno sendiri menyebutnya dengan istilah *revolutive-grondwet*, karena disusun secara terburu- buru sejak bulan Mei 1945 dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya, meskipun banyak sekali ide cemerlang dan cerdas yang berhasil dirumuskan di dalamnya, tetapi berkenaan dengan pilihan sistem pemerintahan, UUD 1945 di dalam rumusannya tidaklah diidealkan (disempurnakan) oleh para pemimpin di Indonesia dalam masa-masa awal kemerdekaan.⁶⁴

Dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 Undang- undang Dasar dibentuk oleh Badan Penyelidikan Usaha- usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia biasa disebut BPUPKI didalam bahasa jepang dikenal dengan

⁶² A. Ubaedillah, *Op. Cit.*, h.142- 144.

⁶³ Made Hendra Wijaya, (Jurnal Advokasi Vol. 5, No.2, September 2015), h. 203. (Online). Tersedia di <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37958833/apsr2005.pdf> (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 17), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶⁴ Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, (Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013), h. 247. (Online). Tersedia di <https://www.neliti.com/publications/108628/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan>, (diakses pada tanggal 02 Juni, Pukul 21: 30), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai dengan beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Mr. Radjiman Wedyodiningrat. Tugas utama sebenarnya ialah menyusun rancangan UUD. Tetapi dalam praktik persidangannya berjalan dengan berkepanjangan, terkhusus pada saat mengulas masalah yang berkaitan dengan dasar negara. Dalam akhir sidang 1 BPUPKI telah berhasil membuat panitia kecil yang disebut dengan panitia sembilan. Pada tanggal 22 Juni 1945 panitia ini berhasil mencapai kesepakatan untuk menyetujui semua naskah Mukaddimah UUD. Panitia sembilan ini yang telah dihasilkan ini kemudian diterima dalam sidang II BPUPKI tanggal 11 Juli 1945. Kemudian, Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945 yang dipimpin oleh Soepomo yang bertugas menyusun rancangan Undang- Undang Dasar dan membuat sebuah panitia untuk mempersiapkan kemerdekaan yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI beranggotakan 21 orang dengan diketuai Ir. Soekarno dan Moh. Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI diantaranya ialah Mr. Radjiman Wedyodiningrat, Ki Bagus Hadikoesoemo, Otto Iskandardinata, Pangeran Soerjiamidjojo, Soetarjo Kartohamidjojo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Abdul Kadir, Drs. Yap TjwanBing, Dr. Mohammad Amr berasal dari Sumatra, Mr. Abdul Abbas berasal dari Sumatra, Dr. Ratulangi, Andi Pangerang berasal dari dari sulawesi, Mr. Latuharhary, Mr. Pudja berasal dari Bali, AH. Hamidan berasal dari kalimantan, R.P. Soeroso, Abdul Wachid Hasyim dan Mr. Mohammad Hassan berasal dari Sumatra.

Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi serta paling penting sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan wewenang dari bentuk-bentuk hukum atau peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Prinsip hukum yang berlaku secara universal, peraturan-peraturan yang tingkatannya berada di bawah Undang-Undang Dasar dapat berlaku dan diberlakukan, peraturan-peraturan itu tidak boleh bersinggungan dengan hukum yang lebih tinggi tersebut (konstitusi). Oleh karena itu, hal yang

pertama kali di fikirkan oleh para pendiri bangsa ialah menciptakan konstitusi tersebut untuk Indonesia lewat sidang BPUPKI dan PPKI.⁶⁵

Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan diberlakukan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karenanya, sejak saat itu Indonesia menjadi suatu negara modern karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu Undang- Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang isinya memiliki tata kerja layaknya konstitusi modern. Undang- Undang Dasar 1945 memiliki istilah yang memakai angka “1945” di belakang UUD seperti apa yang telah dijelaskan oleh Dahlan Thaib dkk. Baru kemudian muncul pada awal tahun 1959 di tanggal 19 Februari 1959 Kabinet Karya mengambil keputusan dengan ketetapan yang tetap mengenai “pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945”. Konstitusi Indonesia didalam perjalanan sejarah telah mengalami beberapa kali perubahan baik nama maupun isi dari materi yang dikandungnya. Berikut perjalanan sejarah konstitusi di Indonesia yakni :

1. Undang- Undang Dasar 1945 dengan masa berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang biasanya dikenal dengan sebutan konstitusi RIS dengan masa berlaku sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
3. Undang- Undang Dasar Sementara atau biasa disingkat dengan UUDS Republik Indonesia 1950 yang masa berlakunya sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
4. Undang- Undang Dasar 1945 merupakan pemberlakuan kembali konstitusi pertama Indonesia dengan masa berlakunya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang.⁶⁶

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR dengan perubahan pertama sampai perubahan keempat pada 1999 sampai dengan 2000, merupakan

⁶⁵ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, (Jurnal Mahkamah Konstitusi), h. 5. (Online). Tersedia di jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213 (di akses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 45), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁶⁶ A. Ubaedillah, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation), h. 70- 71.

produk sejarah yang tidak dapat dilepaskan dari keadaan pada saat perubahan tersebut dilakukan yakni tuntutan reformasi. Sebagian besar dapat ditarik secara umum bahwa banyak konstitusi negara di dunia timbul justru karena dalam suatu keadaan yang sangat mendesak agar dapat memenuhi tuntutan baru atau mungkin bahkan diharapkan dapat mengakhiri suatu keadaan yang kacau dan tidak terkondisikan.⁶⁷

Dalam sebuah negara perubahan konstitusi ialah sesuatu yang lazim dan sangat umum untuk dilakukan. Dalam sejarahnya di Indonesia sering terjadi perubahan konstitusi. Mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUD Sementara 1950, kembali ke UUD 1945, dan pada 1999- 2002 MPR melakukan perubahan sebanyak empat tahapan.

MPR melakukan perubahan sebanyak empat tahap yang pada hakikatnya adalah sebuah satu kesatuan. Perubahan dilakukan dengan cara memuat dalam setiap produk hukum MPR yang memiliki materi mengenai perubahan, rumusan atau bunyi pasal- pasal atau ayat- ayat yang dirubah, tanpa mengutip bunyi ayat atau pasal yang diubah. Dengan hanya menyebutkan dan merumuskan pasal atau ayat yang baru, maka pasal atau ayat yang asli di gantikan bunyi dan isinya. Pengubahn semacam ini dimaksudkan untuk mempertahankan struktur asli dari UUD 1945.

MPR pada saat melakukan Perubahan Pertama pada tahun 1999, telah disepakati oleh anggota Panitia Ad Hoc III BP MPR yang mempersiapkan rancangan perubahan UUD didalam melaksanakan perubahan, isi yang terdapat dalam penjelasan UUD 1945 akan diangkat ke dalam pasal- pasal UUD dari hasil perubahan. Kemudian setelah menyepakati untuk tidak lagi mempertahankan adanya penjelasan- penjelasa pada perubahan UUD, beberapa hal juga akan disepakati dalam mengarahkan perubahan yang akan dilakukan. Kesepakatan dari hasil tersebut akan tetap dipertahankan hingga MPR dari pada hasil Pemilihan Umum 1999 menyelesaikan seluruh proses perubahan UUD, yakni Perubahan Pertama sampai dengan Perubahan keempat. Dengan kesepakatan yang dimaksud ialah :

⁶⁷Harjono, *Op. Cit.*, h. 49.

1. Mempertahankan serta tidak melakukan perubahan pada Pembukaan UUD 1945.
2. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mempertahankan bentuk pemerintahan yang presidensiil.
4. Mengangkat substansi atau isi yang terdapat dalam penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD.
5. Perubahan UUD dilaksanakan dengan cara adendum, yakni dengan cara melampirkan perubahan pada naskah asli UUD 1945.

Kesepakatan tersebut, yang terangkum pada hasil perubahan UUD 1945, yakni :

Pertama, perjanjian untuk tetap mempertahankan Pembukaan UUD 1945. Agar dapat melaksanakan kesepakatan ini, maka bunyi asli daripada pembukaan UUD 1945 tetap ada dan dipertahankan. Pembukaan UUD 1945 merupakan hal yang sangat fundamental yang harusnya tetap diakui dan dipertahankan, dikarenakan Pembukaan ini berkaitan sangat erat dengan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 terdapat rumusan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di kenal dengan nama Pancasila.

Kedua, kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kesepakatan didalam melakukan perubahan terhadap UUD 1945 MPR tidak akan merubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan dengan cara tetap mempertahankan rumusan asli dari UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Ketiga, mempertahankan sistem pemerintahan presidensiil. Didalam sistem asli UUD 1945 terdapat makna yang baik dari beragam pasal yang mengatur hubungan diantara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Kementrian Negara serta dari Penjelasan UUD bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem presidensiil. Sistem ini tidak saja dipertahankan tetapi bahkan mendapatkan tempat khusus dan beberapa penguatan. Ciri dari sebuah sistem presidensiil adalah :

1. Terdapat jangka waktu masa kerja eksekutif yang pasti (*fixed term*),
2. Presiden adalah kepala eksekutif,

3. Hubungan diantara eksekutif dan parlemen yang tidak boleh dan dapat saling menjatuhkan.

Keempat, mengambil isi dari Penjelasan didalam Pasal- Pasal UUD. Pada masa sebelum perubahan praktek ketatanegaraan, konstitusi tidak hanya bersumber dari pasal- pasal atau Batang Tubuh UUD 1945, melainkan penjelasan juga menjadi sumber hukum konstitusi. Dimana hubungan diantara pasal- pasal UUD beserta penjelasan terkadang sering terjadi ketidakjelasan baik isi maupun penjelasannya yang menjadi masalah ialah penjelasan merupakan sumber utama. Presiden dan MPR saling memiliki hubungan yang terdapat pada pasal- pasal UUD hanya saja diatur secara singkat yakni bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan cara pemungutan suara yang terbanyak. Oleh karena adanya penjelasan tersebut maka hubungan diantara Presiden dengan MPR membutuhkan banyak sekali aturan yang dituangkan didalam berbagai ketetapan MPR. Berbagai ketetapan itu bukanlah UUD namun pada kenyataannya menjadi sumber hukum konstitusi. Presiden yang berkedudukan sebagai Mandataris MPR, ditetapkan didalam Penjelasan UUD yang mana sistem pertanggung jawaban Presiden dinyatakan juga di dalam Penjelasan. Walaupun telah terlengkapi dengan berbagai penjelasan, tetapi dalam beberapa hal pasal- pasal dan Penjelasan UUD belum sepenuhnya mengatur secara tuntas, akhirnya dapat mengakibatkan menimbulkan beragam serta bermacam penafsiran.

Kelima, perubahan yang dilakukan dengan cara adendum. Pengubahan yang dilakukan oleh MPR seperti perubahan pertama sampai dengan keempat adalah dengan menyebutkan pasal- pasal atau ayat- ayat yang telah dirubah atau telah ditambahkan dengan mencantumkan bunyi pasal- pasal tersebut. Jikalau didalam perubahan tidaklah disebutkan pasal atau ayatnya, dapat diartikan bahwa terhadap pasal atau ayat yang tidak disebutkan tidak dilakukan perubahan atau dipertahankan bunyi asli daripada pasal atau ayat tersebut.⁶⁸

Corwin seorang penulis Amerika mengatakan bahwa konstitusi Amerika tetap hidup dan bertahan bukan dikarenakan sempurnanya konstitusi tersebut, namun karena konstitusi itu hidup ditengah- tengah rakyat Amerika itu sendiri. Konstitusi

⁶⁸*Ibid.*, h. 63- 70.

diInggris pun mengalami hal yang sama, masiakah kita dapat mengatakan bahwa konstitusi harus ideal ? ini tentunya akan memunculkan masalah yang lebih rumit, hal ini tentu akan berkenaan dengan apa yang kita maksud dengan konstitusi Inggris. Oleh karena, tidak adanya sebuah dokumen yang dapat kita jadikan rujukan sebagai konstitusi Inggris. Tidak adanya dokumen tunggal yang dapat di jadikan rujukan sebagai pedoman konstitusi, dapat kita lihat bahwa konstitusi Inggris tidaklah sempurna, sebuah konstitusi dapat sempurna apabila dapat tumbuh dan berkembang didalam masyarakat itu sendiri.

Mekanisme yang terwujud didalam konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sebuah mekanisme formal yang diberikan didalam sebuah konstitusi. Sebagai contoh pelaksanaan demokrasi dapat dituangkan kedalam berbagai ketentuan formal konstitusi. Tetapi, dikarenakan sebuah prosedur politik terwujud di luar prosedur formal, demokrasi yang diinginkan oleh konstitusi didalam praktek, tidaklah terwujud dengan baik. Hal tersebut dapat menimbulkan pemerintahan yang tak demokratis, walaupun hal tersebut tetap konstitusional.

Nazi Hitler dengan pemerintahannya terbangun dari mekanisme demokrasi namun malah menghasilkan pemerintahan fasisme dengan berdasar konstitusi. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai contoh kepada ketentuan UUD 1945 sebelum terdapat perubahan yang menyangkut kelembagaan didalam MPR dimana sebagai lembaga tertinggi negara. MPR mempunyai kedudukan yang sangat inti didalam UUD 1945. Mekanisme konstitusi dapat terwujud prosedur politik yang lebih luas dari prosedur formalnya. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum terjadi perubahan mengatakan bahwasanya kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR.

Kedaulatan rakyat yang dimaksud didalam Pasal ini sesuai dengan ajaran J.J. Rousseau dimana kepada kedaulatan tidak dapat dibagi. Dengan demikian hanya ada satu lembaga yang melakukannya yakni MPR. Selain itu kedaulatan ini memiliki sifat yang tidak ada batasnya dan tidak tunduk terhadap kekuasaan yang lain. John Austin memiliki pendapat yang sama mengenai hal ini. MPR yang menjalankan kedaulatan memiliki dampak yang besar terhadap rakyat dimana jika MPR menjalankannya maka rakyat pun baik langsung maupun tak langsung dapat

melaksanakannya. Didasari berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang paling terbanyak. Oleh karenanya asas kedaulatan rakyat dimana ia dasar dari pemerintahan demokrasi. UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) ditransformasikan agar memberikan legitimasi keinginan dari mayoritas dengan sekehendaknya. Politik dengan praktek yang demikian ini terwujud oleh mekanisme formal yang ada pada UUD sebelum adanya perubahan.

Semua gerakan- gerakan yang mengarah kepada demokrasi atas dasar mayoritas belaka dapat mengancam *rule of law* seperti apa yang telah diperingatkan oleh Roberto Gargarella. Tentunya dengan adanya peringatan tersebut diperlukannya kajian yang lebih mendalam mengenai hal tersebut.

Penjelasan UUD yang berkenaan mengenai sistem pemerintahan negara, bahwa sistem pemerintahan negara yang ditegaskan secara gamblang didalam UUD adalah :

1. Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan atas hukum. Negara Indonesia didasarkan atas hukum bukan didasarkan atas kekuasaan belaka atau biasa kita sebut sebagai *Machstaat*.
2. Sistem Konstitusional. Pemerintahan yang didasarkan atas sistem konstitusi, bukan bersifat absolutisme atau dengan kekuasaan yang tidak terbatas.
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (*Die gezamte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis*). Kedaulatan Rakyat ditampung oleh sebuah badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yakni sebuah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia (*Vertretungsorgan des Willens des Staatvolkes*).

Maksud daripada kutipan diatas ialah membangun sebuah negara yang didasarkan atas hukum serta tidak bersifat absolut, yang memiliki ciri yakni negara bukan hanya berdasarkan kekuasaan belaka.

Para ahli tata negara dimasa lalu secara mendalam mengkaji apa yang dimaksud dengan “negara berdasarkan hukum”, apakah hal ini sama artinya dengan “ negara hukum? “ serta menunjukkan rujukan teori mengenai negara

hukum. Tetapi, terdapat hal penting yang malah tidak terkaji dan dibahas yakni bagaimanakah mekanisme negara hukum dengan cara yang baik ?

Sistem MPR berdasarkan kajian diatas telah menegaskan bahwa yang diatur dalam UUD 1945 dapat melahirkan legitimasi kepada kekuatan mayoritas di MPR sebagai kedaulatan rakyat. Masalah yang belum pernah tersentuh untuk dibahas adalah mungkinkah hasil dari negara hukum dapat lahir dari sebuah sistem supremasi kelembagaan lahir dari sebuah sistem supremasi kelembagaan yang memiliki wewenang tidak hanya terbatas melaksanakan kedaulatan rakyat dengan sepenuhnya ? meskipun dapat terwujud negara hukum didalam sistem tersebut, maka negara hukum seperti apa yang dapat terbentuk ?

UUD 1945 menjelaskan sebagaimana telah dikutip menggunakan kalimat “ sistem pemerintahan negara yang dijelaskan didalam Undang- Undang Dasar tersebut.” Kalimat ini seharusnya didalam UUD 1945 terdapat beberapa pasal yang mengandung refleksi dari sebuah “negara hukum.” Kajian terhadap kandungan pasal UUD 1945 sebelum perubahan tidaklah menjelaskan secara langsung mengenai pasal- pasal hukum.

37 Pasal yang terdapat didalam UUD 1945 yang paling dekat berhubungan dengan sistem negara hukum adalah Pasal 27 dan Pasal 28. Tetapi, ketentuan yang ada pada Pasal 28 UUD 1945 masih membutuhkan penetapan dari undang-undang. Dengan artian undang- undanglah yang akan mengaturnya. Selain itu dalam melaksanakan UUD 1945 dinutuhkan banyak UU organik. Oleh karenanya wujud negara hukum tidaklah di bangun oleh konstitusi itu sendiri melainkan dengan undang- undang pelaksanaanya. Karena pada keyataannya masih perlu banyak undang- undang organik dalam melaksanakan UUD.

Yang diperlukan juga untuk diberi makna adalah “negara tidak didasarkan terhadap kekuasaan belaka.” Pasal- pasal manakah didalam UUD 1945 sebelum adanya perubahan yang merefleksikan bahwa “negara tidak berdasarkan kekuatan belaka?” Penjelasan UUUD 1945 dinyatakan bahwa hal tersebut telah ditegaskan didalam Undang- undang Dasar.

Didalam Penjelasannya “ Sistem Pemerintahan Negara” Angka II, disebutkan bahwa “Sistem Konstitusional,” dan Angka 2 dinyatakan, “ Pemerintahan didasarkan atas sistem Konstitusi, tidak bersifat absolutisme”

Struktur lembaga yang paralel tidaklah dapat meminta pertanggung jawaban dari lembaga lainnya karena masing-masing lembaga tersebut bekerja secara independen, namun tetap berprinsip dengan *checks and balance*. Struktur kekuasaan yang terdesentralisasi juga memiliki masalah koordinasi antar unit politik secara ganda, secara organisasi mandiri, ditanamkan dengan berbagai perspektif dan berbagai misi organisasi, dan diberdayakan *veto* dengan kebijakan yang membangun (Moe dan Caldwell 1994).⁶⁹

Penjelasan sebelumnya diperlukannya ketetapan siapa sebenarnya yang dimaksudkan dengan “ pemerintahan” yang tidak bersifat absolut tersebut. Terdiri atas Pasal 4 sampai dengan pasal 15 dengan intinya, pasal- pasal tersebut diatur kewenangannya Presiden hingganya pemerintahan yang tidak bersifat absolut tersebut adalah miliknya Presiden.

Pasal 3 UUD 1945 menjelaskan, “ Oleh karena Majelis Permusyawaratan Rakyat memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamika masyarakat....” Dari penjelasan tersebut sistem konstitusi dan Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan, adanya ketidak konsistenan dikarenakan kekuasaan MPR dengan artian yang luas, menurut penjelasan Pasal 3 yakni tidak terbatas. Didalam sistem konstitusi pemerintahan dinyatakan tidak bersifat absolut. Pelaksanaannya praktek daripada konstitusi pasti akan lebih menimbulkan kekuasaan MPR yang tidak terbatas ini, dikarenakan UUD tidak menciptakan mekanisme agar menjaga pemerintah tidak bersifat absolut dalam berbagai pasalnya.⁷⁰

⁶⁹ John Gerring, Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry, (American Political Science Review Vol. 99, No. 4 November 2005), h. 280. (Online). Tersedia di <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37958833/apsr2005.pdf>, (di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 18 WIB), Dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁷⁰ Harjono, *Op. Cit*, h. 51- 60

Didalam sejarah konstitusi Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan atas UUD 45. Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 telah terjadi perubahan atas UUD negara Indonesia yaitu :

1. Undang- Undang Dasar 1945 sejak 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949.
2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
3. Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesia sejak 1950 yakni 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959.
4. Undang- Undang Dasar 1945 yakni sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999.
5. Undang- undang Dasar 1945 dan Perubahan I sejak 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus 2000.
6. Undang- undang Dasar 1945 dan Perubahan I dan II sejak 18 Agustus 2000 sampai dengan 9 Nopember 2001.
7. Undang- undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III sejak 9 Nopember 2001 sampai dengan 10 Agustus 2002.
8. Undang- undang Dasar 1945 dan Perubahan I, II, III dan IV yakni pada 10 Agustus 2002.⁷¹

Konstitusi dapat dipahami sebagai sumber didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi mempunyai kaitan yang cukup erat dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah negara. A. Hamid S. Attamimi memiliki pendapat bahwa konstitusi diciptakan atas Undang- Undang Dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Mr. Djokosutono mendapat pentingnya konstitusi (*grondwet*) dari dua segi. Pertama, dari segi isi (*naar de inhoud*) karena konstitusi memuat dasar (*grondslagen*) dari struktur (*inrichting*) dan memuat fungsi (*administratie*) negara, Kedua, dari segi bentuk (*naar de maker*) dikarenakan yang membuat konstitusi bukan sembarangan orang atau lembaga. A.G. Pringgodigdo menyatakan pendapat

⁷¹ A. Ubaedillah, *Op. Cit.*, h. 74- 75.

bahwa adanya ke empat unsur pembentukan negara belum cukup terjamin terlaksananya fungsi kenegaraan pada suatu bangsa jikalau belum ada hukum hukum dasar yang mengaturnya. Yang dimaksud dengan hukum dasar adalah konstitusi atau Undang- Undang Dasar. Keberadaaan konstitusi atau Undang- Undang Dasar didalam kehidupan yang sangat penting dikarenakan ia telah menjadi acuan dan penentu arah dalam penyelenggaraan negara.

Media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara ialah Konstitusi. Negara yang memilih demokrasi agar sebagai pilihannya, oleh karena konstitusi demokrasi adalah aturan yang dapat menjamin terciptanya demokrasi di negara tersebut hingganya dapat melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kedemokratisan didalam sebuah kekuasaan didalam menjalankan prinsip- prinsip demokrasi perlunya untuk diawasi oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dimaksudkan nilai- nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak diselewengkan, oleh karena partisipasi warga negara dalam meyuarkan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk ikut berpartisipasi dan mengawal proses demokrasi didalam sebuah negara.

Konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokrasi wajibnya memiliki prinsip dasar demokrasi wajibnya mempunyai prinsip- prinsip dasar demokras. Konstitusi dapat dikatakan demokratis mempunyai prinsip- prinsip dasar demokrasi didalam kehidupan bernegara yakni:

1. Warga negara ditetapkan sebagai sumber utama kedaulatan.
2. Berkuasanya mayoritas dan terjaminnya hak minoritas.
3. Jaminan adanya penghargaan terhadap hak- hak individu warga negara serta penduduk negara hingganya dengan demikian entitas kolektif, tidak dengan sendirinya dapat menghilangkan hak- hak dasar tiap orang.
4. Pemerintahan yang dibatasi.
5. Jaminan adanya keterlibatan keutuhan negara nasional dan integritas wilayah.
6. Jaminan adanya keterlibatan rakyat didalam proses bernegara melauai pemilihan umum yang bebas.
7. Jaminan adanya berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen (mandiri).

8. Pembatasan dan pemisahan kekuasaan negara yang diliputi oleh:

- a. Pemisahan kewenangan kekuasaan berdasarkan trias politika.
- b. Kontrol dan keseimbangan lembaga- lembaga pemerintahan.

Dapat disimpulkan tatanan dan praktek kehidupan kenegaraan mereflesikan suasana yang demokratis jikalau konstitusi atau Undang- Undang Dasar negara tersebut mengandung rumusan mengenai pengelolaan kenegaraan yang secara demokratis dan pengakuan mengenai hak asasi manusia dengan cara memadai. Oleh karena konstitusi menjadi penyokong yang sangat penting untuk sebuah negara demokrasi. Konstitusi dapat terjadi keterikatan yang berarti bagi penyelenggaraan negara serta warga negara untuk terbentuknya negara demokrasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Dadang Juliantara adalah negara yang diindikasikan oleh: terdapat pemilu yang terbuka, tidak diskriminatif (membedakan) dan tidak melakukan intimidasi (ancaman) dan manipulasi, kemudian adanya kapasitas kritis dan kapasitas yang partisipatif aktif dari rakyat, sistem hukum yang memberikan ketegasan serta memihak kepada keadilan, terdapat mekanisme kontrol yang jelas dan terlindungi dengan baik yang dilakukan parlemen maupun dengan kontrol langsung oleh rakyat, Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang tidak saja menjadi bagian didalam hukum positif tetapi telah terintegrasi didalam penyelenggaraan kehidupan beregara.⁷²

C. Bentuk Penerapan Demokrasi di Indonesia

Pemerintahan dikatakan demokratis apabila didalam mekanisme penyelenggaraannya melaksanakan prinsip demokrasi. Prinsip dasar demokrasi itu adalah persamaan, kebebasan, dan pluralisme (keberagaman). Robert A. Dahl memiliki pandangan terdapat tujuh prinsip yang harus ada didalam sistem demokrasi yakni :

1. Keputusan pemerintah yang terkontrol.
2. Pemilihan umum yang jujur.
3. Hak memilih.
4. Hak dipilih.

⁷² *Ibid.*, h. 76- 77.

5. Menyatakan pendapat dengan bebas dan tanpa ancaman
6. Mengakses informasi secara bebas.
7. Kebebasan berserikat.

Demokrasi tidak hanya sekedar wacana yang mengandung prinsip tersebut ia memiliki sebuah ukuran apakah suatu negara atau pemerintahan bisa dinyatakan demokratis atau sebaliknya. Setidaknya terdapat tiga aspek yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengukur sejauh mana demokrasi itu dapat berjalan dalam suatu negara. Ketiga aspek tersebut adalah :

1. Pemilihan umum sebagai proses pemebentukan pemerintah. Hingga saat ini pemilihan umum diyakini oleh banyak ahli demokrasi sebagai salah satu instrumen penting dalam proses pergantian pemerintahan.
2. Susunan kekuasaan negara, yakni kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan atau satu tangan atau satu wilayah.
3. Kontrol rakyat, yaitu suatu relasi kuasa yang berjalan secara simetris, memiliki sambungan yang jelas, dan adanya mekanisme yang memungkinkan kontrol dan keseimbangan (check and balance) terhadap kekuasaan yang dijalankan eksekutif dan legislatif .

Ukuran demokrasi juga bisa diketahui melalui adanya unsur- unsur sebagai berikut :

1. Hak dan kewajiban politik akan dapat dinikmati dan dilaksanakan oleh warga negara didasarkan pada berbagai prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan, dan rasa kemerdekaan.
2. Hukum ditegakkan dengan berasaskan prinsip *supremacy of law* (supremasi hukum), *equality before the law* (kesamaan di depan hukum), dan jaminan terhadap HAM.
3. Persamaan dalam hak dan kewajiban anggota masyarakat.
4. Bebasnya dalam hal pers dan pers yang bertanggung jawab.
5. Diakuinya terhadap hak minoritas.

6. Kebijakan negara dibuat dengan berlandaskan pada asas pelayanan, pemberdayaan, dan pencerdasan.
7. Kooperatif dan kolaboratif dalam hal sistem kerja.
8. Keseimbangan dan keharmonisan.
9. Sebagai kekuatan pertahanan menggunakan tentara yang profesional.
10. Lembaga peradilan yang independen (Mandiri).⁷³

Berperannya agama khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia yang sangat strategis untuk proses tranfromasi dan substansialisasi demokrasi di Indonesia. Berhasilnya Indonesia dalam melaksanakan beberapa kali pemilihan umum dengan multipartai secara bebas dan aman adalah pertanda berhasilnya peran agama didalam proses peralihan dan internalisasi demokrasi di Indonesia.

Politik berlandaskan hukum harus dilandasi nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu:

- (a) Didasarkan pada moral agama.
- (b) Dihargai dan dilindunginya hak-hak asasi manusia tanpa adanya dibeda-bedakan.
- (c) Dipersatukannya seluruh unsur bangsa.
- (d) Meletakkan kekuasaan penguasa di bawah kekuasaan rakyat.
- (e) membangun keadilan sosial.

Politik hukum nasional harus dilandasi oleh keharusan untuk:

- (a) melindungi semua elemen bangsa demi hubungan atau keutuhan bangsa yang meliputi ideologi dan wilayah bangsa.
- (b) mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan.
- (c) mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum).
- (d) menciptakan toleransi dalam hidup beragama yang esuai dengan adab dan kemanusiaan.

⁷³ A. Ubaedillah, *Pancasila : Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015), h.94- 95.

Untuk meraih tujuan dengan landasan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum dengan mengambil unsur-unsur baiknya.⁷⁴

Indonesia dalam kesuksesannya didalam berdemokrasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari karakter ideologi negara Pancasila yang fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan politik global dimana demokrasi telah menjadi rancangan dan prosedur utamanya. sumbangsih Islam dan Pancasila terhadap proses demokratisasi dalam sepanjang era Reformasi telah berbuah positif terhadap posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara Muslim paling demokratis dimana Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dari India.

RUU telah disahkan mengenai Pendidikan Nasional, telah disahkan RUU oleh Peradilan Agama, diperbolehkannya pemakaian jilbab untuk siswi Muslim di sekolah umum, munculnya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta lahirnya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila langsung dipimpin Presiden Soeharto ialah indikator hubungan akomodatif dilakukan oleh elite penguasa. Hubungan dengan pola yang saling menguntungkan diantara pemerintahan Presiden Soeharto dan kekuatan Islam masihlah berlanjut hingga pada akhir kekuasaan Orde Baru yang dijatuhkan oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Kejatuhan pemerintah Presiden Soeharto tidak dapat dilepaskan dari daya kritis kekuatan umat Islam. Berbagai elemen kekuatan sipil Islam ikut andil didalam mengkritisi kebijakan pemerintahan Orde Baru yang dinilai penuh dengan praktik korupsi dan nepotisme.⁷⁵

Di dalam demokrasi individualistik atau hanya memikirkan diri sendiri maupun golongan sendiri merupakan hal yang tidak boleh terjadi, dengan kita memikirkan kepentingan pribadi maka kita tidak akan pernah tercapainya sebuah bangsa yang di cita- citakan. Di zaman ini sudah banyak generasi penerus yang

⁷⁴ Siti Mahmudah, Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD), (Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), h. 408. (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433, (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 17), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 157- 158.

sangat mementingkan dirinya sendiri bisa kita lihat bagaimana mereka merusak bangsanya secara perlahan- lahan dengan melakukan korupsi secara berjamaah, merongrong kedaulatan dengan mengatsnamakan golongan tertentu, tidak partisipatif dalam setiap kegiatan kenegaraan. Bibit- bibit inilah yang akan menggiring kita menuju jurang demokrasi.⁷⁶



⁷⁶ Michael Zurn, *Democratic Governance Beyond The Nation State* ?, (InIIS-Arbeitspapier Vol. 12 No.98 Juli 2001), h. 23- 24. (Online). Tersedia di [https://pdfs. Semantic scholar.org /d3ca/ 6d804491e6 e01fbd e333b 82ad83e92b520fd.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/d3ca/6d804491e6e01fbd_e333b82ad83e92b520fd.pdf), (di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 09 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB IV

AJARAN DAN PENERAPAN DEMOKRASI DI INDONESIA DALAM PANDANGAN MAQASHID AL- SYARI'AH

Indonesia adalah negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam terbesar di dunia. Namun, dibalik itu semua Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Dari pola hubungan Islam dan negara di Indonesia jika terjadi pergerakan maka pasti akan terjadi gesekan, nah hal ini pula yang menyebabkan perdebatan politik yang tidak kunjung selesai. Perdebatan soal pola hubungan islam dan negara ini (demokrasi) telah muncul dihadapan publik sebelum indonesia merdeka.

Hukum yang mendasari kebebasan beragama di Indonesia ada di dalam Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945, dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya baik itu agama Hindu, Budha, Kristen, maupun Islam. Bila dipahami, maka dapat diartikan bahwa kebebasan beragama bukan hanya sekedar bebas dalam hal peribadatan tetapi juga dapat mewujudkan situasi dimana bebas dari segala hambatan dan masalah seperti contoh banyaknya warga yang beragama di Indonesia tetapi tidak saling dapat menghargai dan mentolerir satu sama lain padahal di dalam tiap- tiap agama pasti mengajarkan tentang persatuan dan kesatuan apalagi mengenai toleransiantar umat beragama, saya yakin pasti tidak ada agama yang mengajarkan tentang perpecahan dan permusuhan satu sama lain. Oleh karena itu harus ada pengajaran (pembinaan) yang sangat baik dari masing- masing pemuka agama ataupun penganut agama tersebut agar tercipta Indonesia yang mencerminkan sikap dari keberagaman agama yang baik tidak yang seperti kita kenal sekarang.⁷⁷

⁷⁷ Mentary Meidiana, Menguatkan Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa, (UGM, VoL. 3 No. 1, Desember 2017), h. 35. (Online). Tersedia di <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921> (diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 15), dapat dipertanggung jwabkan secara ilmiah.

Islam dan nasionalisme di Indonesia acapkali terjadi perdebatan diantara tokoh nasionalis Muslim dan nasionalis sekuler yakni pada tahun 1920-an yang merupakan awal babak terjadinya pergesekan diantara agama Islam dengan negara Indonesia dalam kurun waktu setelahnya. Kajian mengenai Islam serta karakteristik nasionalisme Indonesia beredar luas surat kabar pergerakan nasional dalam waktu tersebut, mengenai pandangan serta paham sekuler yang diajarkan dalam golongan tokoh nasional sekuler. Islam dan nasionalisme tak pernah luput dari perdebatan serta konsep negara sekuler telah terwakili dari setiap tokoh Muslim Mohammad Natsir dan Soekarno yang berasal dari kelompok nasionalis sekuler.

Islam dengan berbagai konsep Ideologi sekuler tak lepas dari perdebatannya pada akhirnya telah menemukan titik puncaknya yaitu pada persidangan resmi didalam setiap sidang majelis Badan Penyelidik Usaha- Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau lebih sering disebut BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang pada tahun 1945. Dengan para tokoh nasionalis Muslim seperti H. Agus Salim, K.H. Mas Mansur, dan K.H. Wachid Hasyim, menyatakan suara aspirasi Islam dengan mengajukan usul konsep negara Islam dan menjadikan Islam sebagai dasar negara untuk Indonesia. Saran untuk menjadikan Islam sebagai konsep negara berasal dari kelompok nasionalis Muslim didasarkan pada alasan sosiologis bahwa bangsa Indonesia dengan mayoritas pemeluk Islam sebagai agama.

Hubungan Islam dan negara setelah merdeka berda dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno akhirnya mengalami perseteruan. Ketegangan itu bersumber daripada pedebatan berkaitan dengan tafsir dari Sila Pertama Pancasila yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.”” kerasnya perdebatan tersebut berakhir dengan kesepakatan yang berasal dari kalangan tokoh nasional bahwa NKRI adalah bukan negara agama yakni Islam serta juga bukan negara sekuler.

Pergumulan Islam dan negara di Indonesia adalah sebagai berikut, Pada kurun waktu antara 1950- 1959 yakni ketika Indonesia menjalankan prinsip Demokrasi Parlementerntya, perdebatan anatara Islam dan negara terulang kembali didalam

bentuk perdebatan yang sengit diantara kelompok partai politik Islam, yaitu Partai Masyumi dan Partai NU berseteru dengan partai politik sekuler. Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Nasionalis Indonesia (PNI), dan lainnya. Pertenggaran ideologis Islam melawan ideologi sekuler terjadi kembali didalam persidangan Konstituante hasil Pemilu demokratis yang pertama pada tahun 1955.

Pada tahun 1955 adanya pemilu yang dinilai banyak sejawaran dan politikus sebagai Pemilu yang paling demokratis didalam sejarah politik nasional indonesia yang telah menjamin terwujudnya konstitusi dengan baik. Walaupun Majelis Konstituante sedikit lagi menyelesaikan tugas konstitusionalnya, Politik yang tidak stabil serta ancaman dari disintegrasi oleh Presiden Soekarno dianggap sebagai akibat langsung dari Demokrasi Parlementer yang telah diadopsi dari Barat. Demokrasi ala Barat menurut Soekarno tidaklah sesuai dengan politik di Indonesia. Perdebatan sengit diantara partai- partai politik harus diakhiri dengan diberlakukannya kembali UUD NRI 1945 dibawah sistem Demokrasi Terpimpin (*Guided Democracy*) dengan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno sejak saat itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas atau bahkan disebutkan sebagai presiden dengan masa jabatan seumur hidup.⁷⁸

Di Indonesia peran agama diIndonesia sangatlah penting dan strategis untuk transformasi demokrasi dimasa ini. Islam dapat berperan untuk mencegah adanya ancaman disintegrasi bangsa, selama pemeluknya dapat bersifat inklusif dan toleran kepada pluralitas diIndonesia. Jika ummat Islam dapat bersikap eksklusif dan cenderung memaksakan kehendak dan beralasan bahwa mereka adalah penduduk mayoritas maka bukan mustahil jika kemayoritasan ummat islam lebih akan berpotensi sebagai ancaman disintegrasi (ancaman) dibandingkan dengan kekuatan integratif bangsa.

Negara memiliki potensi sebagai pondasi daripada proses demokrasi yang telah menjadikan dirinya sebagai tuntutan global dimasa ini. Tetapi, disisi lain negara pun berpotensi dapat menjadi ancaman untuk proses demokrasi jikalau tampil sebagai kekuatan represif serta mendominasi dari segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya kekuatan demokrasi yang diinginkan oleh

⁷⁸ A. Ubaedillah, *Op. Cit.*, 152- 154.

berbagai kalangan masyarakat di Indonesia, seperti contoh LSM, Ormas sosial keagamaan, Partai Politik, mahasiswa, pers, asosiasi profesi dan lain sebagainya, yang harus dapat disikapi oleh negara dengan cara demokratis dan terbuka selama tidak mengancam bangsa dan keutuhan Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pola hubungan yang dinamis diantara agama dan negara di Indonesia, kedua komponen di Indonesia tersebut seharusnya mengutamakan cara dialogis jika terjadi perselisihan diantara kelompok masyarakat sipil dengan negara. Dengan maksud untuk menopang adanya proses demokratisasi negara dijadikan sebagai komponen penting di dalamnya haruslah menyediakan fasilitas demokrasi seperti contoh kebebasan pers, kebebasan berorganisasi, kebebasan berbicara serta mengeluarkan pendapat dan peningkatan fasilitas umum serta kawasan publik bebas (*Free Public Sphere*) untuk beragam pendapat warga negara.

Unsur- unsur masyarakat sipil disaat yang bersamaan diatas dituntut untuk bertanggung jawab didalam menggunakan hak- hak kebebasannya secara baik dan beradab. Dalam berdemokrasi diperlukannya perilaku santun diwujudkan dengan melalui sikap menghindarkan diri dari tindakan main hakim sendiri terlebih mengatasnamakan agama, kelompok, maupun partai politik tertentu, hanya untuk memakasakan kehendaknya dengan nama individu maupun kelompok lain. Dengan tuntutan kedewasaan dapat mengungkap opini dari kalangan komunitas agama, peranan pers dan kelompok intelektual (Pelajar, mahasiswa, ormas, dan orpol) didalam menyatakan pendapat publik dengan cara santun, seimbang dan jujur adalah sebuah hal mutlak dalam praktik berdemokrasi.

Main hakim sendiri berlawanan dengan prinsip demokras lebih mengedepankan cara musyawarah dan menyerahkan segala sengketa hukum antar warganegara ataupun antara warganegara dari negara kepada lembaga hukum. Mengancam atau merusak fasilitas umum didalam mengeluarkan pendapat terlebih tergantikannya aparat penegak hukum serta melakukan tindakan teror kepada aparat hukum didalam upaya mencari keadilan, yang sama sekali bertentangan dengan semangat penegakan demokrasi serta keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Dapat disimpulkan bahawa negara dan agama lewat kekuatan dari masyarakatnya ialah dua komponen utama didalam proses mewujudkan demokrasi di Indonesia. Membangun demokrasi adalah proses membangun kepercayaan dalam sesama warga negara dan antara warga negara dan negara. Para pendiri bangsa Indonesia mencita- citakan negara demokrasi adalah bukan sekedar kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Seperti diyakini oleh pemeluknya agama banyak memberikan ajaran moral mengenai tanggung jawab individu serta sosial.

Sebuah negara dihadirkan untuk merupakan suatu yang tidak dapat dihindari, Negara dapat diartikan sebagai organisasi tertinggi dalam kelompok masyarakat yang memiliki cita- cita untuk bersatu dan hidup dalam satu kawasan, serta memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sebuah masyarakat yang mempunyai beragam kepentingan untuk terciptanya sebuah harmoni sosial. Negara dicirikan dengan kewenangannya agar memaksa yang membatasi penggunaannya dengan hukum agar proses pelaksanaannya ketertiban sosial dapat berjalan dengan baik.

Menurut kebanyakan konsepsi didalam islam ahli politik islam modern menyatakan, tidak ditemukannya rumusan pasti mengenai konsep negara. Dua sumber didalam islam yakni Al- Qur'an dan As- Sunnah secara tersurat tidak mendefinisikan model negara dalam islam. Walaupun Islam mengajarkan banyak nilai dan etika seharusnya bagaimana negara itu dibangun.

Perlu mendapat perhatian ialah bagaimana agama itu memiliki hubungan dengan persoalan negara. Model Sekularisasi yang digunakan di Eropa dan Amerika tentu belum sesuai didalam konteks Indonesia, hanya saja karena terdapat alasan sejarah yang berbeda tetapi kultur dan prefensi masyarakat Indonesia yang memiliki perbedaan. Indonesia ialah negara yang secara konstitusional bukan negara islam ataupun negara agama, tetapi tidak dapat disangkal bahwa sejak berdirinya sampai saat ini agama khususnya Islam mempunyai andil dan peran penting didalam membentuk karakter Indonesia sebagai negara bangsa.

Agama dan negara di Indonesia memiliki hubungan lebih mengarah pada asas keseimbangan yang dinamis antara sekulerisme dan teokrasi. Dinamisnya

keseimbangan adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik, Tetapi masing- masing dapat saling mengisi. Dapat dikatakan pola hubungan agama dan negara di Indonesia mengisi yang sering di sebut dengan banyak kalangan sebagai hubungan mutualisme- simbiotik.

Posisi warga negara kepada negara tidaklah posisi yang berada di bawah negara yang harus selalu untuk tunduk. Wewenang warga negara memiliki peranan penting dalam daya tawar kepada negara agar selalu dan terus mengontrol proses pelaksanaan negara untuk tetap sesuai dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku. Dengan melalui pemilihan umum dan kebebasan berserikat dan berpendapat warga negara dijamin secara hukum agar dapat mengoreksi dan mengawasi jalannya pemerintahan untuk tetap berpihak pada kepentingan publik bukan individu maupun kelompok tertentu. Peran penting yang melekat dengan warga negara ialah usahanya untuk selalu menjadi kontrol didalam setiap proses pelaksanaan negara untuk tetap konsisten terhadap tujuan utama berdirinya sebuah negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁷⁹

Pancasila merupakan dasar negara paling netral terhadap kenekaragaman dan pluralisme di Indonesia. Nurcholish Madjid seorang tokoh sekuler Indonesia mengatakan bahwasanya Indonesia bukanlah negara teokratis , bukan pula negara sekuler Indonesia adalah negara dengan Pancasila sebagai landasannya. Seluruh sila yang terdapat pada Pancasila sekarang ini sudah sangat baik dalam memahami keragaman tersebut, terutama pasal 1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Yang sebelum tercetus sila pertama “Ketuhanan dengan ketetapan tertentu kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” kemudian diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, karena para cendekiawan muslim pada saat itu menghargai kemajemukan yang ada di Indonesia dengan tidak menggunakan kalimat “Syari’at Islam bagi pemeluknya”. Lewat perubahan kata- kata di dalam sila pertama telah mengajarkan kita untuk saling menerima dalam perbedaan. Di dalam kemajemukan kita disatukan oleh nilai- nilai berbangsa dan bertanag air

⁷⁹ Komarudin Hidayat, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidaytullah, 2006), h. 53- 55.

yang telah dirumuskan lewat kelima sila. Yang menjadi acuan dan dasar negara Indonesia yang kemudian di kita adopsi menjadi sebuah sistem Demokrasi.⁸⁰

Umat Islam tidak lagi mempersoalkan Pancasila. Keselarasan Pancasila dan ajaran Islam merupakan bagian dari dinamika sejarah yang unik. Justru karena itulah penerimaan terhadap Pancasila menjadikan Indonesia mampu merawat dan mengelola kemajemukan yang ada secara baik.

Menurut Ibnu Khaldun, ada dua bentuk negara hukum yaitu:

- (1) *siyâsah dîniyah*, yang diterjemahkan Muhammad Taher Azhari sebagai nomokrasi Islam.
- (2) *siyâsah 'aqliyah* sebagai nomokrasi sekuler.

Sedangkan, Indonesia sendiri menganut siyasah diniyah yang mana antar pancasila dan agama adalah dua unsur yang saling berkaitan dan tidak dapat di pisahkan antar satu sama lain. Mereka saling melengkapi, pancasila dengan kerationalan berfikir untuk membentuk sebuah negara dan pemerintahan. Sedangkan, agama adalah penyeimbang dan membuat keselarasan dengan moral dan nilai-nilai religiusitas.⁸¹

Pengaplikasian hukum Islam di Indonesia dapat dilaksanakan melalui dua cara. Pertama, dengan cara iman dan takwa. Artinya, rakyat yang beragama Islam melaksanakan hukum Islam secara individu sesuai dengan kualitas keimanan dan ketakwaan masing-masing individu. Pengaplikasian hukum Islam melalui cara ini dijamin oleh negara sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kemudian cara yang kedua, melalui undang-undang dalam berbagai undang-undang dan peraturan yang berasal dari pemerintah lainnya. Penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan dan perundangan-undangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua model, yaitu pertama, penetrasi⁸² hukum Islam ke dalam

⁸⁰ Ngainum Naim, Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid, (Epistémé, Vol. 10 No. 2, Desember 2015), h. 448- 449. (Online). Tersedia di <http://journal.iain.tulungagung.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921>, (diakses pada tanggal 02 Juni, pukul 2019 21: 20 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁸¹ Zuhraeni, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila, (Al- 'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014), h. 173. (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182/422, (diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 21:20), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁸² Menurut kamus Tesaurus Bahasa Indonesia Penetrasi adalah intrusi, penembusan, penerobosan dan perembesan.

peraturan perundangan secara isi daripada undang- undang tersebut dan tidak dinyatakan secara gamblang sebagai hukum Islam.

Banyak contoh peraturan perundangan secara substantif dan tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hukum Islam, misalnya UU No. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang banyak mengambil hukum Islam secara isi. Ada lagi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. PP No. 70 dan No.72/1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Model kedua, secara gamblang penetrasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang- undangan yang dinyatakan sebagai hukum Islam. Melalui jalur ini banyak sekali hukum Islam yang telah di penetrasi oleh negara, antara lain UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, UU No. 38 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁸³

Sejumlah prinsip yang terjaga dan di perhatikan Pembuat hukum syara' sewaktu membangun norma penetapan hukum Islam. Prinsip- prinsip itulah yang dapat menimbulkan efek langsung untuk setiap individu dalam segi kepuasan, implementasi, dan kemudahan penerapan *nash- nash* ketentuan hukum yang berasal dari Pembuat hukum syara'. Prinsip- prinsip ini kuat dan tertanam didalam diri setiap individu akan menambah semakin kuat pulalah asas- asas yang dijadikan landasan ketetapan hukum syara' itu. Prinsip- prinsip inilah yang pada umumnya diatur oleh norma- norma akhlak atau moralitas dan yang memberikan efek secara langsung didalam norma- norma keimanan atau yang dipegang teguh setiap manusia yaitu keimanan terhadap Allah, Pemilik Ketetapan Hukum di dalam Islam.

⁸³ Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai- Nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), (Al- 'Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013), h. 253- 254. (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433 (diakses pada tanggal 02 juni, pukul 21: 20 WIB), dapat dipertanngung jawabkan secara ilmiah.

1. Prinsip Pertama: Persaudaraan

Dalam agama persaudaraan yang dimaksud ialah persaudaraan Islam dan ini merupakan bentuk persaudaraan yang khusus. Persaudaraan umum ialah persaudaraan secara kebangsaan yakni berkumpulnya orang- orang muslim dan nonmuslim dalam sebuah negara untuk dapat hidup bersama dengan prinsip persaudaraan kemanusiaan secara umum didalam bingkai kasih dan saling tolong menolong dalam bawah panji norma dan ketentuan syariat islam umum serta seluruhnya yang tunduk dari segi hak dan kewajiban. Tiada perbedaan antara muslim dan nonmuslim, dikecualikan terhadap bidang khusus yang dinilai oleh syariat Islam berkaitan dengan akidah nonmuslim. Hingganya ditinggalkanlah segala ketentuan tersebut untuknya akibat i'tikad dan kepercayaannya. Nonmuslim maupun muslim mempunyai status yang sama dihadapan *nash- nash syara'*.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “ *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki- laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku- suku supaya kamu saling kenal- mengenal*” (QS. al- Hujurat: 13)

2. Prinsip Kedua: Anti Diskriminasi Kelas

Islam didalam syariatnya tidaklah mengenal tingkatan sosial didalam kehidupannya. kaya dan miskin ialah dua kehidupan yang terdapat pada tiap tatanan sosial. Hingganya Pembuat hukum Syara' tidaklah mengakui aturan sosial yang berdasarkan status sosial. Tiada yang lebih penting di antara mereka didalam tingkatan ini. Tetapi, tingkat kemuliaan ditetapkan kepada Allah, takwa, amal saleh bagi dirinya dan masyarakat.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya : “ *Sesungguhnya orang- orang yang beriman ini hanyalah orang- orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul- Nya, kemudian mereka tidak ragu- ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang- orang yang benar*” (Q.S. al- Hujurat: 15)

3. Prinsip Ketiga: Mendekatkan si Kaya dan si Miskin

Tingkat ekonomi yang berbeda antar manusia adalah suatu keniscayaan. Ketidaksamaan tersebut melingkupi dalam hal kemampuan intelektualitas, materi, serta kemungkinan untuk memperoleh penghasilan, kekuasaan, dan tugas- tugas sosial.

Syariat Islam berupaya mengatasi kemiskinan dengan meminimalisir faktor penyebabnya hingga dapat memaksimalkan jurang pemisah diantara kaya dan miskin lewat berbagai sarana diantaranya ialah ikhtiar dan upaya dalam memperoleh penghasilan, memuliakan hasil pekerjaan tangan, ancaman kepada penumpukan harta golongan tertentu, pemenuhan nazar, dan pelaksanaan *kaffarah*.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: “ *Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki- Nya.* (QS. al- Mulk: 15)

4. Prinsip Keempat: Solidaritas Sosial

Islam telah mewajibkan beragam bentuk dan cara solidaritas sosial dalam memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan meringankan kemiskinan dari orang yang kekurangan. Syari’ah Islam telah menetapkan sebuah hak bagi kaum yang lemah ini di dalam harta kekayaan orang- orang kaya yang di ambil dengan kekuatan hukum. Allah berfirman ciri khusus dari orang yang beriman:

لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya : “ *Yang mereka itu tetap mengerjakan shalatnya. Dan orang- orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa- apa (yan tidak mau meminta).*” (QS. al- Ma’arij: 24- 25)

5. Prinsip Kelima: Solidaritas dalam Tanggung Jawab

Didalam islam sangatlah menjaga didalam menjalankan prinsip ini dengan baik oleh sebab ia merupakan prinsip yang sangat utama dalam membangun rasa persaudaraan didalam individu untuk sebuah komunitas sosial yang utuh. Mengandaikan kebersamaan didalam prinsip ini untuk memiliki tanggung jawab didalam bentuk solidaritas praktis yang dapat mendorong terciptanya solidaritas yang sempurna diantara individu masyarakat secara menyeluruh hingga dapat mengantisipasi seorang dari komunitas sosial yang jatuh kedalam pelanggaran atau kelainan hak- hak sosial dan keagamaan serta stabilitas wilayahnya.

Tanggung jawab ini direalisasikan didalam bentuk kewajiban didalam individu masyarakat yakni kewajiban amar ma'ruf nahi munkar dapat disebut sebagai pertahanan syar'i, agar membedakan dengan pertahan syar'i khusus. Terkait dengan pertahanan Syar'i umum, Allah swt., berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang meyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang- orang yang beruntung.” (QS. al-Imran: 104)

6. Prinsip Keenam: Pemulihan Kekayaan untuk Kesejahteraan Sosial

Syari'at Islam terkait prinsip ini mewajibkan pemilik kekayaan untuk selalu memanfaatkan harta kekayaannya terhadap hal- hal yang mendatangkan kebaikan bagi diri pribadi dan masyarakat.

لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيَكْفُرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Demikianlah balasan orang-orang yang berbuat baik, agar Allah menutupi (mengampuni) perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan” (QS. al- Zumar: 34- 35)⁸⁴

⁸⁴ Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 240-254.

Demokrasi Pancasila memiliki nilai kebangsaan yang lahir dari pada kelima sila Pancasila yaitu :

1. Nilai religiusitas, yaitu nilai spritual yang tinggi harus dimiliki masyarakat diIndonesia dengan didasarkan agama dan keyakinan yang di peluknya serta memiliki toleransi yang tinggi kepada pemeluk agama serta keyakinan lain yang ada dan diakui di Indonesia. Ini merupakan konskuensi dari ketuhanan yang maha esa untuk mengajak seluruh komponen bangsa agar beragama dan berkeyakinan secara kebudayaan.
2. Nilai kekeluargaan, terkandung nilai kebersamaan dan senasib serta sepenangungan diantara sesama warga negara tanpa membedakan asal usul agama dan keyakinan, latar belakang sosial, dan politik seseorang.
3. Nilai keselarasan, mempunyai kemampuan dalam beradaptasi dan keinginan untuk memahami dan menerima budaya serta kearifan lokal sebagai perwujudan dari nilai kemajemukan diIndonesia.
4. Nilai kerakyatan, mempunyai sifat dan komitmen dalam berpihak terhadap kepentingan rakyat dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan kebijakan publik, sebagai refleksi dari prinsip kedaulatan rakyat dan bangsa yang berdaulat.
5. Nilai Keadilan, mempunyai kemampuan dalam menegakkan dan berbuat adil terhadap sesama manusia dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁸⁵

Dari penjabaran diatas bahwasanya nilai Demokrasi Pancasila sesuai dengan bagaimana pembuatan hukum syara' memperhatikan kemashlahatan ummat. Tidaklah jauh berbeda dengan nilai- nilai di dalam Demokrasi Pancasila yang mengutamakan kebaikan untuk warga negara dan masyarakat Indonesia.

Di dalam maqashid al- Syari'ah terdapat 5 dasar kemashlahatan di dalamnya yang masing- masing merupakan pondasi dasar daripada Maqashid al- Syari'ah.

1. Menjaga agama (Hifdz al- Din).
2. Menjaga jiwa (Hifdz al- Nafs).
3. Menjaga akal (Hifdz al- 'Aql).

⁸⁵ A. Ubaedillah, *Op Cit*, h. 52.

4. Menjaga harta (Hifdz al- Mal).
5. Menjaga keturunan (Hifdz al- Nasl).

Sedangkan di dalam pilar- pilar demokrasi sebagai indikator umum sebuah pemerintahan demokrasi konstitusional. Pakar politik J. Kristiadi menyebutkan sepuluh pilar demokrasi sebagai berikut:

1. Kedaulatan rakyat.
2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan yang diperintah.
3. Kekuasaan mayoritas (hasil pemilu).
4. Jaminan hak- hak minoritas.
5. Jaminan hak- hak asasi manusia.
6. Persamaan di depan hukum.
7. Proses hukum yang berkeadilan.
8. Pembatasan kekuasaan pemerintah melalui konstitusi.
9. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
10. Dikembangkannya nilai- nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.⁸⁶

Dari semua pilar- pilar demokrasi tidak ada hal yang bertentangan dengan maqashid al- syari'ah baik dari segi menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, serta menjaga keturunan.

Nah, seperti kita lihat bersama dari unsur- unsur maqashid syariah yang mana mencakupi kemashlahatan untuk ummat islam telah tepenuhi semua lewat Sistem demokrasi di Indonesia yang tercermin dengan banyaknya perundang- undangan yang memasukkan nilai- nilai islam di dalamnya.

Unsur pertama dari maqashid al- syari'ah ialah menjaga agama di dalam UUD 19945 NRI telah dijamin kebebasan kita dalam beragama. Hal ini termaktub didalam pasal 29 ayat (1) dan (2) dan pasal 28E ayat (1) sebagaimana pasal tersebut berbunyi :

Pasal 29

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁸⁶ Ibid., h. 86.

- (2) *Negara menjamin kemerdekaan tiap- tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing- masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*⁸⁷

Pasal 28E

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*⁸⁸

Di dalam pilar demokrasi pun hak- hak kita untuk menjaga agama pun tercermin lewat pilar demokrasi nomor 2 sampai dengan 5, pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara sepihak untuk meminta persetujuan dari rakyatnya khususnya dalam hal beragama pemerintah akan memikirkan hak- hak dari kaum mayoritas dan minoritas di Indonesia hal ini merupakan aspek yang terpenting jikalau tidak demikian sudah sedari awal indonesia tidak memiliki rakyat yang berdaulat. Contoh kecil dimana pelaksanaan dari hal tersebut, Indonesia memberikan kebebasan dari masing- masing pemuka agama untuk menyampaikan syiar da'wah mereka di belahan bumi Indonesia manapun, di berikannya hari libur nasional bagi setiap perayaan tiap- tiap agama, tidak dibatasinya rakyat indonesia untuk beribadah di tempat peribadatannya. Jadi, tidak ada yang salah dengan hak- hak ummat beragama di Indonesia dengan adanya sistem demokrasi.

Dalam hal menjaga jiwa pun di dalam UUD 1945 NRI telah diatur dan di dalam pasal 28 A dan Pasal 28 H ayat (1), sebagaimana bunyi pasal yang termaktub tersebut ialah :

Pasal 28A

*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*⁸⁹

⁸⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet. Pertama, 2011), h.33.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 29.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 28.

Pasal 28H

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*⁹⁰

Di dalam pilar demokrasi pun telah dijamin di dalam pilar nomor 5 dan nomor 10, pemerintah akan menjamin hak- hak asasi manusia dan nilai – nilai toleransi di dalam bernegara dan menjaga martabat dan kehormatan baik jiwa maupun raga tiap- tiap rakyat indonesia, contoh dari pengaplikasian ini adalah rakyat Indonesia di berikan fasilitas pelayanan kesehatan baik mental maupun fisik, diberikannya hukum bagi siapa saja yang memicu konflik peperangan baik secara verbal maupun fisik.

Selain menjaga dalam hal jiwa, pemerintahan dengan sistem demokrasi pun dapat menjaga kita dalam hal akal. Hal tersebut termaktub di dalam pasal 28 C ayat (1) dan (2) dan pasal 28 E ayat (1) sebagaimana berbunyi:

Pasal 28C

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh mandaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*⁹¹

Pasal 28E

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*⁹²

⁹⁰ *Ibid.*, h. 31.

⁹¹ *Ibid.*, h. 29.

⁹² *Ibid.*, h. 29

HAM telah menjamin kita untuk menyatakan kebebasan dalam hal berfikir dan menyatakan pendapat, serta mengembangkan ide- ide dari dalam akal kita, tidak ada pembatasan selama hal tersebut tidak merugikan dan mengambil hak- hak orang lain dalam berfikir dan menyatakan pendapat. Di dalam sistem Demokrasi Indonesia sendiri adalah hal yang sangat lumrah terjadi ketika seseorang mengeyam bangku pendidikan dari sekolah dasar hingga perkuliahan baik itu formal maupun non formal tidak ada larangan dan tidak ada paksaan bahkan pemerintah sendiri pun memfasilitasi kegiatan belajar mengajar tersebut.

Menjaga harta adalah unsur maqashid al- syariah selanjutnya, hal ini pun telah dijamin di dalam UUD 1945 NRI, sebagaimana termaktub di dalam pasal 28G :

Pasal 28G

*(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*⁹³

Di dalam pilar demokrasi pun telah dijamin hal tersebut lewat pilar nomor 9, dimana keberagaman ekonomi maupun kekayaan tidaklah di permasalahan oleh negara. Negara dalam artian khusus pemerintah dengan sistem demokrasi tidak melarang rakyatnya memiliki kekayaan, justru ketika rakyat yang berdaulat kedapatan tidak memiliki harta kekayaan atau apapun itu pemerintah telah memfasilitasi lapangan pekerjaan baik lewat perusahaan maupun pegawai negeri sipil. Dalam hal penjagaan harta kekayaan pun pemerintah telah menyediakan keamanan lewat satuan keamanan seperti polisi, barang siapa yang kedapatan mencuri atau menipu akan diberikan hukuman dan ganjaran yang setimpal.

Kemashlatan terakhir dari maqashid al- syariah ialah menjaga keturunan, hal ini pun tidak luput dari perundang- undangan, sebagaimana termaktub di dalam pasal 28 B ayat (1) dan (2) dengan bunyinya sebagai berikut :

Pasal 28B

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

⁹³ Ibid., h. 30.

(2) *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*⁹⁴

Dalam hal menjaga keturunan di Indonesia sendiri tidak di batasi dan tidak dilarang untuk memiliki keturunan bahkan diberikan fasilitas- fasilitas yang menjamin kelangsungan hidup untuk keluarga tersebut, mulai dari pendidikan, sandang pangan, ekonominya dan beragam kebutuhan yang pemerintah dengan sistem demokrasi sediakan.

Di dalam banyaknya kasus yang terjadi sering kali ikhtilaf atau perselisihan dikarenakan perbedaan pendapat antara ahli ilmu yang satu dengan yang lainnya, hal ini tidak dapat di hindari namun, alangkah lebih baiknya hal tersebut dihindari apalagi sampai mencela dan berfikir mengarah ke fanatisme (ta'ssuf) yang berujung tidak dapat menerima kebenaran dan malah cenerung menyalahkan suatu kebenaran hal ini sungguh sangat dilarang oleh Allah swt., dengan tidak membuka akal dan fikiran maka kita telah terjebak dengan yang namanya egosime diri. Maka sudah sepatunya umat islam harus lebih memperbanyak dan memperkaya keilmuannya mengenai suatu negara agar tidak terjadi pergesekan- pergesekan yang terjadi dikarenakan memiliki cara pandang yang berbeda antara sesama ummat beragama seperti yang pernah penulis singgung pada bab pertama.⁹⁵

Di dalam demokrasi adanya radikalisme dan kefanatikan kepada hal tertentu, tentu saja hal ini dapat menciderai nilai- nilai demokrasi itu sendiri. Melihat keberagaman antara suku satu dengan yang lainnya agama satu dengan yang lainnya bukan tidak mungkin akan terjadi suatu kefanatikan yang disebabkan merasa lebih baik daripada yang lainnya, dalam pandangan mereka mengalah dan mengenal toleransi merupakan sebuah kesalahan besar yang menyalahi aturan- aturan yang telah mereka buat. Kalau hal ini terus di biarkan bukan tidak mungkin

⁹⁴ *Ibid.*, h. 28.

⁹⁵ Agus Hermanto, Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan, (Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, h. 245- 246. (Online). Tersedia di <https://scholar.google.co.id/citations?user=gfOHglAAAAAJ&hl=id&oi=ao> (diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 18 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

nilai- nilai demokrasi khususnya persatuan dan kesatuam dapat terkikis bahkan hilang sama sekali.⁹⁶

Sudahlah jelas hal yang selama ini menjadi perdebatan banyak pihak tentang layakkah sistem demokrasi di terapkan di Indonesia mengingat hal tersebut banyak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tapi, ternyata kemashlahatan didalamnya telah mencakupi unsur di dalam maqashid al- syariah. Sekarang bagaimana sikap terhadap sistem tersebut apakah ingin terus dengan pemikiran yang terkotak- kotak dan tidak berkembang atau mencoba memahami, dan berfikir lebih kritis dalam hal memahami sistem demokrasi yang ada.



⁹⁶ Mark Bevir, Democratic Governance: Systems and Radical Perspectives, (Public Administration Review, Vol. 1, No.66 Desember 2004), h. 29-30. (Online). Tersedia di <https://escholarship.org/uc/item/7mg729rw>, (di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 01 WIB), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan permasalahan yang ada dan berdasarkan paparan penjelasan, maka kajian analitis ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumbangsih Islam dan Pancasila terhadap proses demokratisasi dalam sepanjang era Reformasi telah berbuah positif terhadap posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara Muslim paling demokratis dimana Indonesia menempati peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dari India.
2. Sudahlah jelas hal yang selama ini menjadi perdebatan banyak pihak tentang layakkah sistem demokrasi di terapkan di Indonesia mengingat hal tersebut banyak yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Tapi, ternyata kemashlahatan didalamnya telah mencakupi unsur di dalam maqashid al-syariah.

B. Saran

1. Sebaiknya di dalam penerapan sistem demokrasi kita lebih memperhatikan aspek- aspek yang di inginkan kaum mayoritas dan minoritas jangan sampai ada pemikiran yang merasa dirugikan oleh adanya sistem tersebut.
2. Hendaknya pemerintah lebih menggalakkan kemabli sosialisasi terkait sistem demokrasi yang saat ini sedang di gunakan di Indonesia, agar masyarakat bisa lebih memahami apa itu hakikat demokrasi.
3. Pahami sedari dini untuk memahami konsep keagamaan secara kontekstualis bukan tekstualis, agar nantinya tidak timbul gesekan-gesekan kembali antara sistem dan agama.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku- buku

- Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka setia, 2008.
- Al – Qardhawi Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2007.
- Asshidiqie Jimly , *Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Azra Azyumardi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Basir, Asafir Jaya, *Konsep Maqasid Asy-Syar'iyah menurut Akitab.al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Efendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Garner, Bryan. A., *Black Law Dictionary*, American: West, 2009.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Haynes Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia ketiga (gerakan politik baru kaum terpinggir)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Hidayat Komarudin, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidaytullah, 2006.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Howard , Rhoda E., *HAM (Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.
- Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Iqbal Hasan, M., *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2018.

Kautum Ranny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet. Pertama, 2011.

Mamang Sangaji , Etta dkk., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.

Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Ngani Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Yustisia, 2012.

Nurtjahyo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.

Sulisworo Dwi, dkk., *Demokrasi* , Malang : Universitas Ahmad Dahlan, 2012.

Ubaedillah Ahmad, *Pancasila : Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.

_____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2006.

Washil Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2015.

2. Jurnal- Jurnal

Imam Annas Muslih, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah pemikiran Khaleed Abu el Fadl), *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VI No. 1, Januari 2012.

Hasbi Hasan, “Negara dan Hak- hak Minoritas Di Indonesia”. *Analisis Jurnal Studi Keislaman* Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.

A. Intan Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid Asy- Syari’ah, (*Al- Qadau* Vol. I No. 2, 2014), (Online). Tersedia di <http://journal.uin-alaududin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637>, (diakses 02 Juni 2019 pukul 21. 00 WIB).

Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif al- Syatibi, (Syariah dan Hukum, Vol. VI No. 1, Juni 2014), (Online). Tersedia di <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190/5031>, (diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB).

Arif Wibowo, Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah, (*Islamic Finance_04*, 2012), (Online). Tersedia di http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Arif_%20Wibowo_%20MEI/ISLAMIC_%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy_%20Syariah.pdf, diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21. 15 WIB.

Mentary Meidiana, Memperkuat Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa, (*UGM, VoL. 3* No. 1, Desember 2017), (Online). Tersedia di <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921> diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 15 WIB.

Agus Hermanto, Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan, (Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, (Online). Tersedia di <https://scholar.google.co.id/citations?user=gfOHglAAAAA&hl=id&oi=ao> diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 18 WIB.

Ngainum Naim, Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid, (*Epistémé*, Vol. 10 No. 2, Desember 2015), (Online). Tersedia di <https://journal.iain-tulungagung.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921>, diakses pada tanggal 02 Juni, pukul 2019 21: 20 WIB.

- Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai- Nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), (Al-'Adalah Vol. XI, No. 2 Juli 2013), (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433, diakses pada tanggal 02 juni, pukul 21: 20 WIB.
- Cora Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, (Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013), (Online). Tersedia di [https://www.neliti.com/publications/108628 / demokrasi-dan-sistem-pemerintahan](https://www.neliti.com/publications/108628/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan), diakses pada tanggal 02 Juni, Pukul 21: 30 WIB.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, (Jurnal Mahkamah Konstitusi), (Online). Tersedia di [jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile / 233 / 213](http://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213) , di akses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 45 WIB.
- Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila, (Al- 'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014), h. 173. (Online). Tersedia di [www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah /article/view /182/422](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182/422), (diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 21:20 WIB).
- Mark Bevir, Democratic Governance: Systems and Radical Perspectives, (Public Administration Review, Vol. 1, No.66 Desember 2004), (Online). Tersedia di <https://escholarship.org/uc/item/7mg729rw>, di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 01 WIB.
- Michael Zurn, Democratic Governance Beyond The Nation State ?, (InIIS-Arbeitspapier Vol. 12 No.98 Juli 2001), (Online). Tersedia di [https://pdfs.Semantic scholar.org /d3ca/ 6d804491e6 e01fbd e333b 82ad83e92b520fd.pdf](https://pdfs.semanticscholar.org/d3ca/6d804491e6e01fbd e333b82ad83e92b520fd.pdf), di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 09 WIB.
- Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, (*The American Journal of International Law*, Vol. 86, No. 1 Januari 1992), (Online). Tersedia di [http://links.jstor .org/sici?sici=0002-9300%28199201%2986%3A1%3C 46%3ATERT DG%3E 2.0.CO % 3B2-5](http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28199201%2986%3A1%3C46%3ATERT DG%3E 2.0.CO % 3B2-5), diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 16 WIB.
- Made Hendra Wijaya, (Jurnal Advokasi Vol. 5, No.2, September 2015), (Online). Tersedia di [https://s3.amazonaws.com/academia. edu.documents/37958833/aprs2005.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37958833/aprs2005.pdf) diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 17 WIB.
- John Gerring, Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry, (American Political Science Review Vol. 99, No. 4 November 2005), (Online).

Tersedia di https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/379_58833/aprsr2005.pdf, di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 18 WIB.

Saifudin, Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Al- ‘Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017.. (Online). Tersedia di <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2516>, (diakses pada tanggal 22 Juli, Pukul 15: 34 WIB.

Muhammad Mawardi Jalaludin, Pemikiran Abu Ishaq al- syatibi dalam kitab al-muwafaqat, (Ad- daulah Vol. 4, No. 2, Desember 2015), (Online). Tersedia di <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=maqashid&btnG=>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 38 WIB.

Agus Hermanto, Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), (Al- Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017), (Online). Tersedia di <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414>, (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 13 WIB.

Siti Mahmudah, Politik Penerapan Syari’at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD), (Al-‘Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433, (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 17 WIB.



BIBLIOGRAPHY

1. THE BOOKS

- Ahmad Beni, *Metode Penelitian*, Bandung : Pustaka setia, 2008.
- Al – Qardhawi Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta Timur: Pustaka Al- Kautsar, 2007.
- Asshidiqie Jimly , *Hukum Tata Negara & Pilar- Pilar Demokrasi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Azra Azyumardi, *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.
- Basir, Asafir Jaya, *Konsep Maqasid Asy-Syar'iyah menurut Akitab.al-Syatibi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Efendi Satria, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Garner, Bryan. A., *Black Law Dictionary*, American: West, 2009.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Haynes Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia ketiga (gerakan politik baru kaum terpinggir)*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.
- Hidayat Komarudin, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2006.
- Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta : Raja Grafindo, 2012.
- Howard , Rhoda E., *HAM (Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya)*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.

- Ilmar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Iqbal Hasan, M., *Pokok- pokok Materi Metodologi Penelitian dan aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah : Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Jauhar, Ahmad Al- Mursi Husain, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Kautum Ranny, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cet. Pertama, 2011.
- Mamang Sangaji , Etta dkk., *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2010.
- Moleong Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Ngani Nico, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta : Yustisia, 2012.
- Nurtjahyo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2006.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sulisworo Dwi, dkk., *Demokrasi* , Malang : Universitas Ahmad Dahlan, 2012.
- Ubaedillah Ahmad, *Pancasila : Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2015.
- _____, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2006.

Washil Nashr Farid Muhammad, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: Amzah, 2015.

2. THE JOURNALS

Imam Annas Muslih, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam perspektif Hermeneutika Hukum Islam (Telaah pemikiran Khaleed Abu el Fadl), *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VI No. 1, Januari 2012.

Hasbi Hasan, "Negara dan Hak- hak Minoritas Di Indonesia". *Analisis Jurnal Studi Keislaman* Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.

A. Intan Cahyani, Teori dan Aplikasi Maqashid Asy- Syari'ah, (*Al- Qadau* Vol. I No. 2, 2014), (Online). Tersedia di <http://journal.uin-alaududin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/637>, (diakses 02 Juni 2019 pukul 21. 00 WIB).

Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari'ah Perspektif al- Syatibi, (Syariah dan Hukum, Vol. VI No. 1, Juni 2014), (Online). Tersedia di <http://ejournal.uinmalang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190/5031>, (diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21.00 WIB).

Arif Wibowo, Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah, (*Islamic Finance*_04, 2012), (Online). Tersedia di <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/pendidikan/Arif%20Wibowo,%20MEI/ISLAMIC%20FINANCE%2004%20-%20Maqashid%20Asy%20Syariah.pdf>, diakses pada 02 Juni 2019, pukul 21. 15 WIB.

Mentary Meidiana, Memperkuat Konsep Kebebasan Beragama di Indonesia Sesuai Dengan Pancasila Dalam Mempertahankan Kesatuan Bangsa, (*UGM, VoL. 3* No. 1, Desember 2017), (Online). Tersedia di <https://journal.ugm.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921> diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 15 WIB.

Agus Hermanto, Hukum Islam Dalam Memaknai Sebuah Perbedaan, (Mahkamah, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, (Online). Tersedia di <https://scholar.google.co.id/citations?user=gfOHglAAAJ&hl=id&oi=ao> diakses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 18 WIB.

Ngainum Naim, Islam dan Pancasila: Rekonstruksi Pemikiran Nurcholish Madjid, (*Epistemé*, Vol. 10 No. 2, Desember 2015), (Online). Tersedia di <http://https://journal.iain.tulungagung.ac.id/wisdom/article/viewFile/31325/18921>, diakses pada tanggal 02 Juni, pukul 2019 21: 20 WIB.

Rahmawati Pardjaman, Transformasi Nilai- Nilai Syari'ah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika), (*Al-Adalah* Vol. XI, No. 2 Juli

2013), (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433, diakses pada tanggal 02 juni, pukul 21: 20 WIB.

Cora Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, (Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni 2013), (Online). Tersedia di <https://www.neliti.com/publications/108628/demokrasi-dan-sistem-pemerintahan>, diakses pada tanggal 02 Juni, Pukul 21: 30 WIB.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi, (Jurnal Mahkamah Konstitusi), (Online). Tersedia di jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/viewFile/233/213, di akses pada tanggal 02 Juni 2019, Pukul 21: 45 WIB.

Zuhraini, Kontribusi Nomokrasi Islam (Rule of Islamic Law) Terhadap Negara Hukum Pancasila, (Al- ‘Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014), h. 173. (Online). Tersedia di www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/182/422, (diakses pada tanggal 20 Juni 2019, Pukul 21:20 WIB.

Mark Bevir, Democratic Governance: Systems and Radical Perspectives, (Public Administration Review, Vol. 1, No.66 Desember 2004), (Online). Tersedia di <https://escholarship.org/uc/item/7mg729rw>, di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 01 WIB.

Michael Zurn, Democratic Governance Beyond The Nation State ?, (InIIS-Arbeitspapier Vol. 12 No.98 Juli 2001), (Online). Tersedia di <https://pdfs.semanticscholar.org/d3ca/6d804491e6e01fbd e333b82ad83e92b520fd.pdf>, di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 09 WIB.

Thomas M. Franck, The Emerging Right to Democratic Governance, (*The American Journal of International Law*, Vol. 86, No. 1 Januari 1992), (Online). Tersedia di <http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9300%28199201%2986%3A1%3C46%3ATERT DG%3E 2.0.CO % 3B2-5>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 16 WIB.

Made Hendra Wijaya, (Jurnal Advokasi Vol. 5, No.2, September 2015), (Online). Tersedia di <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37958833/aprs2005.pdf> diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 17 WIB.

John Gerring, Centripetal Democratic Governance: A Theory and Global Inquiry, (American Political Science Review Vol. 99, No. 4 November 2005), (Online). Tersedia di <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37958833/aprs2005.pdf>, di akses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 18 WIB.

Saifudin, Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Al- 'Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017.. (Online). Tersedia di <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2516>, (diakses pada tanggal 22 Juli, Pukul 15: 34 WIB.

Muhammad Mawardi Jalaludin, Pemikiran Abu Ishaq al- syatibi dalam kitab al- muwafaqat, (Ad- daulah Vol. 4, No. 2, Desember 2015), (Online). Tersedia di <https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&assdt=0%2C5&q=maqashid&btnG=>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 15: 38 WIB.

Agus Hermanto, Konsep *Maslahat* dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tûfi dan al-Ghazali), (Al- Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017), (Online). Tersedia di [http:// dx .doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414](http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.2414), (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 13 WIB.

Siti Mahmudah, Politik Penerapan Syari'at Islam dalam Hukum Positif di Indonesia (Pemikiran Mahfud MD), (Al-'Adalah Vol. X, No. 4 Juli 2012), (Online). Tersedia di [www.ejournal .radenintan.ac.id /index.php/ adalah/article /view /272/433](http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/272/433), (diakses pada tanggal 22 Juli 2019, Pukul 21: 17 WIB.



